



GDPK

GRAND DESIGN

**PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024-2048



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP2KB)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**





GDPK

GRAND DESIGN

**PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024-2048

**TIM PENYUSUN
KELOMPOK KERJA (POKJA)**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Dasar Hukum	4
Maksud dan Tujuan	5
Pengertian	5
Kedudukan dan Ruang Lingkup	7
Pendekatan	10

BAB II ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN

2.1. Analisis Situasi	12
2.1.1. Situasi Internal	12
2.1.2. Situasi Eksternal	13
2.2. Capaian Pembangunan Kependudukan	15
2.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	15
2.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	31
a. Kesehatan	33
b. Pendidikan	43
c. Ekonomi	57
b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0)	68
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	71
d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	74
2.2.3. Pembangunan Keluarga	79
2.2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk	82
2.2.5. Penataan Administrasi Kependudukan	84

BAB III PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL

3.1. Proyeksi	86
3.1.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	86
3.1.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	87
3.1.3. Pembangunan Keluarga	98
3.1.4. Penataan Administrasi Kependudukan	99
3.2. Kondisi Yang Diharapkan	100

BAB IV VISI, MISI, DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Visi dan Misi..... 101

4.2. Isu-Isu Strategis..... 101

BAB V ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

5.1. Arah Kebijakan..... 103

5.2. Tujuan Strategis..... 103

5.3. Sasaran Strategis..... 104

5.4. Strategi..... 104

BAB VI PETA JALAN (*ROAD MAP*)

6.1. *Road Map* Pengendalian Kuantitas Penduduk 107

6.2. *Road Map* Peningkatan Kualitas Penduduk..... 108

6.3. *Road Map* Pembangunan Keluarga..... 110

6.4. *Road Map* Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 111

6.5. *Road Map* Penataan Administrasi Kependudukan 112

BAB VII PENUTUP

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kedudukan GDPK dalam Perencanaan Pembangunan Nasional8

Gambar 1.2 Kedudukan GDPK dalam Rencana Pembangunan Daerah9

Gambar 2. 1. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota, 202318

Gambar 2. 2. Penduduk Hasil Sensus Kabupaten Kutai Kartanegara, 1990-202018

Gambar 2. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara 2018-202319

Gambar 2. 4. Angka Beban Ketergantungan Kutai Kartanegara, 2016-202420

Gambar 2. 5. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 202421

Gambar 2. 6. Angka TFR Kutai Kartanegara, SP 2010 dan LF SP 202022

Gambar 2. 7. Angka ASFR Kutai Kartanegara, 2020.23

Gambar 2. 8. Perkembangan Peserta KB Aktif (%) dan Peserta KB Pasca Persalinan (%),
2017-202225

Gambar 2. 9. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Kutai Kartanegara, 2016-202227

Gambar 2. 10. Posisi IPG Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota dan Kalimantan Timur,
202228

Gambar 2. 11. Posisi IDG Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota dan Kalimantan Timur,
202228

Gambar 2. 12. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kutai Kartanegara,
2018-202129

Gambar 2. 13. Angka Kematian Bayi Kutai Kartanegara, SP2010 & LF SP202030

Gambar 2. 14. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kalimantan Timur Menurut
Kab/Kota, 2020.31

Gambar 2. 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara,
2019-202332

Gambar 2. 16. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara terhadap
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, 202332

Gambar 2. 17. Umur Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-202333

Gambar 2. 18. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Kartanegara
terhadap Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur, 202334

Gambar 2. 19. Posisi Prevalensi Stunting Kutai Kartanegara, 202242

Gambar 2. 20. Perkembangan Stunting (TB/U) dan Gizi Kurang (BB/U) Kutai Kartanegara,
2016-202043

Gambar 2. 21. Perkembangan APS Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Umur, 2020-
202345

Gambar 2. 22. Perkembangan APM Kutai Kartanegara, 2020-202347

Gambar 2. 23. Perkembangan APK Kutai Kartanegara, 2020-202349

Gambar 2. 24 Perkembangan AMH Kutai Kartanegara, 2029-202352

Gambar 2. 25. Relevansi Perkembangan AMH Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional	53
Gambar 2. 26. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023	54
Gambar 2. 27. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023	55
Gambar 2. 28. Relevansi Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023.	56
Gambar 2. 29. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023	56
Gambar 2. 30. Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kutai Kartanegara, 2019-2023	57
Gambar 2. 31. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021	58
Gambar 2. 32 Perkembangan TPAK Kutai Kartanegara, 2019-2023	59
Gambar 2. 33. Relevansi Perkembangan TPAK Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023	62
Gambar 2. 34. Posisi Relatif TPAK Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2023	63
Gambar 2. 35. Perkembangan TPT Kutai Kartanegara, 2019-2023	63
Gambar 2. 36. Relevansi Perkembangan TPT Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023	65
Gambar 2. 37 Posisi Relatif TPT Kutai Kartanegara terhadap Kab./Kota, Kaltim, dan Nasional, 2023	66
Gambar 2. 38. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2023	67
Gambar 2. 39. Relevansi gini rasio Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023	68
Gambar 2. 40. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0) Kutai Kartanegara, 2019-2024	69
Gambar 2. 41. Relevansi Perkembangan P_0 Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional	70
Gambar 2. 42. Posisi Relatif P_0 Kutai Kartanegara, 2023	71
Gambar 2. 43 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kutai Kartanegara, 2019-2024	72
Gambar 2. 44. Relevansi Perkembangan Tingkat Kedalaman (P_1) Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan TImur dan Nasional, 2020-2024	73
Gambar 2. 45. Posisi Relatif Indeks Kedalaman (P_1) Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota, 2024	74

Gambar 2. 46. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara, 2020-202475

Gambar 2. 47. Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2020-202476

Gambar 2. 48. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara terhadap Kabupaten/Kota, 2024 77

Gambar 2. 49. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kutai Kartanegara, 2020-202278

Gambar 2. 50. Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Ektrem Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Kab/Kota, 202279

Gambar 2. 51. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara, 2018-202280

Gambar 2. 52. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara berdasarkan Kelompok Pengeluaran, 2018-202280

Gambar 2. 53. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018-202281

Gambar 2. 54. Persentase Migran Seumur Hidup di Kutai Kartanegara Menurut Generasi, 202083

Gambar 2. 55. Persentase Migran Risen di Kutai Kartanegara Menurut Generasi, 202084

Gambar 2. 56. Perkembangan Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-202284

Gambar 2. 57. Perkembangan Persentase Penduduk Yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelpok Umur Kutai Kartanegara, 2018-202285

Gambar 3. 1. Perkembangan TFR Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017-202086

Gambar 3. 2. Proyeksi Perkembangan TFR Kutai Kartanegara, 2022-2026.....86

Gambar 3. 3. Posisi Relatif IPG Kutai Kartanegara, 2021.....87

Gambar 3. 4. Perkembangan IPM Kutai Kartanegara, 2015-2021.....88

Gambar 3. 5. Posisi IPM Kukar terhadap Indonesia, Kaltim, dan Kab/Kota, 2021.....89

Gambar 3. 6. Proyeksi Perkembangan IPM Kutai Kartanegara, 2023-202689

Gambar 3. 7. Perkembangan HLS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021.....90

Gambar 3. 8. Posisi Relatif HLS Kutai Kartanegara, 202190

Gambar 3. 9. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021.....91

Gambar 3. 10. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kutai Kartanegara, 2021.....91

Gambar 3. 11. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kutai Kartanegara, 2016-202192

Gambar 3. 12. Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kutai Kartanegara, 202193

Gambar 3. 13. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kutai Kartanegara, 202194

Gambar 3. 14. Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kutai Kartanegara, 2022-2026. 94

Gambar 3. 15. Posisi Gini Rasio Kutai Kartanegara, 2021 95

Gambar 3. 16. Proyeksi Perkembangan IGR Kutai Kartanegara, 2022-2026 95

Gambar 3. 17. Proyeksi Perkembangan TPT Kutai Kartanegara, 2022-2026..... 96

Gambar 3. 18. Posisi Relatif TPT Kutai Kartanegara, 2021..... 96

Gambar 3. 19. Proyeksi Perkembangan Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Kutai
Kartanegara, 2022-2026. 97

Gambar 3. 20. Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita pertahun Penduduk Kutai Kartanegara
(000 Rupiah), 2021..... 97

Gambar 3. 21. Proyeksi Perkembangan IPG Kutai Kartanegara, 2022-2026 98

Gambar 3. 22. Posisi Relatif IPG Kutai Kartanegara, 2021..... 98

Gambar 3. 23. Proyeksi Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik, KIA, dan Akta Lahir Kutai
Kartanegara, 2022-2026 99

Gambar 5. 1. Keterkaitan Lima Pilar GDPK..... 103

Gambar 6. 1. Keterkaitan Grand Design dengan Road Map 107

Gambar 6. 2. Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk 2024-2048..... 107

Gambar 6. 3. Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk 2024-2048 109

Gambar 6. 4. Road Map Pembangunan Keluarga 2024-2048..... 110

Gambar 6. 5. Road Map Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
2024-2048..... 111

Gambar 6. 6. Road Map Penataan Administrasi Kependudukan 2024-2048 112

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 202316

Tabel 2. 2. Perkembangan Proporsi Penduduk Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016-2020.....24

Tabel 2. 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022.....25

Tabel 2. 4. Perkembangan sumber daya manusia kesehatan Kutai Kartanegara, 2018-2022.....35

Tabel 2. 5. Perkembangan Pelayanan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kutai Kartanegara, 2018-2022.....36

Tabel 2. 6. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Kutai Kartanegara, 2018-2022.....36

Tabel 2. 7. Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Anak Kutai Kartanegara, 2018-2022.....37

Tabel 2. 8. Perkembangan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kutai Kartanegara, 2018-2022.....37

Tabel 2. 9. Perkembangan Pengendalian Penyakit yang Dapat dicegah Kutai Kartanegara, 2018-2022.....39

Tabel 2. 10. Perkembangan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kutai Kartanegara, 2018.....40

Tabel 2. 11. Perkembangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kutai Kartanegara, 2018-2022.....40

Tabel 2. 12. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kutai Kartanegara, 2018-2022.....41

Tabel 2. 13. Relevansi Perkembangan APS Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2020-202346

Tabel 2. 14. Relevansi APM Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional48

Tabel 2. 15. Relevansi APK Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2020-2023.....51

Tabel 2. 16. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara, 202360

Tabel 2. 17. Perkembangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kutai Kartanegara Menurut Bentuk81

Tabel 2. 18. Migrasi Masuk Keluar Bersih Kutai Kartanegara, 2019-202083

Tabel 3. 1. Perkembangan Komponen IPM Kutai Kartanegara 2015-2020	88
Tabel 3. 2. Angka Partisipasi Murni (APM), Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021.	92
Tabel 3. 3. Kondisi Yang Diharapkan	100
Tabel 6. 1. Kondisi Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk yang diinginkan akhir Road Map	108
Tabel 6. 2. Kondisi Indikator Kualitas Penduduk yang diinginkan diakhir Road Map	109
Tabel 6. 3. Kondisi Indikator Pembangunan Keluarga Akhir Road Map.....	110
Tabel 6. 4. Kondisi Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Akhir Road Map.....	111
Tabel 6. 5. Kondisi Indikator Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan yang diinginkan di Akhir Road Map.....	112

Daftar Singkatan

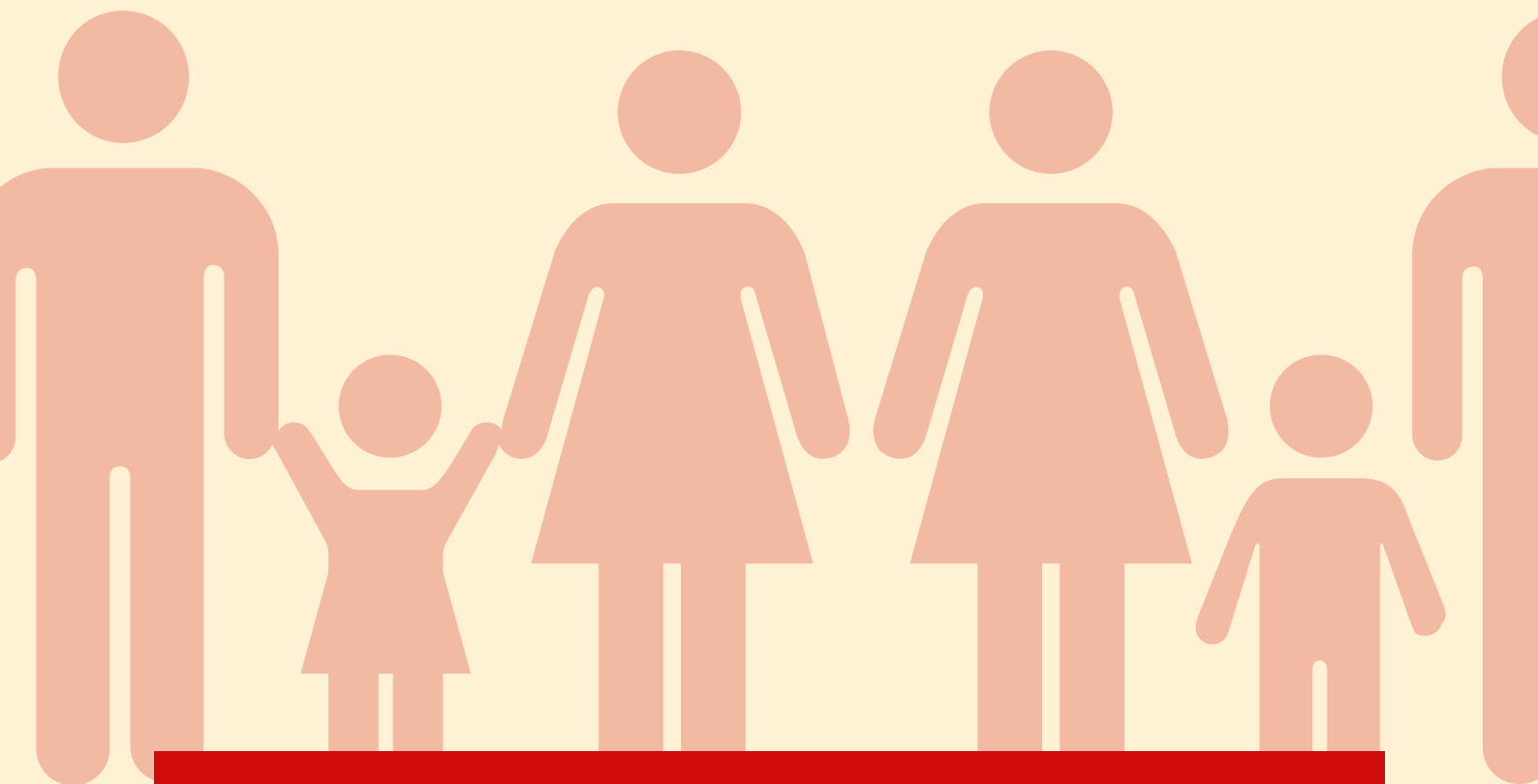
ABK	Angka Beban Ketergantungan
AFP	<i>Acute Flaccid Paralysis</i>
AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
AKBa	Angka Kematian Balita
AKI	Angka Kematian Ibu
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASFR	<i>Age Spesific Fertility Rate</i>
ASI	Air Susu Ibu
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/U	Berat Badan/Usia
BPS	Badan Pusat Statistik
BTA	Basil Tahan Asam
CNR	<i>Case Notification Rate</i>
COVID	<i>Coronavirus Disease</i>
DBD	Demam Berdarah Dengue
DM	Diabetes Melitus
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSS	<i>Decision Support System</i>
EYS	<i>Expected years of schooling</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
TFR	<i>Total Fertility Rate</i>
GDPK	Grand Design Pembangunan Kependudukan
GNP	<i>Gross National Product</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
HIV-AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
HLS	Harapan lama sekolah
HPK	Hari Pertama Kehidupan
IKN	Ibu Kota Negara
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IGR	Indeks Gini Ratio
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

Kaltim	Kalimantan Timur
KB	Keluarga Berencana
KLB	Kejadian Luar Biasa
Kepmenkes	Keputusan Menteri Kesehatan
K/L	Kementerian/Lembaga
KH	Kelahiran Hidup
KIA	Kartu Identitas Anak
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LF	<i>Long Form</i>
MB	Multi Basiler
MMR	<i>Maternal Mortality Ratio</i>
MR	<i>Measles Rubella</i>
NCDR	<i>New Case Detection Rate</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NRR	<i>Net Reproduction Rate</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	<i>One Stop Service</i>
PTM	Penyakit Tidak Menular
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Perpres	Peraturan Presiden
PB	Pausi Basiler
PDRB	Produk Domestik Regional Brutto
PBK	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PT	Perguruan Tinggi
PTS	Penduduk Tumbuh Seimbang
Renstra	Rencana Strategis
Renaksi	Rencana Aksi
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RFT	<i>Release From Treatment</i>
RI	Republik Indonesia
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SK	Surat Keputusan

SLTA	Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SMAM	Singular Mean at First Marriage
SP	Sensus Penduduk
SSGI	Survey Status Gizi Indonesia
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TBC	Tuberkulosis
TB/U	Tinggi Badan/Usia
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UCI	<i>Universal Child Immunization</i>
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
UHH	Umur Harapan Hidup
UNDP	<i>United Nation Development Program</i>
UUD	Undang-Undang Dasar
WHO	<i>World Health Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu pilar utama dalam memajukan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, Kabupaten Kukar dihadapkan pada berbagai tantangan besar yang memerlukan perencanaan strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Periode 2024-2048 menjadi momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan kependudukan, di mana terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan, antara lain dampak pandemi COVID-19, fenomena bonus demografi, serta pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan, termasuk di Kabupaten Kukar. Sektor kesehatan menjadi yang paling terdampak, dengan sistem kesehatan yang tertekan oleh lonjakan kasus dan kebutuhan pelayanan yang sangat tinggi. Selain itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi menyebabkan terganggunya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat yang menurun, serta terhambatnya aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu dampak besar lainnya adalah perubahan pola migrasi penduduk. Banyak warga yang terdampak oleh krisis ekonomi terpaksa berpindah ke daerah yang lebih terjangkau, sementara sejumlah pekerja migran yang sebelumnya bekerja di luar daerah atau luar negeri juga pulang ke kampung halaman. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memengaruhi distribusi penduduk, tingkat urbanisasi, dan kebutuhan layanan dasar di daerah tersebut.

Pandemi ini juga mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pemulihan pasca-pandemi membutuhkan langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak jangka panjangnya, seperti meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat sektor ekonomi berbasis digital, serta menyesuaikan kebijakan pembangunan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada periode 2024-2048 menjadi tantangan dan sekaligus peluang besar bagi Kabupaten Kukar. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, Kabupaten Kukar memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini juga membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak hanya menjadi beban, melainkan sebuah keuntungan demografis.

Penduduk usia produktif yang besar dapat mendorong peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi ini, diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, seperti

perumahan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya, juga harus diperhatikan agar dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah perlu memanfaatkan peluang ini dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka sektor-sektor baru yang dapat menyerap tenaga kerja, serta merancang kebijakan sosial yang dapat mendukung pemberdayaan generasi muda, seperti program kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa dampak besar, tidak hanya bagi kota yang menjadi ibu kota baru, tetapi juga bagi daerah-daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dipersiapkan untuk mendukung IKN akan menciptakan peluang ekonomi baru, namun juga akan membawa tantangan dalam hal pengelolaan kependudukan.

Seiring dengan arus urbanisasi yang meningkat akibat pembangunan IKN, diperkirakan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kukar. Peningkatan jumlah tenaga kerja, investor, serta keluarga-keluarga yang akan bermigrasi menuju daerah ini membutuhkan kesiapan dalam hal penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, jalan, sistem transportasi, serta fasilitas publik lainnya. Selain itu, perencanaan tata ruang juga harus memperhatikan perkembangan pesat yang mungkin terjadi di kawasan-kawasan strategis yang berdekatan dengan IKN.

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan juga harus menjadi prioritas dalam menghadapi potensi pertumbuhan yang pesat ini. Kabupaten Kukar harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh pembangunan IKN, sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Isu pelayanan dasar, yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan energi, merupakan tantangan besar dalam pembangunan Kabupaten Kukar ke depan. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat ketimpangan dan kekurangan dalam kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sektor kesehatan, meskipun telah ada upaya untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi masalah. Hal ini dapat memperburuk ketahanan masyarakat terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular, serta dampak buruk dari bencana atau krisis kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan peningkatan kapasitas tenaga medis sangat diperlukan.

Di bidang pendidikan, meskipun Kabupaten Kukar telah berupaya memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah masih cukup tinggi. Akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, harus menjadi prioritas dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia yang dapat

berkontribusi pada pembangunan daerah. Selain itu, pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan juga harus diperkuat agar penduduk, terutama generasi muda, dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis.

Sektor air bersih dan sanitasi juga merupakan masalah yang masih perlu perhatian serius. Meskipun beberapa daerah telah mendapatkan akses yang lebih baik, masih ada wilayah yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Penyediaan infrastruktur dasar ini akan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk.

Di bidang energi, meskipun Kabupaten Kukar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan listrik yang memadai. Penyediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk industri, pendidikan, dan kesehatan.

Menghadapi ketiga isu utama—dampak pandemi COVID-19, bonus demografi, pemindahan IKN, dan isu pelayanan dasar—Kabupaten Kutai Kartanegara harus merumuskan strategi pembangunan yang integratif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan kependudukan yang disusun harus memperhatikan keterkaitan antar sektor dan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan dalam hal penyediaan pelayanan dasar, pengelolaan sumber daya alam, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus dilakukan secara sinergis, seiring dengan pengelolaan arus urbanisasi dan perubahan demografi yang akan terjadi akibat pemindahan IKN. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Konvergensi isu-isu strategis pembangunan kependudukan yang disebutkan—dampak pandemi COVID-19, bonus demografi, pemindahan IKN, dan layanan dasar—mewajibkan Kabupaten Kukar untuk merumuskan strategi pembangunan kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya perlu adanya kebijakan yang dapat mengoptimalkan peluang dari bonus demografi, namun juga harus ada upaya maksimal untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh dampak pandemi dan urbanisasi yang terjadi akibat pemindahan IKN.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat menjadi kunci. Penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, harus seiring sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas

penduduk, memperkuat konektivitas antar daerah, serta mendorong inklusi sosial juga harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya GDPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048, diharapkan dapat tercipta suatu peta jalan pembangunan kependudukan yang tidak hanya merespons tantangan yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang yang timbul seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di tingkat nasional dan global.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048 berdasarkan beberapa peraturan yang terkait dengan kependudukan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
18. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan GDPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah di bidang pembangunan kependudukan yang mencakup lima pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen GDPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048 adalah:

1. Sebagai dokumen kebijakan dan acuan dasar semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha/ swasta dalam pembangunan kependudukan;
2. Sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Development Goals*);
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Pembangunan Kependudukan.

1.4. Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam panduan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini, antara lain:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
4. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami

istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara.

19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
26. *Roadmap* merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

1.5. Kedudukan dan Ruang Lingkup

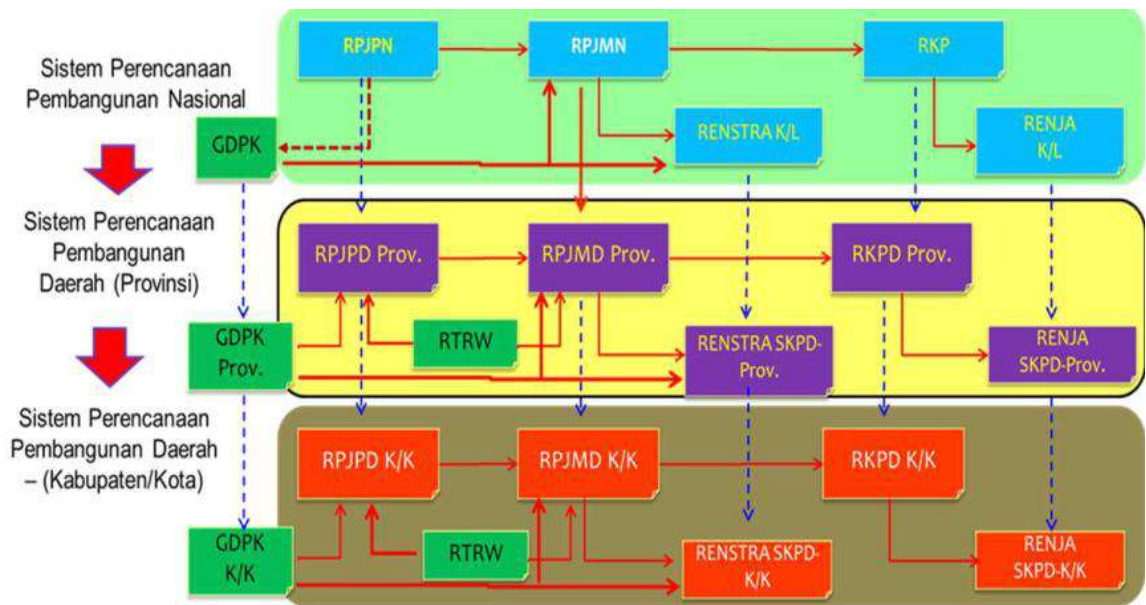
GDPK merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi lima pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi kependudukan.

1.5.1. Kedudukan GDPK dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

GDPK merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang dipandu oleh Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Kedudukan GDPK dalam tata kebijakan pemerintah daerah menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam bidang pembangunan kependudukan.

Gambar 1.1. Kedudukan GDPK dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

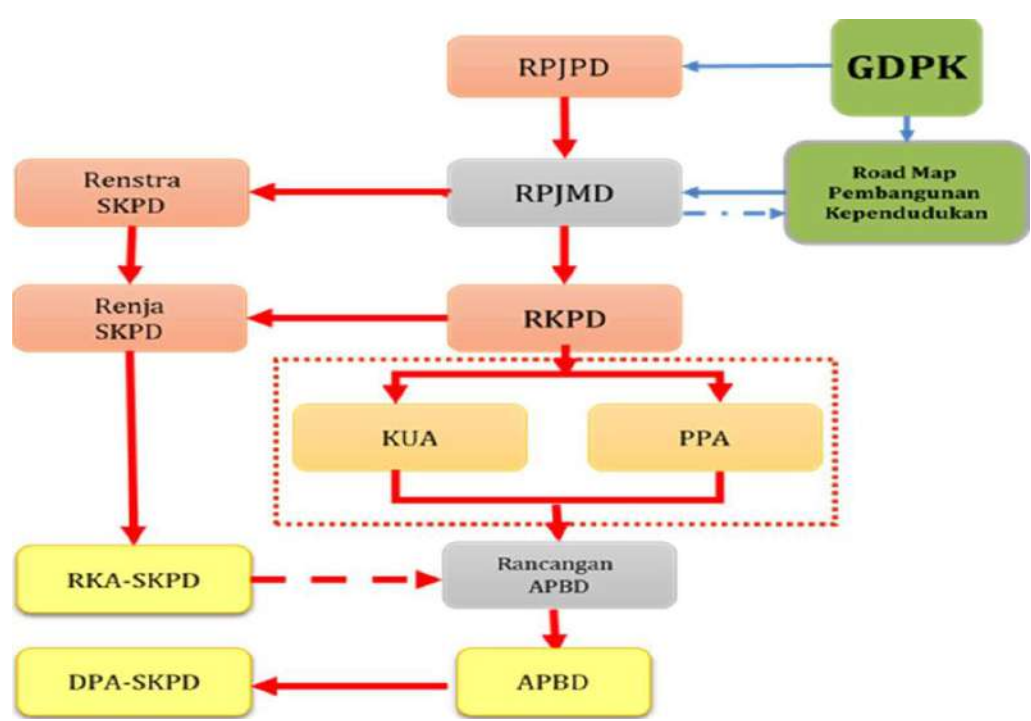


1.5.2. Kedudukan GDPK dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *roadmap* bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan. Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan *grand design* dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

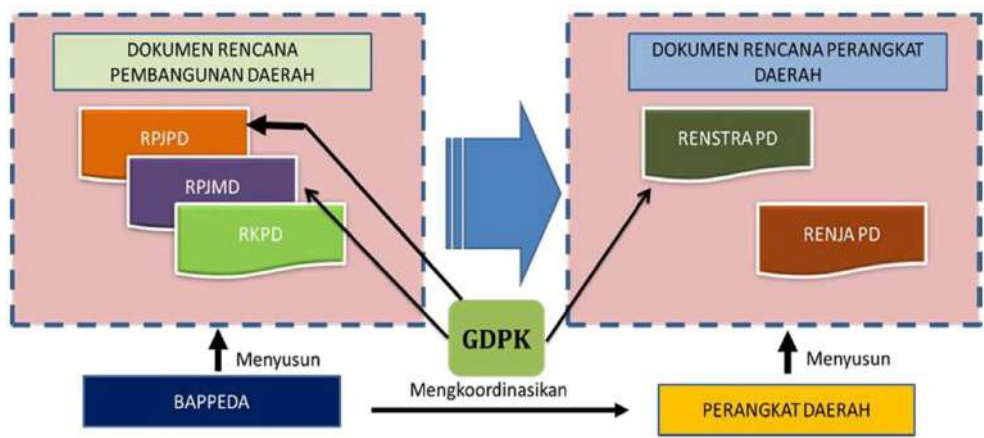
Gambar 1.2 Kedudukan GDPK dalam Rencana Pembangunan Daerah



1.5.3. Kedudukan GDPK dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

GDPK 5 Pilar Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Bagan berikut menjelaskan kedudukan GDPK dalam penyusunan Renstra OPD.

Bagan 1. 1. Kedudukan GDPK terhadap Renstra OPD



1.6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan GDPK Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) dan *sustainable development goals (SDGs)*. Pendekatan PBK atau *people centered development* berfokus pada perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia (Korten, dalam Tjokrowinoto, 1999). Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowering*) dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong manusia untuk mengaktualisasi potensi dirinya lebih besar. Keberhasilan pembangunan diukur melalui Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang mencakup lima dimensi, yaitu partisipasi, keberlangsungan, pro rakyat, integrasi, dan kesetaraan gender.

Disamping itu juga terdapat pendekatan pembangunan manusia (*human development*). Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan manusia (UNDP, 1990). Konsep ini merupakan koreksi terhadap teori *economy growth* yang hanya menekankan pada indikator domestik bruto dan pendapatan perkapita. Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia harus mencapai empat hal, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pembedayaan.

Keberhasilan pembangunan diukur dengan menggunakan indikator yang disebut *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup. Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.
2. Indeks Pendidikan. Penghitungan Indeks Pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kedua indikator pendidikan ini menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Indeks Hidup Layak. Standar hidup layak diukur menggunakan PDRB per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Konsep ini berfokus tidak hanya pada angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial namun pada peningkatan perkembangan dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability*. Model ini lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowering*), pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk

berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong manusia untuk mengaktualisasi potensi dirinya lebih besar.

Penyusunan GDPK Kutai Kartanegara juga mengacu pada pendekatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs memiliki tujuan dan target yang akan dicapai pada tahun 2030, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kesetaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Infrastruktur, Industri, dan Inovasi;
10. Mengurangi Ketimpangan;
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Menjaga Ekosistem Laut;
15. Menjaga Ekosistem Darat;
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

1.7. Sistematika

Sistematika *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kutai Kartanegara 2024-2048 disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Pengertian
- 1.5. Kedudukan dan Ruang Lingkup
- 1.6. Pendekatan
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB 2 ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

- 2.1. Analisis Situasi
- 2.2. Capaian Pembangunan Kependudukan
 - 2.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 2.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
 - 2.2.3. Pembangunan Keluarga
 - 2.2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
 - 2.2.5. Penataan Administrasi Kependudukan

BAB 3 PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIHARAPKAN

- 3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
- 3.3. Pembangunan Keluarga
- 3.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
- 3.5. Kelembagaan dan Pembangunan Data Base Penduduk

BAB 4 VISI, MISI, DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Isu-Isu Strategis

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Tujuan Strategis
- 5.3. Sasaran Strategis
- 5.4. Strategi

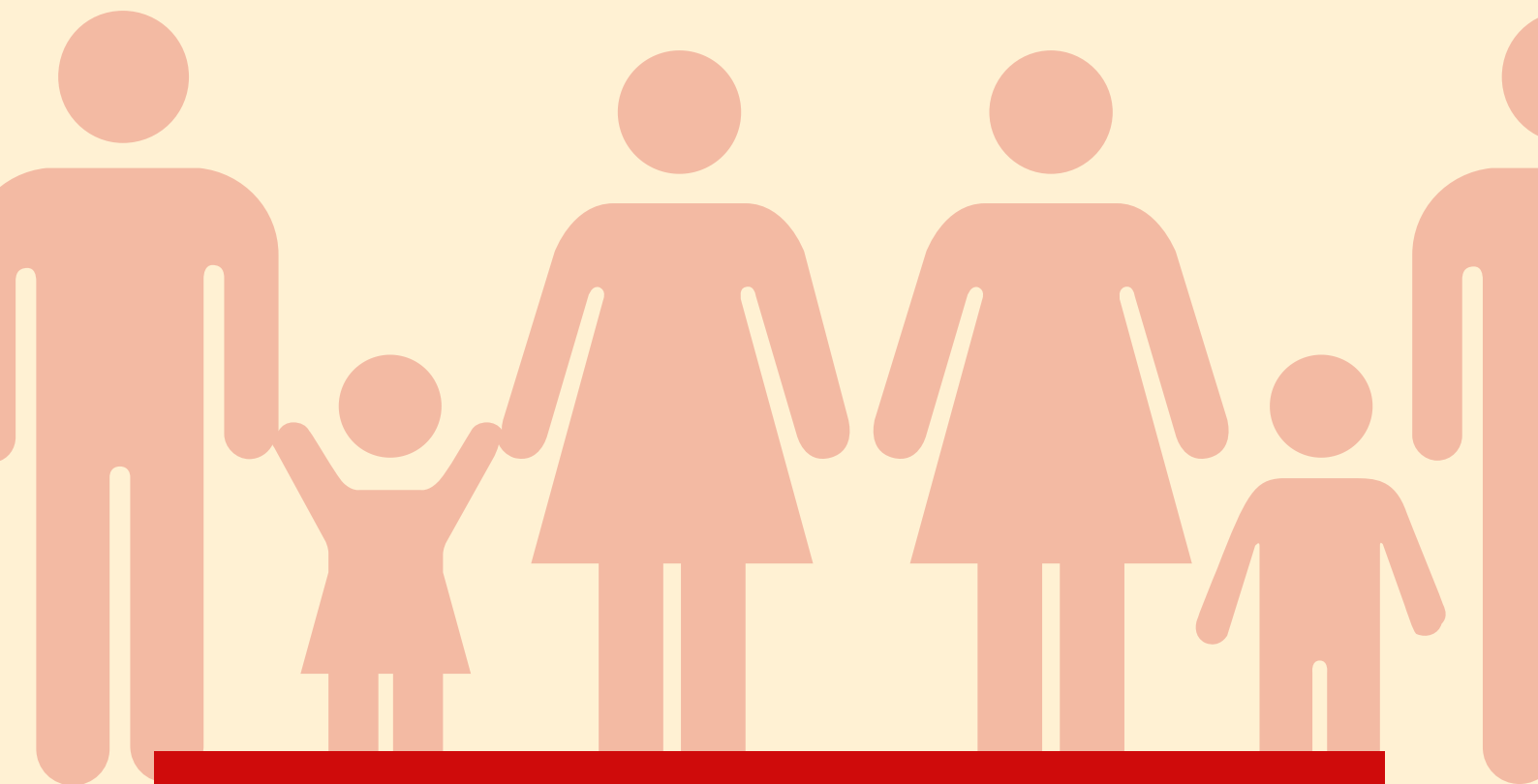
BAB 6 *ROAD MAP*

- 6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
- 6.3. Pembangunan Keluarga
- 6.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
- 6.5. Penataan Administrasi Kependudukan

BAB 6 PENUTUP

BAB 2

ANALISIS SITUASI & CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



Perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi Covid 19 memunculkan tantangan dan peluang baru dalam pembangunan kependudukan di Kutai Kartanegara. Beberapa isu-isu utama yaitu bonus demografi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), revolusi industri 4,0, dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan analisis situasi internal pembangunan kependudukan Kutai Kartanegara untuk mengidentifikasi kekuatan utama dan kelemahan, serta situasi eksternal untuk memetakan peluang dan tantangan yang ada sesuai tuntutan perubahan yang berkembang dari lingkungan. Hasil analisis dilakukan terhadap lima pilar pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan ekonomi, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

2.1. Analisis Situasi

2.1.1. Situasi Internal

a. Kekuatan

- a) Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Kalimantan Timur dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jika jumlah yang besar didukung oleh kualitas maka akan menjadi modal dasar pembangunan untuk memanfaatkan jendela peluang bonus demografi yang sedang dialami.
- b) Angka ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*) mengalami trend penurunan dan periode lima tahun terakhir dan telah mencapai $<50\%$. Jika didukung kualitas SDM dan lapangan kerja, maka penduduk produktif/usia kerja Kutai Kartanegara dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c) Angka melek huruf yang tinggi. Angka Melek Huruf Kutai Kartanegara lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.
- d) Ketimpangan pembangunan yang rendah. Indeks Gini Ratio Kutai Kartanegara terendah di Kalimantan Timur.
- e) Sumber daya alam. Kutai Kartanegara tertinggi memiliki PDRB di Kaltim.
- f) Tingkat pengangguran terus mengalami penurunan, dan beberapa tahun terakhir lebih rendah dari capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kelemahan

- a) Distribusi penduduk yang tidak merata.

- b) *Total Fertility Rate (TFR)* masih >2%.
- c) Pernikahan dini masih tinggi.
- d) Peserta KB tidak aktif masih tinggi.
- e) Penduduk yang tidak menggunakan alat/cara KB masih tinggi.
- f) Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih dibawah rata-rata Kaltim.
- g) Tingkat partisipasi perempuan lebih rendah dari laki-laki.
- h) Angka Harapan Hidup masih rendah, dibawah rata-rata Kalimantan Timur.
- i) Angka Kematian Ibu mengalami trend peningkatan, dan tertinggi di Kaltim.
- j) Angka Kematian Bayi masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
- k) Angka Kematian Balita masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
- l) Belum semua penduduk memiliki akses air bersih dan sanitasi layak.
- m) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Kartanegara, meskipun memiliki trend peningkatan tetapi masih berada di bawah rata-rata Kaltim.
- n) Prevalensi Stunting tertinggi di Kaltim.
- o) Rata-rata lama sekolah masih lebih rendah dari rata-rata Kaltim.
- p) Persentase penduduk miskin (P0) masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
- q) Indeks keparahan kemiskinan (P2) masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
- r) Migrasi penduduk usia produktif lebih banyak yang keluar.

2.1.2. Situasi Eksternal

a. Peluang

- a) Bonus demografi. Kutai Kartanegara sedang mengalami bonus demografi dan diperkirakan puncaknya pada 2030.
- b) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
- c) Otonomi dan desentralisasi.
- d) Kutai Kartanegara kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk pembangunan kependudukan.

b. Tantangan

- a) Ketergantungan sumber-sumber pembiayaan pembangunan terhadap sumber daya alam tidak terbarukan (*unrenewable resoucess*) sangat tinggi (tahun 2022 sebesar 70.77%), sedangkan sektor pertanian yang menjadi

mata pencaharian sebagian besar penduduk masih kecil kontribusinya terhadap PDRB.

- b) Pertumbuhan ekonomi tidak linier dengan penurunan tingkat kemiskinan.
- c) Keterlibatan sektor swasta dalam isu-isu penanggulangan kemiskinan belum maksimal.
- d) Indikator-indikator global tentang pengukuran kinerja yang hanya berbasis prestasi *output* seringkali meminggirkan praktik lokal.
- e) Perkembangan teknologi informasi dan dunia teknologi memerlukan respon yang cepat (*disruptive innovation*) dalam pelayanan kependudukan. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya proses layanan publik yang terintegrasi melalui *one stop service (oss)* secara *online*. Hal ini belum dapat diantisipasi dengan cepat, komprehensif, dan terintegrasi baik dari sisi kebijakan, fasilitas, dan budaya birokrasi internal.
- f) Tantangan perubahan-perubahan nilai sebagai implikasi dari masifnya teknologi dan informasi memerlukan perubahan paradigma dalam pelayanan kependudukan.
- g) Bentang geografis Kutai Kartanegara yang luas menuntut inovasi-inovasi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
- h) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022. Sebagian wilayah IKN mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan IKN mengakibatkan lonjakan penduduk. Berkaca dari pengalaman Jakarta. Pemerintah Hindia Belanda merancang kota Jakarta hanya untuk penduduk berjumlah sekitar 600.000 orang. Pada 1980, jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 6.503.227 orang atau sekitar 11 kali lipat dibandingkan rancangan awal pemerintah Hindia Belanda (Sedyawati., dkk, 1987). Pengalaman lain, pemindahan ibukota Kazakhstan, rencananya ditargetkan 300.000 orang tetapi melonjak menjadi 1 juta orang (Ryan, 2022). Berdasarkan rencana induk Bappenas, IKN yang baru, akan ditempati sekitar 1,7 hingga 1,9 juta penduduk. Keberadaan IKN baru akan menjadi daya tarik tersendiri terhadap migrasi penduduk ke Kutai Kartanegara. Migrasi ini dapat berdampak terhadap kualitas hidup, masalah keruangan, dan daya dukung lingkungan.

2.2. Capaian Pembangunan Kependudukan

2.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 153 Tahun 2014 Pasal 5 menyebutkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk, pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kondisi kekinian pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas di Kutai Kartanegara akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Pengaturan Fertilitas

1) Jumlah, Rasio, Persen, Kepadatan, Perkembangan, dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk penduduk Kutai Kartanegara tahun 2023, jumlah penduduk Kutai Kartanegara sebanyak 788.113 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan: sebesar 0,0129% per tahun. Secara keseluruhan, sebagian besar kecamatan di Kutai Kartanegara menunjukkan laju pertumbuhan positif meskipun ada beberapa kecamatan dengan pertumbuhan yang lebih rendah, bahkan ada yang mengalami penurunan seperti Muara Muntai (-0,0045% per tahun). Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah Tabang dengan 0,0325% per tahun.

Tenggarong merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Kartanegara, menyumbang 14,47% dari total penduduk kabupaten ini. Muara Wis memiliki persentase penduduk yang paling rendah, hanya sekitar 1,23% dari total penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan tingkat kepadatan, Tenggarong juga mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi, dengan sekitar 286 orang per kilometer persegi, menunjukkan wilayah ini cukup padat dibandingkan kecamatan lainnya. Tabang memiliki kepadatan penduduk terendah, hanya 2 orang per kilometer persegi, yang menunjukkan wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah dibandingkan luas wilayahnya.

Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami ketimpangan distribusi penduduk. Hal ini terlihat dari konsentrasi penduduk yang tinggi di kecamatan-kecamatan pusat seperti Tenggarong, sementara kecamatan yang lebih terpencil atau kurang berkembang (seperti Tabang, Muara Wis, dan Kenohan) memiliki jumlah penduduk yang rendah dan kepadatan yang sangat rendah. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses terhadap fasilitas, peluang ekonomi, dan

geografi yang mempengaruhi distribusi penduduk. Dengan adanya perbedaan yang mencolok antara kecamatan-kecamatan pusat dan terpencil, serta ketidakmerataan dalam hal kepadatan dan persentase penduduk, maka kategori ketimpangan ini termasuk tinggi. Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi penduduk, dengan kecamatan-kecamatan pusat yang lebih padat dan kecamatan-kecamatan lain yang lebih jarang penduduknya.

Tabel 2. 1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Prosentase

Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut

Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

NO.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
1	Samboja	41.607	0,0142
2	Samboja Barat	31.513	0,0269
3	Muara Jawa	44.070	0,0026
4	Sanga-Sanga	20.969	0,0161
5	Loa Janan	76.051	0,0194
6	Loa Kulu	57.048	0,0098
7	Muara Muntai	21.234	-0,0045
8	Muara Wis	9.730	0,0152
9	Kota Bangun	23.839	0,0129
10	Kota Bangun Darat	14.468	0,0142
11	Tenggarong	114.039	0,0052
12	Sebulu	43.329	0,0061
13	Tenggarong Seberang	73.060	0,0102
14	Anggana	38.674	0,0172
15	Muara Badak	50.686	0,0181
16	Marang Kayu	29.244	0,0195
17	Muara Kaman	46.309	0,0159
18	Kenohan	12.346	0,0135
19	Kembang Janggut	26.620	0,0226
20	Tabang	13.277	0,0325

Kutai Kartanegara	788.113	0,0129
-------------------	---------	--------

Lanjutan Tabel 2.1.

NO.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Kelamin	Jenis
1	Samboja	5,28	40	1,09	
2	Samboja Barat	4,00	...	1,12	
3	Muara Jawa	5,59	58	1,07	
4	Sanga-Sanga	2,66	90	1,06	
5	Loa Janan	9,65	118	1,11	
6	Loa Kulu	7,24	41	1,09	
7	Muara Muntai	2,69	23	1,09	
8	Muara Wis	1,23	9	1,14	
9	Kota Bangun	3,02	21	1,05	
10	Kota Bangun Darat	1,84	...	1,07	
11	Tenggarong	14,47	286	1,05	
12	Sebulu	5,50	50	1,11	
13	Tenggarong Seberang	9,27	167	1,08	
14	Anggana	4,91	21	1,10	
15	Muara Badak	6,43	54	1,08	
16	Marang Kayu	3,71	25	1,07	
17	Muara Kaman	5,88	14	1,14	
18	Kenohan	1,57	9	1,13	
19	Kembang Janggut	3,38	14	1,11	
20	Tabang	1,68	2	1,13	
	Kutai Kartanegara	100	29	1,09	

Sumber: (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023)

Jika dibandingkan kabupaten/kota di Kaltim, Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Samarinda.

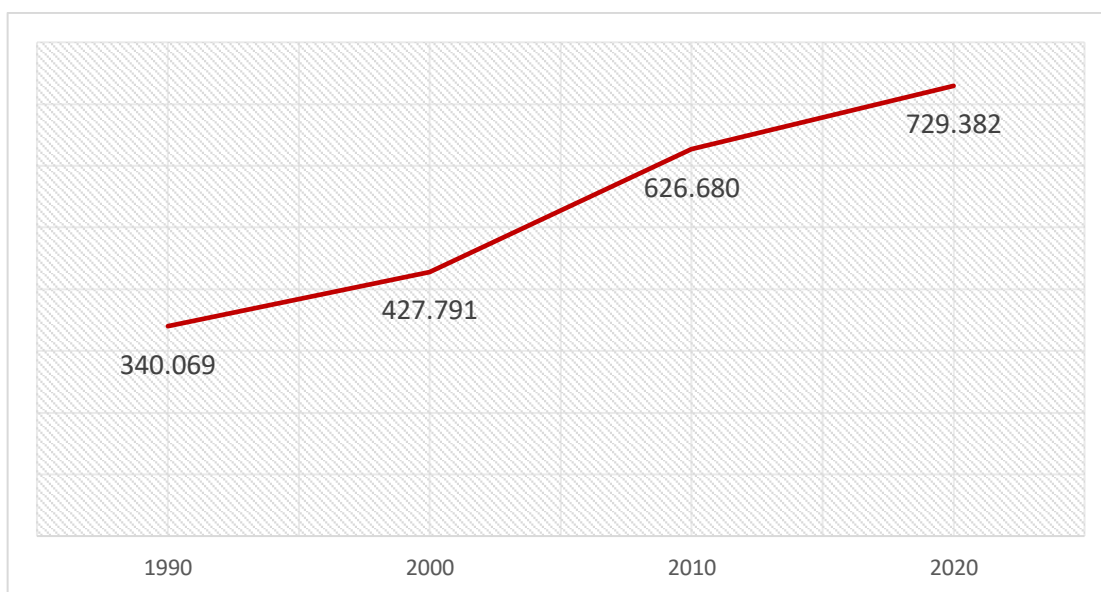
Gambar 2. 1. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)
Paser	284,11
Kutai Barat	177,13
Kutai Kartanegara	756,79
Kutai Timur	455,50
Berau	258,29
Penajam Paser Utara	197,63
Mahakam Ulu	33,77
Balikpapan	710,04
<i>Samarinda</i>	850,63
Bontang	185,85
Kalimantan Timur	3.909,74

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990-2020, jumlah penduduk di Kutai Kartanegara mengalami trend pertambahan. Sensus tahun 1990 mencatat jumlah penduduk Kutai Kartanegara sebanyak 340,069 jiwa, Sensus 2020 mencatat jumlah penduduk menjadi 729,382 jiwa.

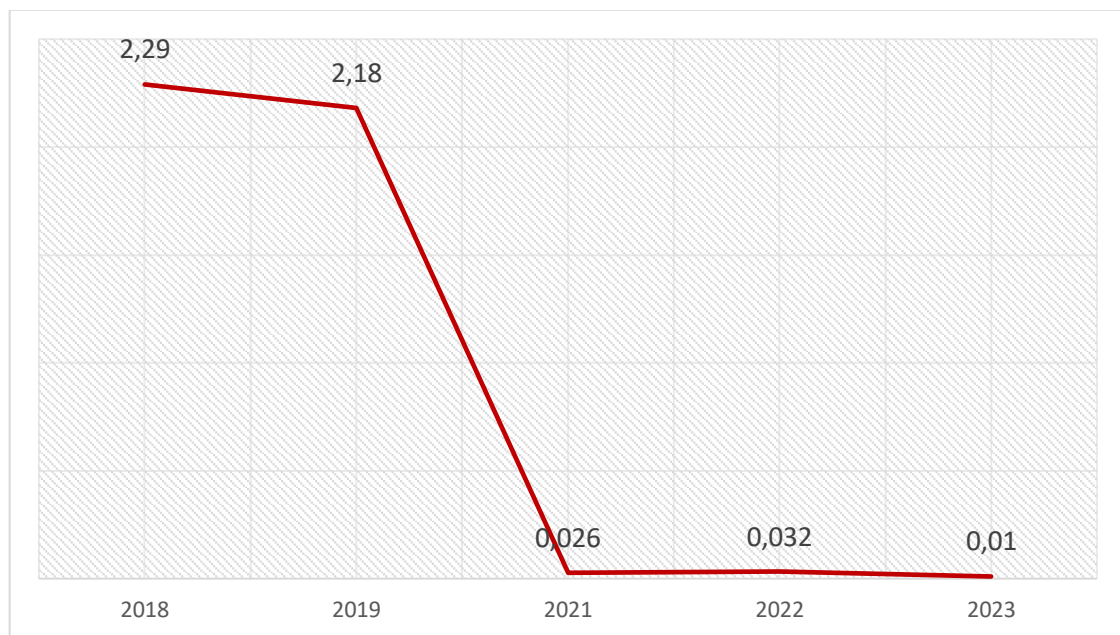
Gambar 2. 2. Penduduk Hasil Sensus Kabupaten Kutai Kartanegara, 1990-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Namun dari sisi pertumbuhan, selama kurun waktu 2015-2019 pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa usaha mengendalikan kuantitas penduduk melalui Program KB telah membuahkan hasil. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan sebesar 2,48% Laju pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebesar 2,29%, turun pada tahun 2019 menjadi 2,18%.

Gambar 2. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

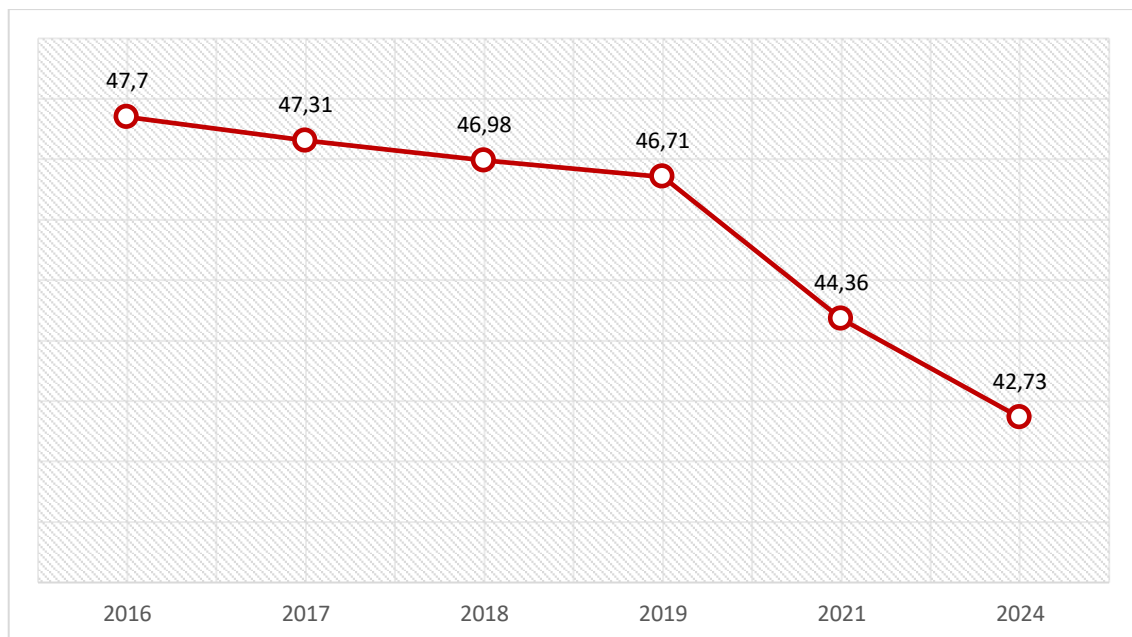
2) Angka Beban Ketergantungan

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. ABK adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk produktif/angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 ABK Kutai Kartanegara sebesar 44,36%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai

tanggungan sebanyak 44,36 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ketergantungan Kutai Kartanegara memiliki trend menurun. Kutai Kartanegara sedang mengalami periode bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif (ABK <50).

Gambar 2. 4. Angka Beban Ketergantungan Kutai Kartanegara, 2016-2024

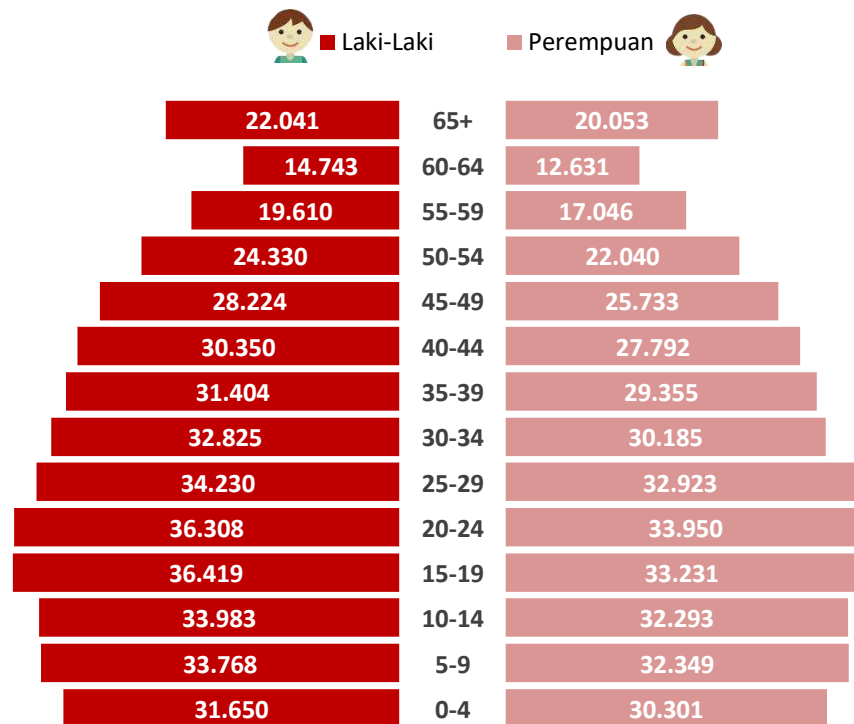


Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.

3) Piramida Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada gambar 2.5 menunjukkan penduduk paling banyak pada usia produktif yaitu 15-64 tahun. Peningkatan ini merupakan dampak pemindahan penduduk ke IKN, sehingga piramida penduduk Kutai Kartanegara dimana proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (65 tahun ke atas). Terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 42,73 persen, artinya terdapat 42 sampai dengan 43 penduduk berusia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang ditanggung oleh 100 orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun).

Gambar 2. 5. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Piramida penduduk Kutai Kartanegara pada Gambar 2.4. diatas berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kutai Kartanegara termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

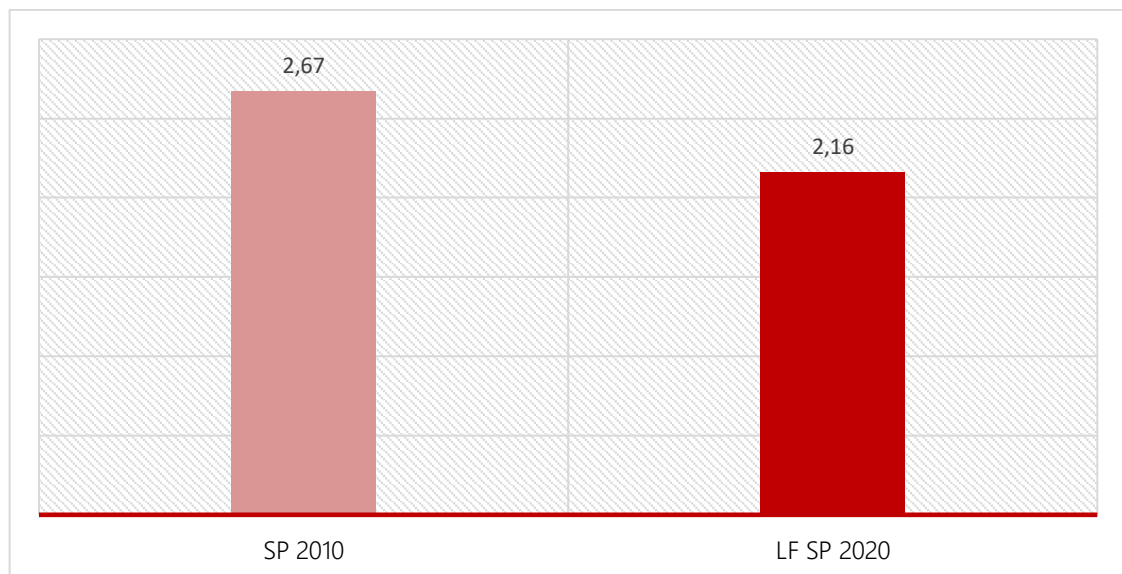
4) Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas adalah angka kelahiran total (*Total fertility Rate = TFR*) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Fertilitas Kabupaten Kutai Kartanegara menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,67 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR Kutai Kartanegara sebesar 2,16 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,16. Angka ini semakin mendekati tingkat *Replacement Level* (2,1), artinya setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi.

Gambar 2. 6. Angka TFR Kutai Kartanegara, SP 2010 dan LF SP 2020



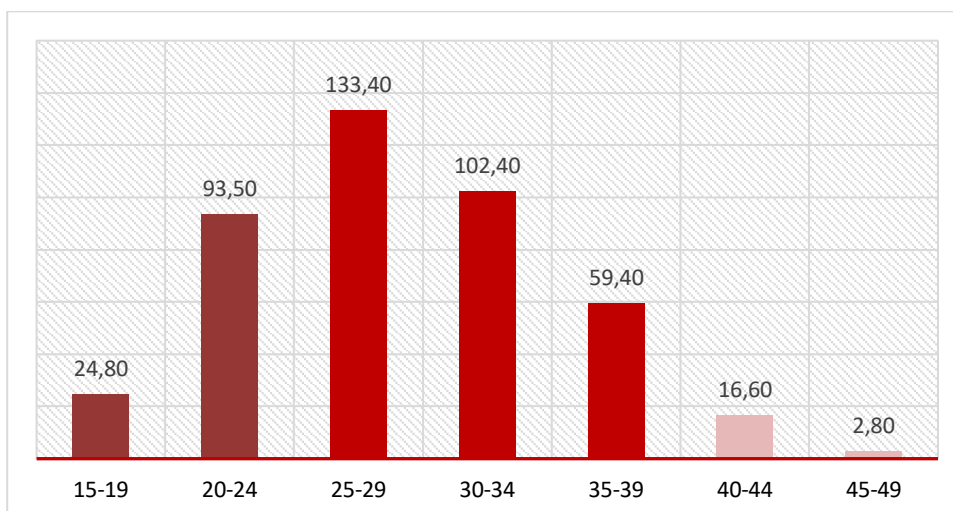
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023.

Sedangkan angka ASFR Kutai Kartanegara pada tahun 2020 tertinggi terjadi pada wanita dengan kelompok umur 25-29 tahun. Terdapat 133-134 kelahiran hidup per 1000 perempuan pada kelompok usia tersebut.

Pola ASFR Kutai Kartanegara berbentuk U terbalik. Hal ini berarti bahwa angka kelahiran di Kutai Kartanegara sebesar 24 kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun. Meningkat tajam menjadi 93 kelahiran per 1000 perempuan umur 20-24 tahun, kemudian mencapai puncaknya pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 2 kelahiran per 1000 perempuan umur 45-49 tahun.

Jika dilihat berdasarkan generasi, kelahiran didominasi oleh perempuan generasi millennial, diikuti kelahiran dari perempuan generasi Z, dan terendah dari generasi X.

Gambar 2. 7. Angka ASFR Kutai Kartanegara, 2020.



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2023.

- Ket:
- Umur 15-19 & 20-24 = Generasi Z
 - Umur 25-29, 30-34, & 35-39 = Generasi milenial
 - Umur 40-44 & 45-49 = Generasi X

b) Pengaturan Fertilitas Melalui Program Keluarga Berencana

Merujuk Pasal 5 ayat (2), Peraturan Presiden RI No. 153 Tahun 2014, bahwa pengaturan fertilitas dilakukan melalui program keluarga berencana (KB). Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa program KB meliputi: (1) Pendewasaan usia perkawinan; (2) pengaturan kehamilan yang diinginkan; (3) pembinaan kesertaan keluarga berencana; (4) peningkatan kesejahteraan keluarga; (5) penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; (6) peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan (7) peningkatan pendidikan dan peran wanita.

1) Pendewasaan Usia Perkawinan

Usia perkawinan pertama erat kaitannya dengan fertilitas. Usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, yang salah satu poinnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya, hingga tahun 2024 perempuan berumur di bawah 19 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terbilang tinggi, berada di kisaran 50,8 persen dari total keseluruhan, mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021 sebanyak 41,46 persen.

Padahal, perempuan yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat hamil dan melahirkan, sehingga dapat berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak.

Tabel 2. 2. Perkembangan Proporsi Penduduk Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016-2020

Usia Perkawinan Pertama	2021	2024
< 19	41,46	50,8
19+	58,54	49,2

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.

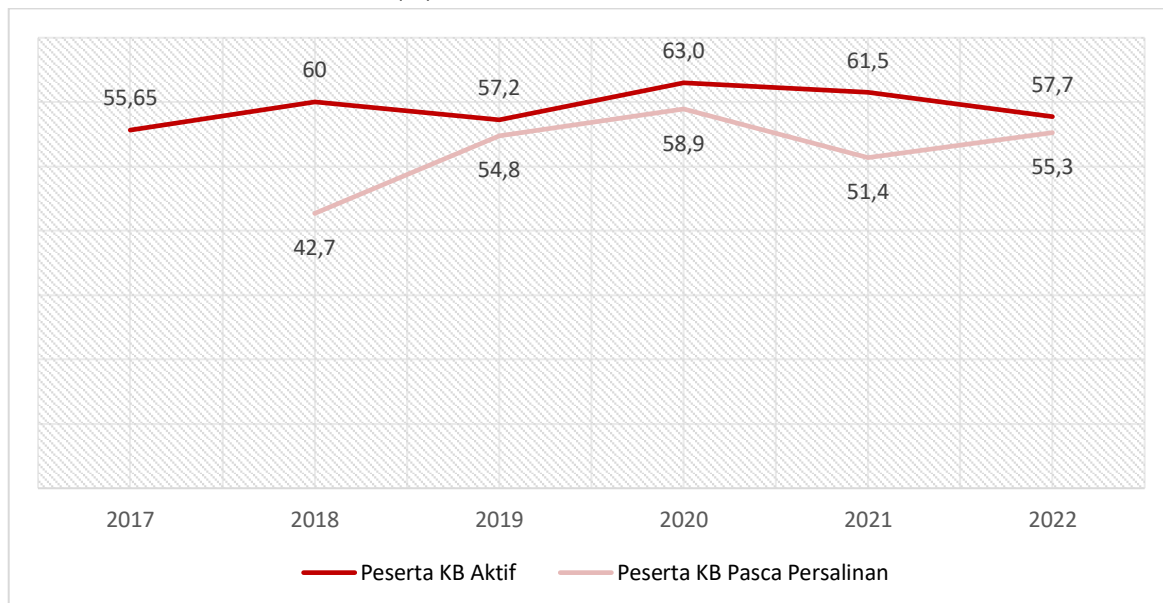
2) Pembinaan Kesertaan Keluarga

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk menghindari empat risiko, yakni terlalu muda, terlalu rapat, terlalu banyak, dan terlalu tua saat melahirkan. Pembinaan kesertaan keluarga ber-KB dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PUS tentang pentingnya untuk ber-KB serta merencanakan periode memiliki anak, memperhatikan jarak antar kelahiran dan waktu yang tepat berhenti memiliki anak.

Secara keseluruhan, terdapat fluktuasi pada jumlah peserta KB aktif antara tahun 2017 hingga 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 (60,00) dibandingkan tahun 2017 (55,65), namun jumlah peserta KB aktif mengalami penurunan pada tahun 2019 (57,20). Tahun 2020 menunjukkan angka tertinggi (63,00) dalam enam tahun terakhir, tetapi setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2021 (61,50) dan 2022 (57,70), meskipun tetap berada dalam kisaran yang relatif stabil antara 57 hingga 63 ribu peserta. Tren keseluruhan menunjukkan adanya variasi, namun jumlah peserta KB aktif pada 2022 sedikit menurun dibandingkan 2020 dan 2021.

Sedangkan jumlah peserta KB pasca persalinan, pada 2018 tercatat sebanyak 42,7 ribu orang. Angka ini meningkat secara signifikan pada 2019 menjadi 54,8 ribu orang, dan terus meningkat pada 2020 (58,9 ribu), mencapai angka tertinggi dalam rentang waktu ini. Namun, pada 2021, jumlah peserta KB pasca persalinan menurun menjadi 51,4 ribu, sebelum akhirnya membaik kembali pada 2022 menjadi 55,3 ribu orang. Tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang relatif stabil hingga 2020, meskipun ada penurunan pada 2021, namun pada 2022 kembali mendekati angka tertinggi.

Gambar 2. 8. Perkembangan Peserta KB Aktif (%) dan Peserta KB Pasca Persalinan (%), 2017-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

3) Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan

Penggunaan alat kontrasepsi KB menjadi salah satu indikator kependudukan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penggunaan alat kontrasepsi KB diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan angka kematian ibu. Berdasarkan data Susenas tahun 2022, perempuan berusia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 57,64 persen sedang menggunakan alat KB/cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan. Sementara persentase perempuan yang tidak menggunakan alat KB sebanyak 34,19 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, penggunaan alat KB/cara tradisional mengalami peningkatan persentase dari 52,54 persen menjadi 57,64 persen.

Tingginya persentase penggunaan alat KB/cara tradisional ini menggambarkan bahwa semakin tingginya perhatian penduduk terhadap penundaan atau pencegahan kehamilan dan ikut serta mendukung program keluarga berencana.

Tabel 2. 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022.

Status Penggunaan	2020	2021	2022
Pernah Menggunakan	11,3	15,72	8,17

Sedang Menggunakan	62,2	52,54	57,64
Tidak Menggunakan	26,5	31,73	34,19

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

4) Peningkatan Pendidikan dan Peran Wanita

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama mengukur peningkatan pendidikan dan peran wanita dalam pembangunan atau pembangunan gender.

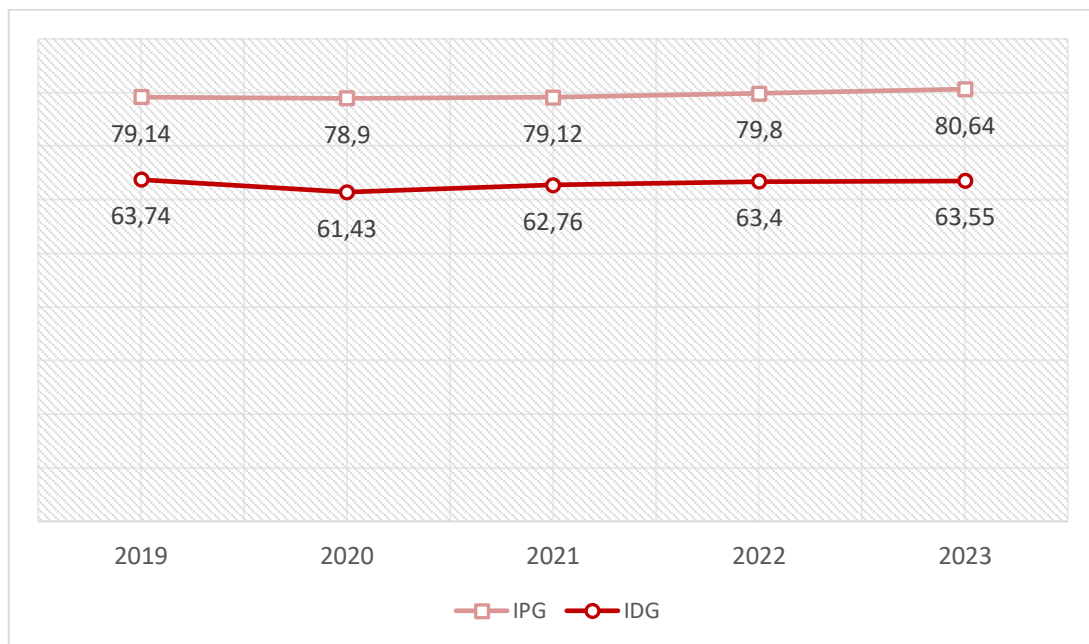
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan bertahap setiap tahunnya. Peningkatan yang konsisten terjadi dari 78,54 pada 2017 menjadi 80,64 pada 2023, mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di daerah ini. Meskipun ada sedikit fluktuasi pada tahun 2020 (78,90) dan tahun 2021 (79,12), angka IPG terus menunjukkan kecenderungan positif sepanjang periode 2017–2023. Peningkatan tertinggi terjadi antara 2022 (79,80) dan 2023 (80,64), menunjukkan perkembangan yang stabil dalam hal kesetaraan gender di berbagai sektor. Meskipun demikian, IPG Kutai Kartanegara 2022 masih lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 86,61.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan kenaikan yang lebih signifikan dibandingkan dengan IPG. Pada tahun 2017, angka IDG masih terbilang rendah (55,07), namun ada kenaikan tajam pada tahun 2019 (63,74), yang menjadi titik perubahan besar dalam pemberdayaan gender di Kutai Kartanegara. Setelah lonjakan pada 2019, angka IDG sedikit menurun pada 2020 (61,43) tetapi kembali meningkat pada 2021 (62,76), 2022 (63,40), dan 2023 (63,55), meskipun dengan laju yang lebih lambat. Secara keseluruhan, IDG menunjukkan tren positif, meskipun laju kenaikan cenderung lebih lambat setelah tahun 2019. IDG Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 63,55 persen masih lebih rendah dibanding dengan IDG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 68,96.

Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan perbaikan konsisten dalam kesetaraan gender dari tahun 2017 hingga 2023, dengan peningkatan bertahap setiap tahunnya, mencerminkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan

gender di berbagai aspek kehidupan. Peningkatan IPG dan IDG meskipun masih lebih rendah dari capaian Provinsi Kaltim, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menjadi fokus dalam pembangunan daerah ini.

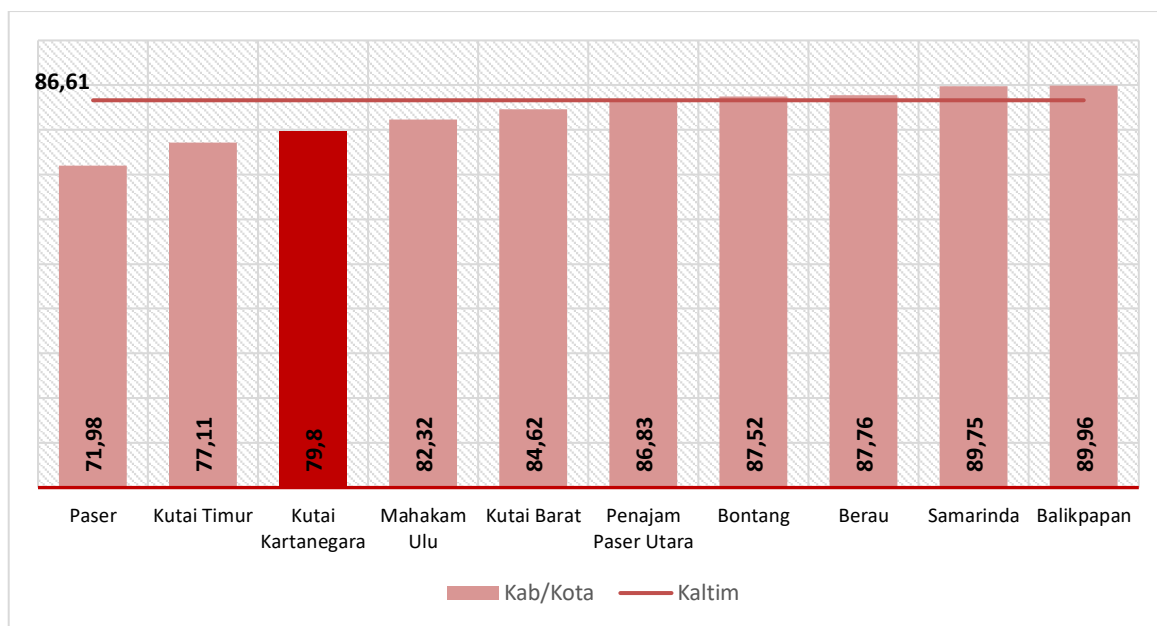
Gambar 2. 9. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kutai Kartanegara, 2016-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023

Meskipun dari perkembangan menunjukkan trend positif, namun dilihat dari posisinya terhadap provinsi dan kabupaten/kota, IPG Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebesar 79.8% masih jauh di bawah rata-rata Kaltim, 86.61%. Sedangkan jika dibanding dengan kab/kota, IPG Kutai Kartanegara berada di peringkat ketujuh dari sepuluh kab/kota.

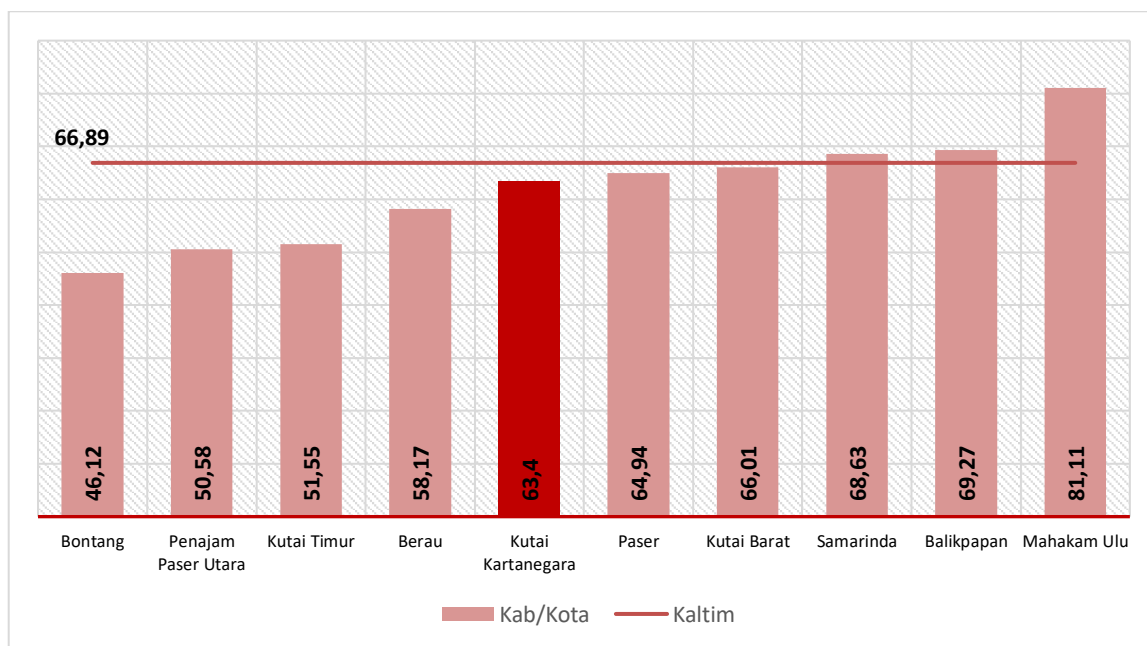
Gambar 2. 10. Posisi IPG Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota dan Kalimantan Timur, 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022.

Demikian halnya dengan posisi relatif IDG Kutai Kartanegara. Pada tahun 2022, IDG Kutai Kartanegara sebesar 63,4%, masih dibawah rata-rata Provinsi, 66,89%, dan peringkat keenam dari sepuluh kab/kota.

Gambar 2. 11. Posisi IDG Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota dan Kalimantan Timur, 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022.

c) Penurunan Mortalitas

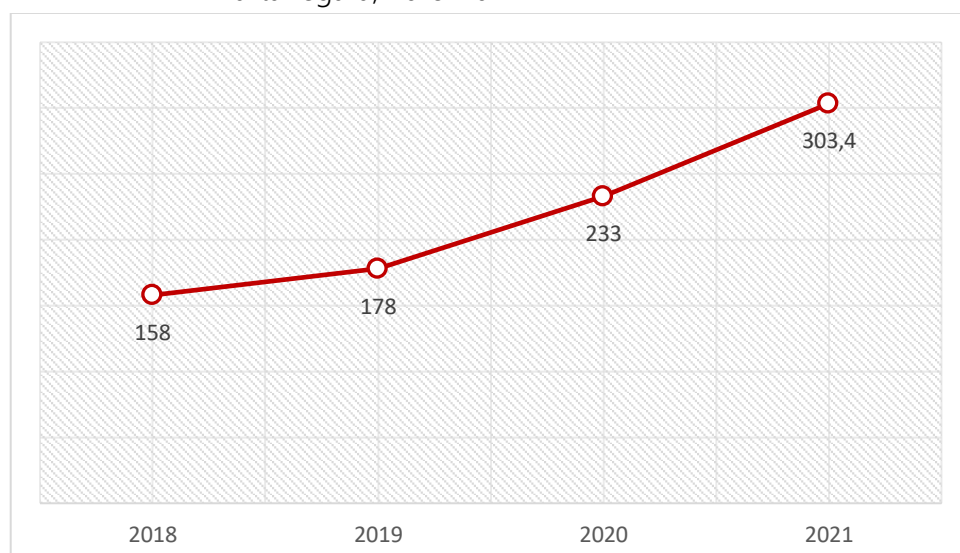
Perpres No. 153 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa penurunan mortalitas dilakukan melalui: (1) penurunan angka kematian ibu hamil; (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan; (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan (4) penurunan angka kematian bayi dan anak. Kondisi kekinian indikator tersebut di Kutai Kartanegara sebagai berikut.

1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI)/*Maternal Mortality Ratio (MMR)* adalah perempuan pada saat hamil, saat melahirkan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti terjatuh, kecelakaan, dll.), per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021), selama periode 2018-2021, AKI Kutai Kartanegara mengalami trend negatif, dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 24,6%. AKI Kutai Kartanegara masih jauh dari target SDGs yaitu 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada 2030. Pemerintah Kutai Kartanegara perlu kerja ekstra untuk mencapai target tersebut.

Gambar 2. 12. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kutai Kartanegara, 2018-2021



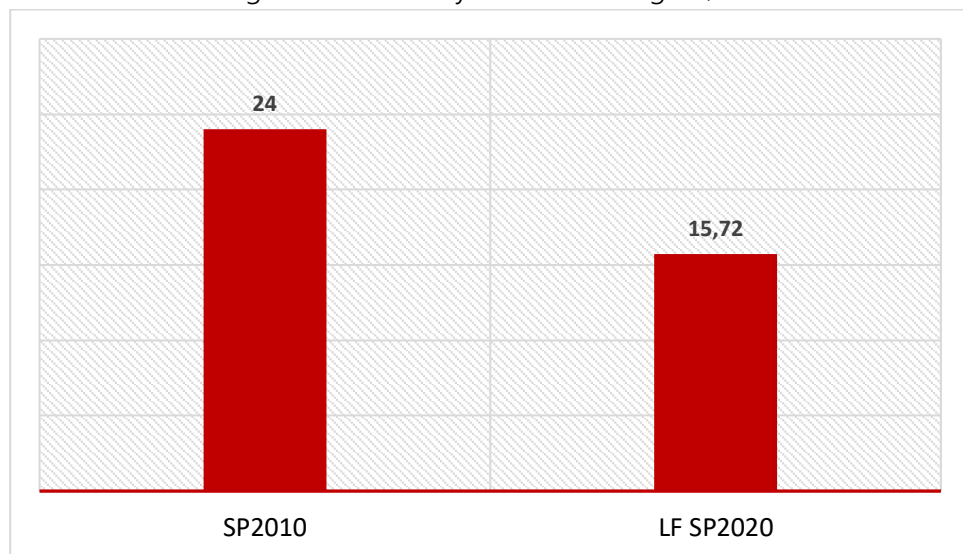
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021.

2) Angka Kematian Bayi, Balita, dan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun dari 24 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 15,72 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Angka tersebut masih jauh dari target SDGs, 12 per 1000 KH.

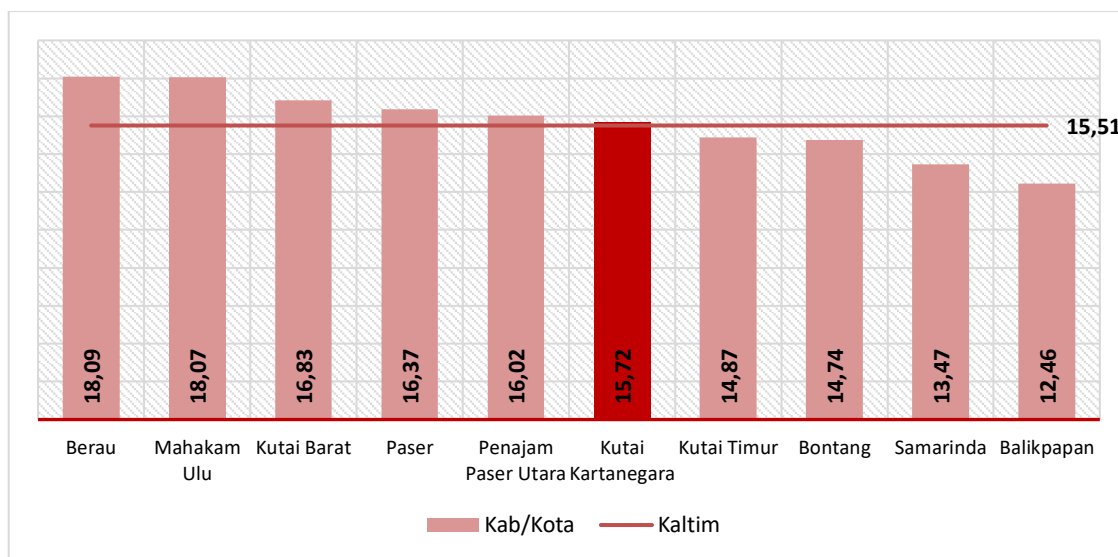
Gambar 2. 13. Angka Kematian Bayi Kutai Kartanegara, SP2010 & LF SP2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023.

AKB Kutai Kartanegara hasil LF SP tersebut lebih tinggi dari AKB Provinsi Kalimantan Timur (15,51%).

Gambar 2. 14. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota, 2020.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023.

Angka kematian anak adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berusia 1-4 tahun. Berdasarkan data LF SP2020, Angka Kematian Anak di Kutai Kartanegara sebesar 2,6%. Hal ini berarti, terdapat 2-3 kematian anak berusia 1-4 tahun di Kutai Kartanegara selama satu tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari Angka Kematian Anak Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,53%.

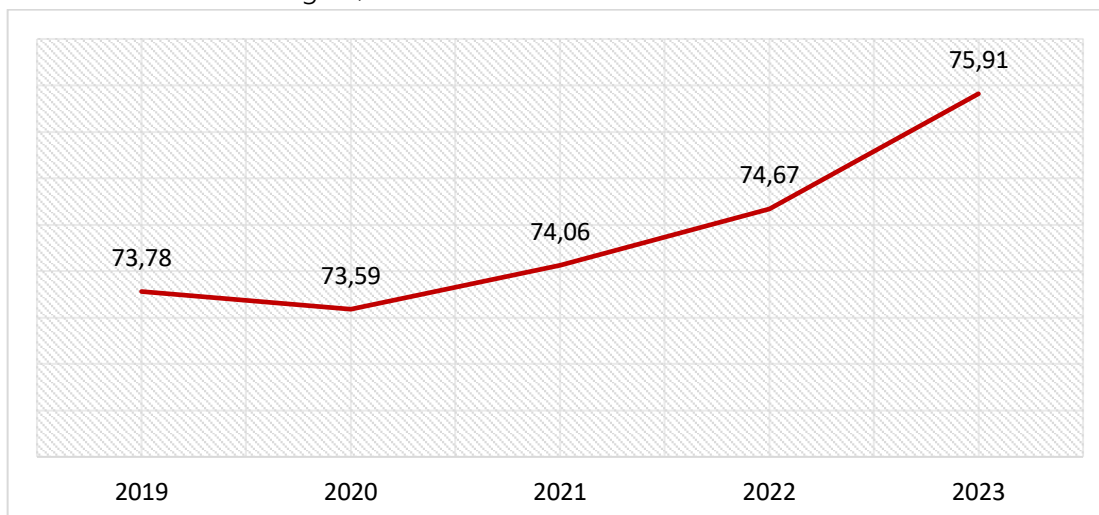
Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBa) Kutai Kartanegara berdasarkan LF SP2020 sebesar 18,33%. Artinya, setiap 1000 balita di Kutai Kartanegara, 18-19 diantaranya tidak berhasil mencapai umur tepat lima tahun. Angka AKBa Kutai Kartanegara tersebut lebih tinggi dari angka AKBa Provinsi Kalimantan Timur sebesar 18,04%. Berdasarkan data tersebut, maka capaian AKBa Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan target tujuan SDGs yaitu sebesar 25 per 1000 balita.

2.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Merujuk Perpres No. 153 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat (1) bahwa peningkatan kualitas penduduk di fokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Perkembangan IPM Kutai Kartanegara mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara efektif meningkatkan IPM.

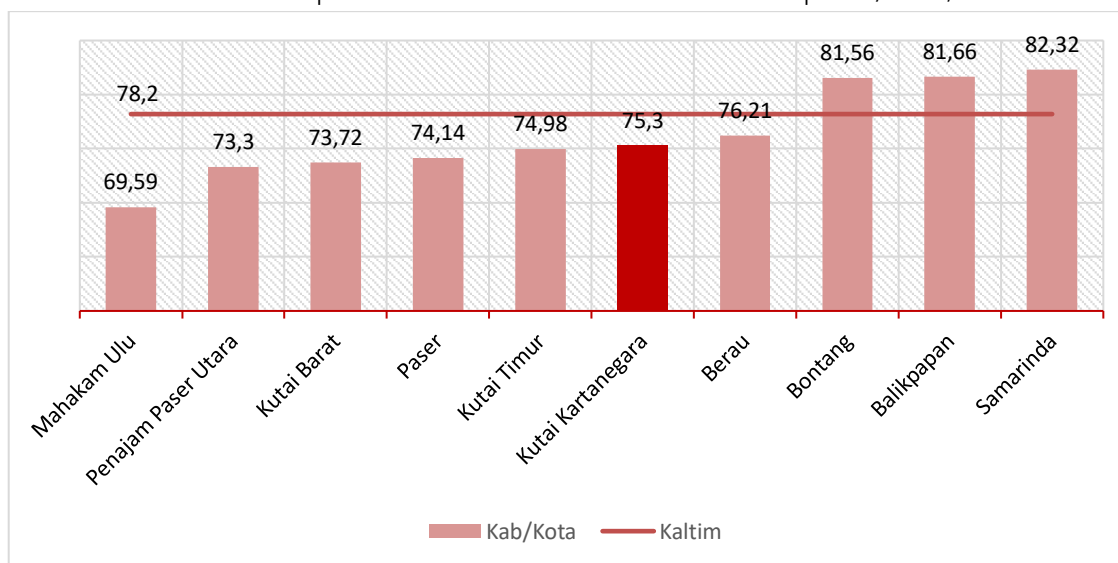
Gambar 2. 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur. Data diolah.
<https://kaltim.bps.go.id/indicator/26/83/4/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-.html>

Namun dilihat dari posisinya terhadap provinsi dan kabupaten/kota, pada tahun 2022, IPM Kutai Kartanegara sebesar 74,67, di bawah Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat lima antara kabupaten/kota.

Gambar 2. 16. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, 2023

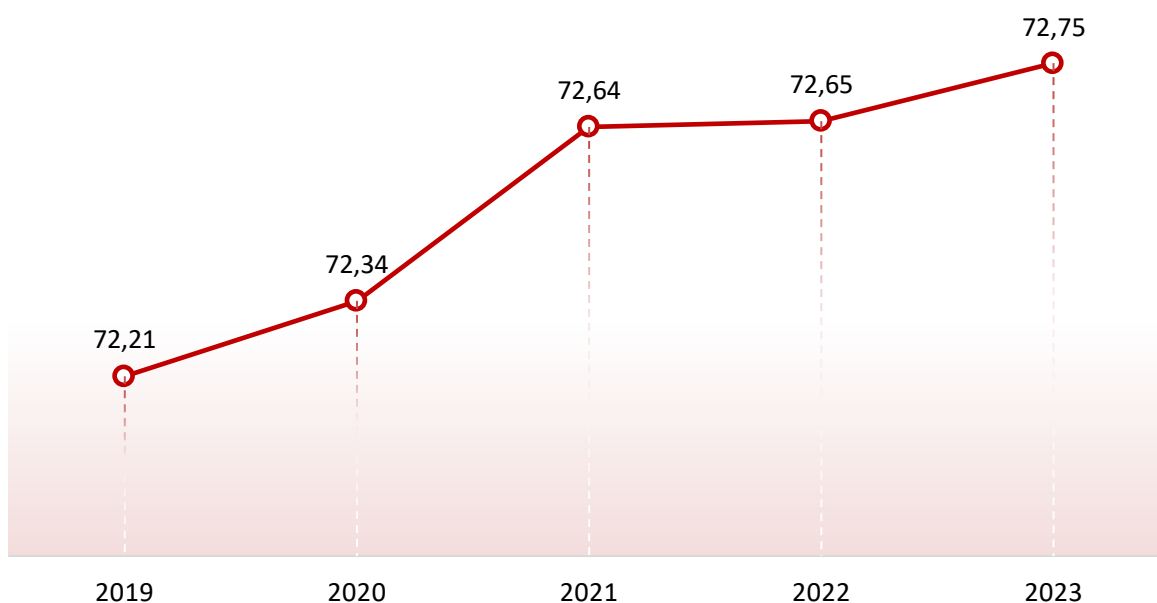


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

a. Kesehatan

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan. UHH di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kenaikan yang stabil dari 2019 hingga 2023. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021 (+0,30). Kenaikan terendah terjadi antara tahun 2021 dan 2022 (+0,01), yang menunjukkan bahwa pertumbuhannya agak melambat pada tahun 2022. UHH di Kutai Kartanegara terus meningkat, meskipun laju kenaikannya tidak sama setiap tahun. Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang sangat kecil, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, atau kesehatan yang mempengaruhi angka tersebut. Dengan informasi ini, UHH di Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif, meskipun ada fluktuasi kecil dalam laju peningkatannya pada tahun-tahun tertentu.

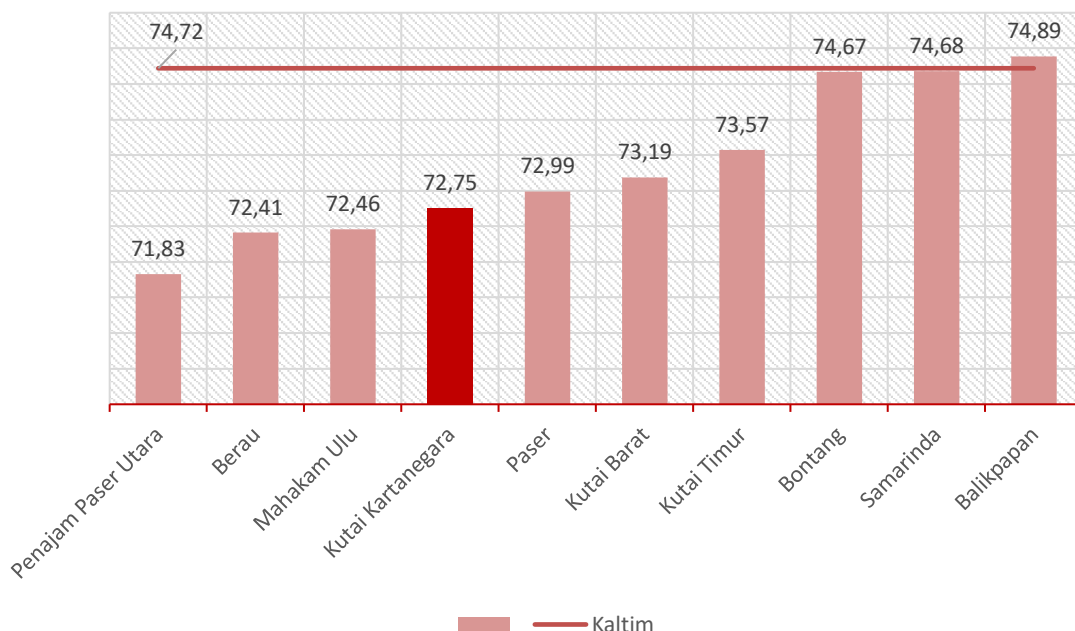
Gambar 2. 17. Umur Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Dilihat dari posisi relatif, UHH Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebesar 72,75 tahun masih lebih rendah dari rata-rata UHH Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencapai 74,72 tahun. Diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, UHH Kutai Kartanegara berada pada urutan ketujuh.

Gambar 2. 18. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur, 2023



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024.

Peningkatan UHH dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti prevalensi stunting, resiko kematian ibu, resiko kematian bayi, akses air bersih, sanitasi, sarana dan prasarana kesehatan. Sejalan dengan indikator IPM tersebut, Pasal 6 Perpres No. 153 Tahun 2014 menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dibidang kesehatan dilakukan melalui:

- penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
- peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Kebijakan peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH sendiri terkait erat dengan Prevalensi Stunting, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa), dan Angka Kematian Ibu (AKI).

1) Penurunan Kematian

Kedadaan mortalitas saat ini di Kutai Kartanegara seperti digambarkan di atas terkait erat dengan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dan peran pemerintah-swasta memberdayakan masyarakat (Perpres No. 153 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (2) huruf a.). Kondisi kekinian capaian indikator cakupan dan kualitas layanan kesehatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan swasta digambarkan sebagai berikut.

Pertama, sumber daya manusia kesehatan. Merujuk Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004, kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 12/100.000 penduduk, dokter umum adalah 48/100.000 penduduk, dan dokter gigi adalah 11/100.000 penduduk, perawat 158/100.000 penduduk, bidan 75/100.000 penduduk. Rasio dokter (spesialis dan umum) di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, rasio dokter di Kutai Kartanegara 27/100.000 penduduk, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, 9/100.000 penduduk. Rasio bidan dan perawat mengalami penurunan. Pada tahun 2022, rasio bidan sebesar 85/100.000 penduduk, lebih rendah dibanding tahun 2021, sebesar 91/100.000 penduduk. Rasio perawat pada tahun 2022 sebesar 157/100.000 penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya, 165/100.000 penduduk.

Tabel 2. 4. Perkembangan sumber daya manusia kesehatan Kutai Kartanegara, 2018-2022

SDM Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Dokter per 100.000 penduduk	7	9	12	9	27
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	92	82	92	91	85
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	142	135	167	165	157

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Kedua, pelayanan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (*UKBM*). Jumlah Posyandu di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 766, pada tahun 2022 menjadi 801. Sedangkan rasio posyandu terhadap balita Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebesar 1,3 per 100 balita lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 1 per 100 balita. Artinya, pada tahun 2022 setiap posyandu melayani sekitar 130 balita, lebih banyak dibanding pada tahun 2008 sebanyak 100 balita. Rasio tersebut sebenarnya lebih tinggi dari rasio ideal Kementerian Kesehatan yaitu adalah 1:1.000. Karena itu, tantangannya adalah meningkatkan persentase posyandu yang aktif karena angkanya masih rendah. Pada tahun 2022 baru mencapai 49.1%.

Tabel 2. 5. Perkembangan Pelayanan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kutai Kartanegara, 2018-2022

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pos Yandu	766	769	782	792	801
Persentase Posyandu Aktif	35.4	35.8	n.a.	n.a.	49.1
Rasio Posyandu per 100 Balita	1	1	1.4	1.3	1.3
Pos Bindu PTM	141	204	204	282	291.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Ketiga, pelayanan kesehatan ibu. Dari sejumlah indikator pelayanan kesehatan ibu (Tabel 2.8.), persentase ibu hamil dengan imunisasi Td2+ yang masih rendah. Pada tahun 2020, persentase ibu hamil dengan imunisasi Td2+ baru mencapai 24,9%.

Tabel 2. 6. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Kutai Kartanegara, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	93.0	114.6	123.0	105.9	108.5
Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	73.6	90.1	95.2	84.4	92.0
Persentase Ibu hamil dengan imunisasi Td2+	26.9	37.9	24.2	17.1	24.9
Persentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90	70.4	88.3	97.6	88.1	93.3
Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	77.8	96.6	108.1	96.5	n.a.
Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	72.7	91.1	103.7	93	94.5
Persentase Pelayanan Ibu Nifas KF3	71.6	88.4	100.2	91.7	90.1
Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	78.1	100	107.6	106.7	93.2
Persentase Penanganan komplikasi kebidanan	85.9	117.4	142.0	125.7	114.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Keempat, pelayanan kesehatan anak. Dari data perkembangan indikator pelayanan kesehatan anak periode 2018-2022, persentase balita ditimbang masih rendah. Pada tahun 2022 baru mencapai 41,7% lebih rendah dibanding pada tahun 2018, sebesar 47.7%. Belum semua bayi di Kutai Kartanegara mendapat imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2022 baru mencakup 81.8%. Indikator yang mengalami penurunan, adalah persentase bayi dan balita mendapatkan vitamin A. Pada tahun 2022, bayi yang

mendapatkan vitamin A sebanyak 80.1%, menurun dibanding tahun 2018, sebanyak 88.8%. Balita mendapatkan vitamin A pada tahun 2022 sebanyak 80.2%, menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 82.9%.

Tabel 2. 7. Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Anak Kutai Kartanegara, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan komplikasi neonatal	64.9	67.1	64.4	76.9	n.a.
Persentase Bayi yang diberi ASI Eksklusif	65.1	58.1	69.1	53.3	70.8
Persentase Pelayanan kesehatan bayi	82.5	108.2	104.1	76.9	93.7
Persentase Desa/Kelurahan UCI	78.5	82.3	72.6	63.7	74.3
Persentase Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi	79.6	98.4	99.2	81.7	83.7
Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	76.0	97.3	95.3	77	81.8
Persentase Bayi Mendapat Vitamin A	88.8	82.6	79.0	82.2	80.1
Persentase Anak Balita Mendapat Vitamin A	82.9	80.7	69.0	69.6	80.2
Persentase Pelayanan kesehatan balita/Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	49.6	60.7	48.2	59.1	84.4
Persentase Balita ditimbang (D/S)	47.7	47.3	30.1	34.5	41.7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Kelima, pengendalian penyakit menular langsung. Tabel 2.10 menggambarkan beberapa indikator pelayanan kesehatan pengendalian penyakit menular langsung yang mengalami kinerja penurunan. Angka kematian selama pengobatan tuberkulosis per 100.000 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, angkanya 5,3%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 sebesar 3,9%. Jumlah kasus HIV mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah kasus HIV sebanyak 62, kemudian pada tahun 2022 melonjak menjadi 158 kasus.

Tabel 2. 8. Perkembangan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kutai Kartanegara, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	na	100	53.6	86.67	138.4

CNR seluruh kasus TBC per 100.000 penduduk	140	147	102.0	103	na
<i>Case detection rate</i> TBC	83.75	52.12	57.1	68.23	86.9
Cakupan penemuan kasus TBC anak	36.29	27.08	26.8	24.72	52.7
Angka kesembuhan BTA+	85.1	74.7	78.5	36	52.6
Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	52.9	62.2	56.9	72.1	90.8
Angka keberhasilan pengobatan (<i>Success Rate</i>) semua kasus TBC	92.9	90.8	92.8	87.4	na
Angka kematian selama pengobatan tuberkulosis per 100.000	3.9	4.6	3.5	5.3	5.3
Persentase Penemuan penderita pneumonia pada balita	16.7	26.1	15.9	12.9	32.6
Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60%	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9
Jumlah Kasus HIV	62	71	116	114	158
Jumlah Kasus Baru AIDS	52	71	50.0	11	
Jumlah Kematian akibat AIDS	9	16	4	13	
Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada balita	47	36.5	20.3	16.2	27.8
Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur	57.6	51.7	28.8	21.1	27.8
Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	57	51	25.0	22	0.0
Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR) per 100.000 penduduk	7	6	3.6	3	4.0
Persentase Kasus Baru Kusta anak 0-14 Tahun	10.7	14	8.0	0	0.0
Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta	98.2	98.0	88.0	100	86.2
Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta	0	2.0	8.0	0	10.3
Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta per 100.000 penduduk	0	1.3	2.9	0	4.0

Angka Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4
Persentase Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	100	100.0	100.0	100	85.7
Persentase Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	77.8	86.5	84.0	84.1	90.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Keenam, pelayanan pengendalian penyakit yang dapat dicegah. Belum semua anak-anak <15 tahun di Kutai Kartanegara mendapat perlindungan yang lengkap terhadap virus polio. Pada tahun 2022, AFP Rate (nonpolio) < 15 tahun per 100.000 penduduk <15 tahun baru mencapai 10%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.2% atau dibanding tahun 2018 (1.6%). Jumlah kasus campak juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terdapat 56 kasus campak, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, 15 kasus.

Tabel 2. 9. Perkembangan Pengendalian Penyakit yang Dapat dicegah Kutai Kartanegara, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate (non polio) < 15 tahun per 100.000 penduduk <15 tahun	1.6	0.4	1.2	1.2	10.0
Jumlah kasus difteri	9	1	1.0	0	0.0
<i>Case fatality rate</i> difteri		0.0	0.0		0.0
Jumlah kasus pertusis		0	0.0	0	0.0
Jumlah kasus tetanus neonatorum		0	0.0	0	0.0
<i>Case fatality rate</i> tetanus neonatorum					0.0
Jumlah kasus hepatitis B	0	0	0.0	0	256.0
Jumlah kasus suspek campak	42	67	18.0	15	56.0
Insiden rate suspek campak	5.5	8.5	2.6	2	7.4
KLB ditangani < 24 jam	100		100.0	100	100.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Ketujuh, pelayanan pengendalian penyakit tular vektor dan *zoonotik*. Ada empat penyakit tular vektor yang masih merupakan masalah kesehatan di Kutai Kartanegara, yaitu malaria, demam berdarah dengue (DBD), Filariasis, dan covid 19. Penyakit-penyakit ini berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dan pengendaliannya merupakan

prioritas pembangunan kesehatan. Pada tahun 2022, angka kesakitan DBD sebesar 111.8%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, 25.3% tetapi angka kematiannya mengalami penurunan dari 1.6% (2021) menjadi 0.6% (2022). Pada kasus malaria, meskipun terjadi peningkatan suspek malaria tetapi case fatality rate nya 0. Karena cakupan pengobatan standar kasus malaria positif telah mencapai 93.3%. Sedangkan untuk kasus covid 19, sampai September 2022, cakupan vaksinasi covid 19 dosis 2 baru mencapai 75,32%, terendah diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (databoks, 2022).

Tabel 2. 10. Perkembangan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kutai Kartanegara, 2018

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kesakitan (<i>incidence rate</i>) DBD	103.2	136.7	44.1	25.3	111.8
Angka kematian (<i>case fatality rate</i>) DBD	0.9	0.7	0.7	1.6	0.6
Angka kesakitan malaria (<i>annual parasit incidence</i>)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Konfirmasi laboratorium pada suspek malaria	100	97.6	10.8	99	118.3
Pengobatan standar kasus malaria positif	100	100.0	75.3	94.7	93.3
<i>Case fatality rate</i> malaria	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus Penderita kronis filariasis	8	0	7.0	3	3.0
Jumlah kasus Covid 19					7.292
Cakupan Total Vaksinasi Covid-19 Dosis 1					
Cakupan Total Vaksinasi Covid-19 Dosis 2					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Kedelapan, pelayanan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). PTM merupakan faktor komorbid yang meningkatkan risiko kematian pada pasien COVID-19. Seperti digambarkan pada tabel 2.13, gerakan deteksi dini PTM membuahkan hasil.

Tabel 2. 11. Perkembangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kutai Kartanegara, 2018-2022

Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2018	2019	2020	2021	2022
Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan	27.4	26.9	22.2	39.2	100

Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38	87.7	82.4	35.6	100
Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara (Perempuan Usia 30-50)	0.2	0.7	0.1	0.1	0
Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	2.5	2.8	4.7	6	0
% tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	2.5	0.8	7.5	8.4	0
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	52.7	84.1	85.7	100.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Kesembilan, pelayanan kesehatan lingkungan. Belum semua penduduk Kutai Kartanegara memiliki akses terhadap sarana air minum layak dan sanitasi layak. Pada tahun 2021, penduduk yang dapat mengakses sarana air minum memenuhi syarat baru mencapai 79,3% mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 60,4%; dan lebih rendah dibanding tahun 2018 yang telah mencapai 88,4%. Akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2022 telah mencapai 79,5% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, 79,7%; lebih tinggi dibanding tahun 2018 (56,6%).

Tabel 2. 12. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kutai Kartanegara, 2018-2022

KESEHATAN LINGKUNGAN	2018	2019	2020	2021	2022
Sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	73.3	72.7	81.5	79.1	
Sarana air minum memenuhi syarat	88.4	90.5	93.4	79.3	60.4
Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	56.6	71.7	79.0	79.7	79.5
Desa STBM	0	0	0	0	0
Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	56.8	54.8	25.8	32.1	96
Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	42.2	54.4	61.3	65.7	72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

2) Penurunan Prevalensi *Stunting*

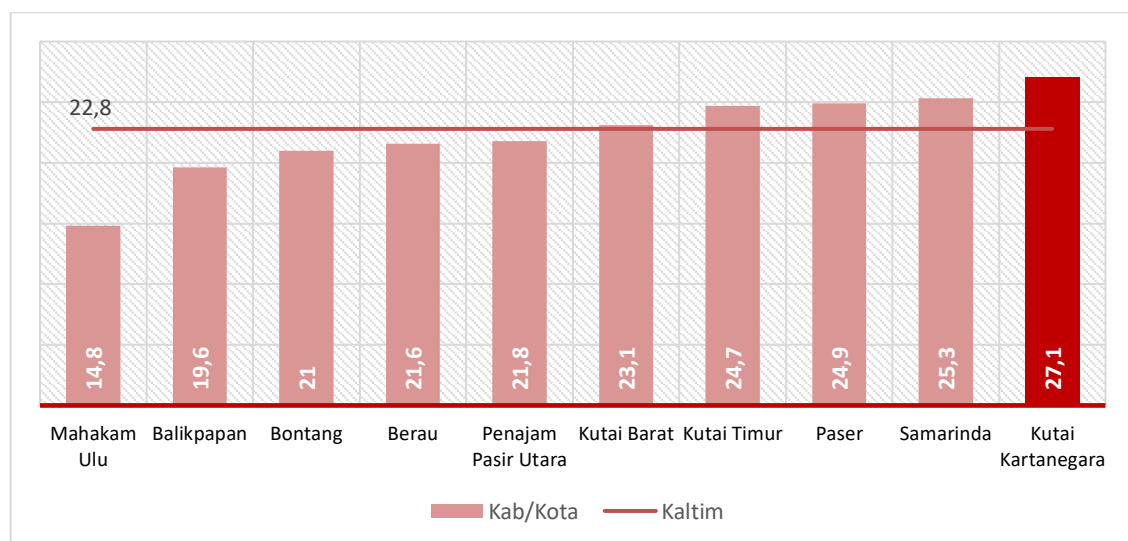
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 HPK dari anak balita.

Target Perpres No. 59 Tahun 2017, bahwa pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membagi kategori prevalensi *stunting*: sangat rendah (<2,5%), rendah (2,5 - <10%), sedang (10 - <20%), tinggi (20 sampai <30%), sangat tinggi (>30%).

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi *stunting* Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 27,1%, naik dari 26,4% (SSGI 2021). Angka prevalensi *stunting* 2022 tersebut tertinggi di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur dan diatas rata-rata Kaltim.

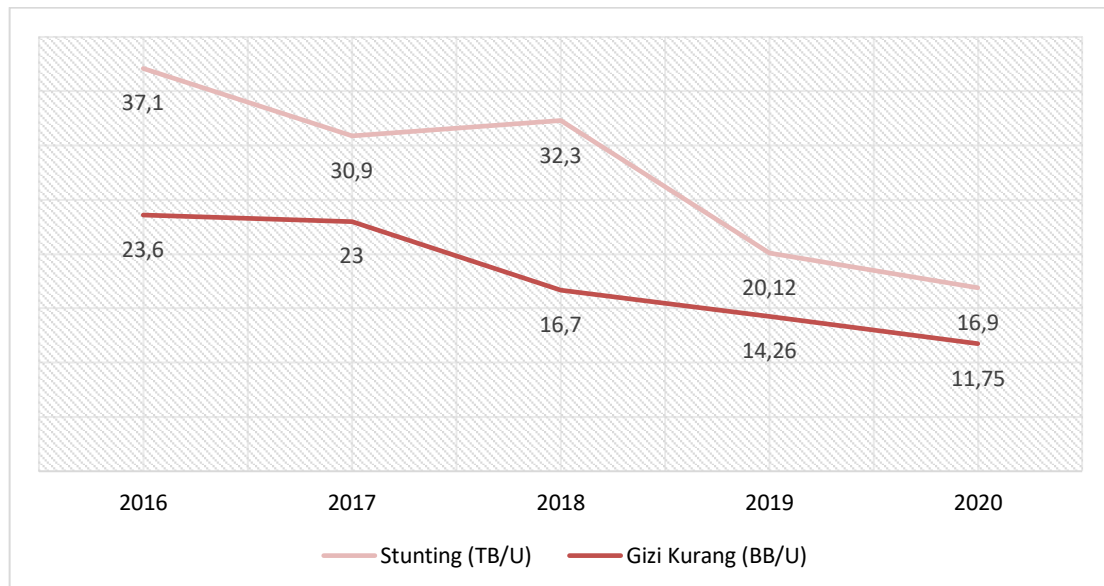
Gambar 2. 19. Posisi Prevalensi Stunting Kutai Kartanegara, 2022



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2022.

Tetapi dari sisi perkembangan 2016-2020, angka prevalensi stunting dan gizi kurang di Kutai Kartanegara mengalami trend penurunan dalam periode lima tahun terakhir.

Gambar 2. 20. Perkembangan Stunting (TB/U) dan Gizi Kurang (BB/U)
Kutai Kartanegara, 2016-2020



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara
Ket: TB/U (Tinggi Badan/Usia); BB/U (Berat Badan/Usia).

b. Pendidikan

Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilakukan melalui: (a) peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik; (b) peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan (c) pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan [Perpres No. 153/2014, Pasal 6 ayat (3)].

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu indikator *input*, indikator proses, dan indikator *output*. Indikator *input* merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK),

dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Indikator *output* merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator *output* antara lain Angka Melek Huruf (AMH), angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Menurut BPS, Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana anak-anak dan remaja dalam kelompok usia tertentu terlibat dalam proses pendidikan formal, baik itu di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. APS menggambarkan persentase jumlah anak atau remaja yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan jumlah anak atau remaja yang seharusnya bersekolah pada usia tersebut.

Berdasarkan data BPS, APS Kutai Kartanegara kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan hampir 100% partisipasi dalam pendidikan dasar, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau seluruh anak di usia sekolah dasar. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2021, angka ini tetap sangat tinggi dan stabil.

Kelompok umur 13-15 tahun menunjukkan partisipasi yang hampir sempurna dalam pendidikan menengah pertama (SMP). Penurunan kecil di tahun 2021 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti dampak pandemi COVID-19 atau kebijakan pendidikan saat itu, tetapi data yang ada menunjukkan pemulihan yang cepat dan stabilisasi pada 2023.

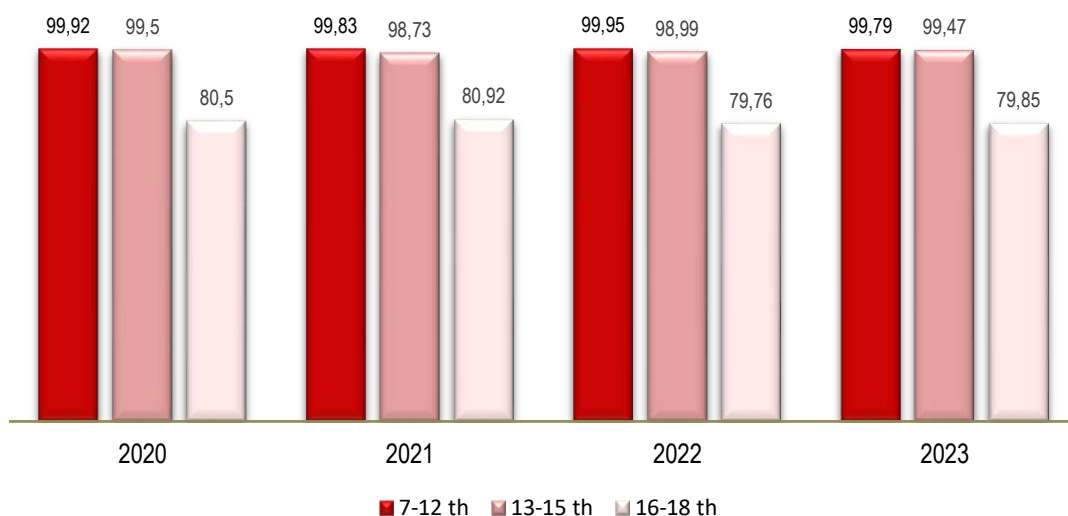
Kelompok umur 16-18 tahun mengalami penurunan yang lebih signifikan, meskipun tetap di atas 79%. Penurunan ini bisa menunjukkan beberapa tantangan dalam mempertahankan partisipasi di tingkat pendidikan menengah atas (SMA atau setara). Penurunan ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan tinggi, atau bahkan pilihan pekerjaan setelah sekolah dasar.

Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal partisipasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah pertama, dengan APS yang hampir sempurna di kelompok umur 7-15 tahun.

Peningkatan sedikit dalam APS untuk kelompok umur 16-18 tahun di tahun 2023 dapat menjadi tanda bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat menengah atas perlu dilanjutkan, dengan fokus pada mengurangi hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa di usia ini (seperti biaya, akses pendidikan, atau pekerjaan yang menarik).

Mengingat penurunan kecil pada kelompok umur 16-18 tahun, ada kebutuhan untuk meningkatkan program-program yang mendukung kelanjutan pendidikan di tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi, seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan lanjutan.

Gambar 2. 21. Perkembangan APS Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Umur, 2020-2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, (2020/2021; 2022; 2023); BPS Kalimantan Timur (2020; 2021; 2022; 2023); BPS (2020; 2021; 2022; 2023)

Dari sisi relevansi, Kutai Kartanegara memiliki APS yang lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur, namun tetap menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan APS Nasional di kelompok umur 16-18 tahun. Kalimantan Timur menunjukkan APS yang lebih tinggi, dengan angka sekitar 81% selama 4 tahun terakhir, sedangkan Kutai Kartanegara tetap berada di angka sekitar 79-80%. Tingkat partisipasi

pendidikan menengah atas (SMA) di Nasional lebih rendah, dengan angka sekitar 73%. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, gap antara Kutai Kartanegara dan Nasional cukup besar.

Secara umum, Kutai Kartanegara menunjukkan performa yang lebih baik dalam Angka Partisipasi Sekolah pada semua kelompok umur dibandingkan dengan angka nasional, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi pada kelompok umur 16-18 tahun agar lebih mendekati Kalimantan Timur.

Tabel 2. 13. Relevansi Perkembangan APS Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2020-2023

Tahun	Kutai Kartanegara			Kalimantan Timur			Nasional		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
2020	99,92	99,5	80,5	99,73	99,07	81,88	99,26	95,74	72,72
2021	99,83	98,73	80,92	99,6	98,9	82,1	99,19	95,99	73,09
2022	99,95	98,99	79,76	99,57	98,75	81,43	99,1	95,92	73,15
2023	99,79	99,47	79,85	99,64	98,71	81,5	99,16	96,1	73,42

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, (2020/2021; 2022; 2023); BPS Kalimantan Timur (2020; 2021; 2022; 2023); BPS (2020; 2021; 2022; 2023)

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

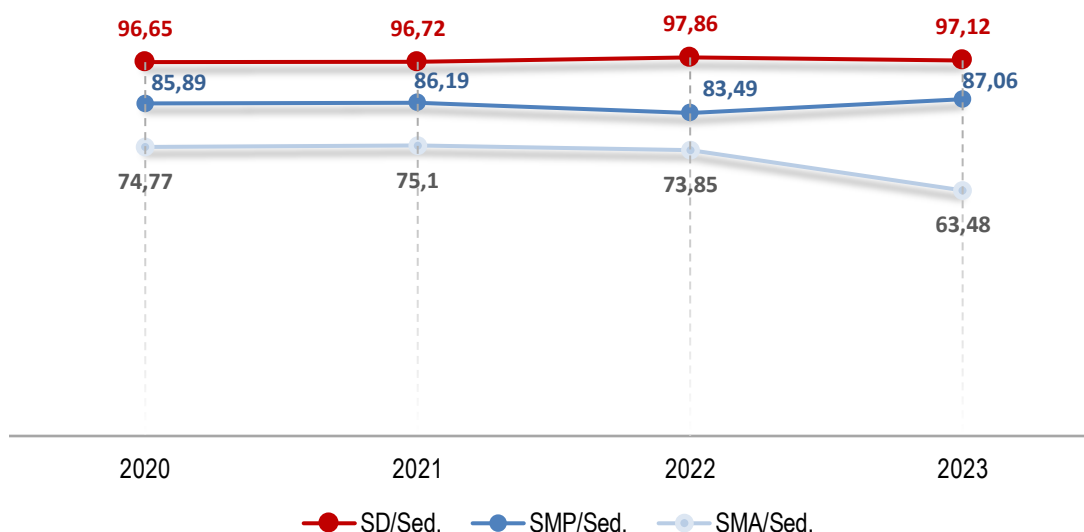
Menurut BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

APM menggambarkan persentase jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan (misalnya SD, SMP, atau SMA) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya mengikuti jenjang pendidikan tersebut berdasarkan usia.

Secara sederhana, APM menunjukkan sejauh mana jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencerminkan jumlah anak usia yang seharusnya mengikuti pendidikan di jenjang tersebut. Berdasarkan data BPS, APM SD/Sederajat Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang sangat baik, dengan hampir semua anak usia sekolah dasar sudah terdaftar dan bersekolah. Ada sedikit fluktuasi, tetapi secara keseluruhan, akses pendidikan di tingkat dasar sangat baik.

APM SMP/Sederajat mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2022 yang cukup signifikan, namun kembali meningkat pada 2023. Hal ini menunjukkan tantangan dalam memastikan anak-anak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama, tetapi juga ada tanda-tanda pemulihan. Penurunan yang cukup besar pada APM SMA/Sederajat, terutama pada 2023, menandakan adanya masalah yang lebih besar di tingkat pendidikan menengah atas. Perlu perhatian lebih dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di jenjang ini, baik melalui kebijakan yang lebih inklusif, pembiayaan pendidikan, dan peningkatan aksesibilitas.

Gambar 2. 22. Perkembangan APM Kutai Kartanegara, 2020-2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2023; 2021)

Dianalisis dari sisi relevansi, APM Jenjang SD/Sederajat di Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan Kaltim dan Nasional, namun tetap berada di atas 100%,

yang menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar sangat baik dan hampir seluruh anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah.

APM Jenjang SMP/Sederajat Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan tajam pada 2023, sementara Kaltim dan Nasional relatif lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih besar di Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi di SMP pada 2023.

Jenjang SMA/Sederajat: Kutai Kartanegara dan Kaltim memiliki APM SMA yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional, meskipun ada penurunan pada 2023. Ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan menengah atas di Kaltim dan Kutai Kartanegara lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.

Secara keseluruhan, Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal APM, meskipun ada fluktuasi pada beberapa jenjang, terutama di SMA/Sederajat pada 2023. Kaltim secara umum menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, sementara Indonesia secara keseluruhan masih perlu meningkatkan partisipasi, khususnya di jenjang SMA.

Tabel 2. 14. Relevansi APM Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional

Tahun	Kutai Kartanegara			Kalimantan Timur			Nasional		
	SD/ Sed.	SMP/ Sed.	SMA/ Sed.	SD/ Sed.	SMP/ Sed.	SMA/ Sed.	SD/ Sed.	SMP/ Sed.	SMA/ Sed.
2020	96,65	85,89	74,77	98,44	81,28	69	97,69	80,12	61,25
2021	96,72	86,19	75,1	98,36	81,3	69,29	97,8	80,59	61,65
2022	97,86	83,49	73,85	98,45	82,65	69,1	97,88	80,89	61,97
2023	97,12	87,06	63,48	95,53	83,36	69,89	97,89	81,35	62,53

Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2020/2021; 2023); BPS Kalimantan Timur (2021; 2022; 2023); BPS, (2024)

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

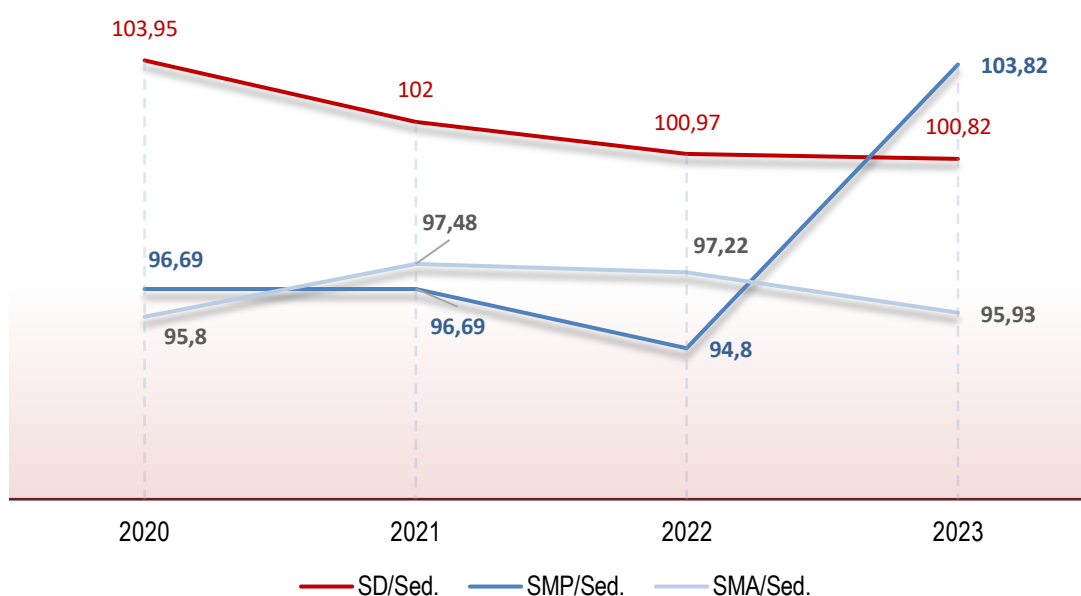
Menurut BPS, APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Berdasarkan data BPS, APK SD/Sederajat Kutai Kartanegara mengalami penurunan sedikit setiap tahun, namun tetap di atas 100%, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa di SD melebihi jumlah anak usia sekolah dasar. Ini menunjukkan adanya upaya yang baik dalam meningkatkan akses pendidikan dasar, meskipun ada sedikit penurunan pada 2023.

APK SMP/Sederajat menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan pada 2022 dan kenaikan tajam pada 2023. Kenaikan ini bisa menunjukkan adanya kebijakan yang berhasil meningkatkan partisipasi anak-anak di jenjang SMP pada 2023. APK yang melebihi 100% juga menunjukkan bahwa ada siswa yang lebih tua atau lebih muda dari rentang usia normal untuk SMP yang terdaftar.

APK SMA/Sederajat relatif stabil, meskipun ada penurunan kecil pada 2023. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi atau sosial yang mempengaruhi kelanjutan pendidikan ke jenjang SMA. Meski demikian, APM SMA/Sederajat di Kutai Kartanegara masih relatif tinggi (sekitar 95%), yang berarti banyak anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas. Dengan demikian, Kutai Kartanegara menunjukkan tingkat partisipasi yang baik di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), meskipun ada beberapa fluktuasi dan penurunan di beberapa tahun. Peningkatan yang signifikan pada SMP/Sederajat pada 2023 bisa menjadi indikator positif dari keberhasilan kebijakan pendidikan di Kutai Kartanegara.

Gambar 2. 23. Perkembangan APK Kutai Kartanegara, 2020-2023



Sumber: BPS

Pada sisi relevansi, Kaltim dan Nasional memiliki APK Jenjang SD/Sederajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar di Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan lebih baik. Namun, Kutai Kartanegara tetap menunjukkan angka yang sangat baik, meskipun sedikit menurun sejak 2020.

Pada jenjang SMP/Sederajat, Kutai Kartanegara menunjukkan kenaikan yang sangat besar pada 2023 (103,82%), yang kemungkinan mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di SMP di daerah tersebut. Kenaikan ini tidak terlihat di Kalimantan Timur atau Nasional, yang menunjukkan stabilitas pada sekitar 92%. Kalimantan Timur dan Nasional cenderung memiliki APK SMP yang lebih rendah dan stabil dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, yang perlu diperhatikan sebagai area yang masih perlu peningkatan.

Pada jenjang SMA/Sederajat, Kutai Kartanegara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kaltim dan Nasional, meskipun ada penurunan sedikit pada 2023. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas di Kutai Kartanegara lebih merata dan lebih banyak diakses dibandingkan dengan provinsi lain dan secara nasional. Kalimantan Timur memiliki tingkat partisipasi yang stabil, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan Kutai Kartanegara, sementara Nasional masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi di SMA, dengan angka APK yang hanya sekitar 85%.

Dengan demikian, Kutai Kartanegara menunjukkan performa yang baik di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), dengan beberapa peningkatan signifikan pada jenjang SMP pada 2023. Meskipun ada penurunan kecil pada SMA pada 2023, APM di Kutai Kartanegara lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan Nasional, terutama di jenjang pendidikan menengah (SMA).

Kalimantan Timur dan Nasional menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah di SMP dan SMA, meskipun partisipasi pendidikan dasar (SD) relatif baik di seluruh wilayah. Dengan demikian, program kedepan fokus pada peningkatan akses pendidikan di jenjang SMP dan SMA, terutama dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Program pendidikan yang mendukung kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (terutama di SMA) perlu diperkuat, dengan

peningkatan bantuan atau beasiswa untuk siswa berpotensi, terutama yang berasal dari keluarga miskin.

Tabel 2. 15. Relevansi APK Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2020-2023

Tahun	Kutai Kartanegara			Kalimantan Timur			Nasional		
	SD/ Sed.	SMP/ Sed.	SMA/ Sed.	SD/ Sed.	SMP /Sed.	SMA/ Sed.	SD/ Sed.	SMP/ Sed.	SMA/ Sed.
2020	103,95	96,69	95,8	105,75	92,17	95,23	106,3	92,06	84,53
2021	102	96,69	97,48	105,26	92,03	95,52	106,2	92,8	85,23
2022	100,97	94,8	97,22	105,21	91,47	95,09	106,27	92,11	85,49
2023	100,82	103,82	95,93	106,46	92,28	95,16	105,62	92,51	86,3

Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2020/2021; 2023); BPS Kalimantan Timur (2021; 2022; 2023); BPS, (2024)

4) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan benar dalam huruf Latin atau sistem tulisan lainnya, baik di lingkungan formal maupun informal. AMH digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur tingkat literasi suatu populasi. Secara umum, AMH mencakup dua hal utama: (1) kemampuan membaca (apakah seseorang dapat membaca teks sederhana dalam bahasa yang dipahami), (2) kemampuan menulis (apakah seseorang dapat menulis dengan benar, seperti menulis nama atau kalimat yang sederhana).

Secara keseluruhan, AMH di Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang sangat baik, dengan hampir 99% penduduk mampu membaca dan menulis. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan

dan program literasi di daerah

ini cukup efektif.

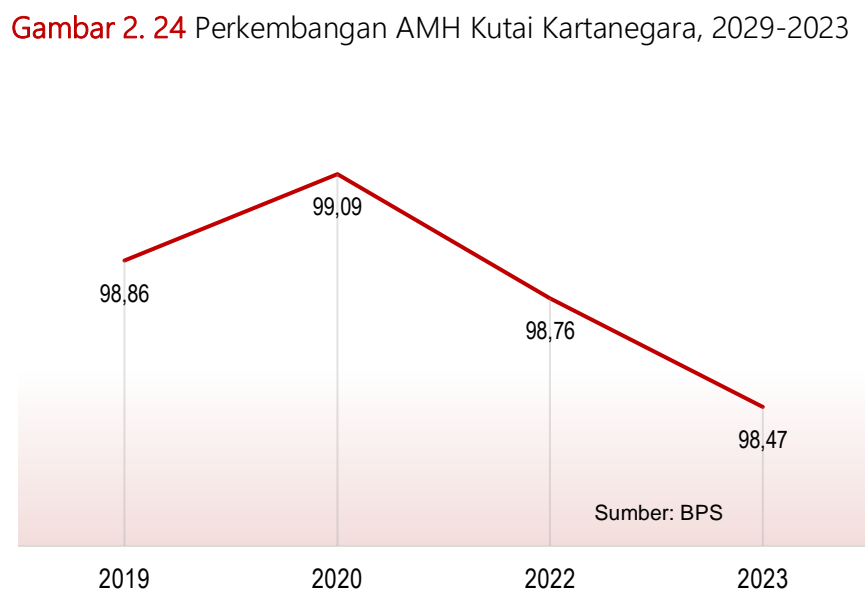
Peningkatan kecil pada 2020 dan penurunan kecil pada 2022 dan 2023 dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor,

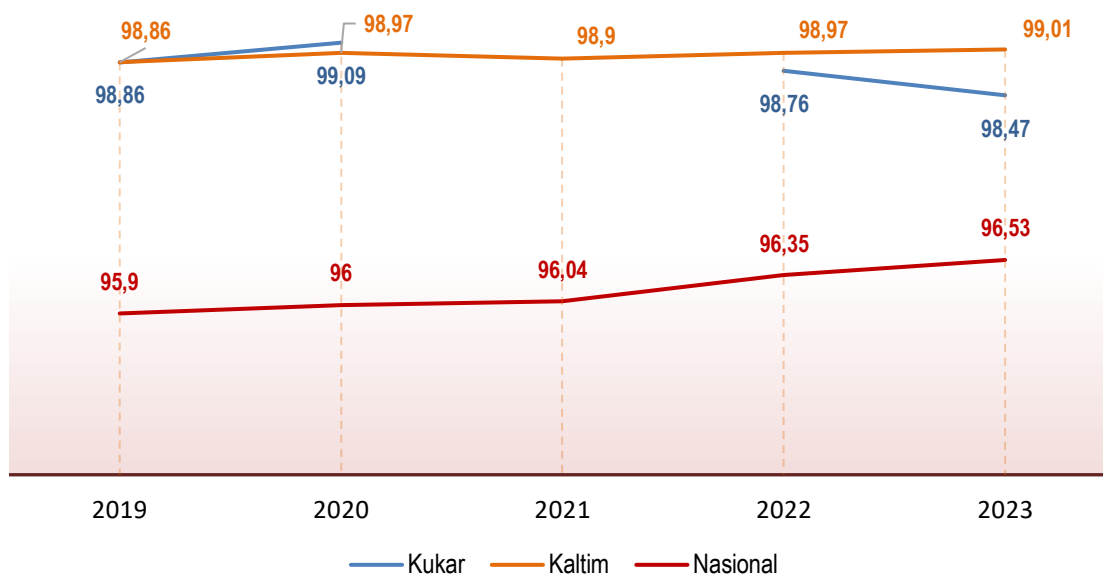
termasuk pandemi COVID-19 dan tantangan dalam mempertahankan program literasi di seluruh wilayah.

Penurunan sedikit pada 2022 dan 2023 (sebesar 0,33% dan 0,29%) menunjukkan perlunya lebih banyak upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan AMH, terutama di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau atau terdampak oleh faktor sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan dan program literasi yang lebih inklusif dan berfokus pada orang dewasa, serta peningkatan akses pendidikan untuk kelompok rentan (seperti masyarakat di daerah terpencil atau orang dewasa yang belum melek huruf), perlu terus diperkuat untuk menjaga agar AMH tetap tinggi.

Perkembangan AMH Kutai Kartanegara selama lima tahun terakhir relevan dengan perkembangan Kaltim dan Nasional. Kutai Kartanegara memiliki tingkat literasi tinggi, namun ada penurunan kecil pada 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan angka melek huruf yang tinggi, meskipun tetap berada di atas 98%. Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara memiliki angka melek huruf yang sangat tinggi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional, meskipun ada sedikit penurunan di beberapa tahun terakhir. Perlu adanya fokus yang lebih besar pada daerah yang tertinggal dalam hal pendidikan dan literasi di tingkat nasional.



Gambar 2. 25. Relevansi Perkembangan AMH Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional



Sumber: BPS.

Ket: Data AMH Kutai Kartanegara tahun 2021 tidak tersedia (n.a.)

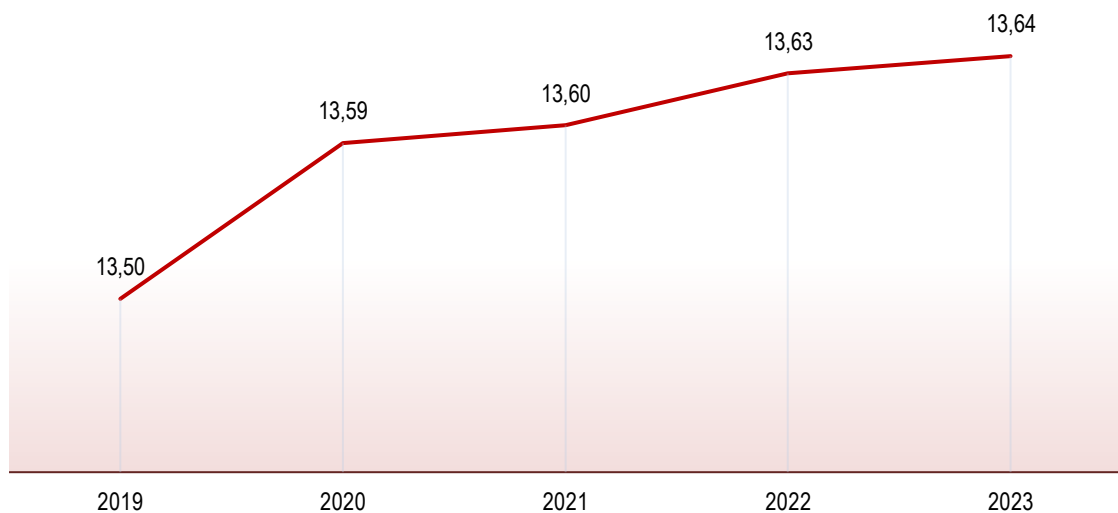
5) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada tahun 2019, HLS adalah 13,5 tahun, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan untuk menyelesaikan pendidikan formal hingga sekitar 13,5 tahun (sekitar setara dengan SMA/SMK). Pada 2023, HLS meningkat menjadi 13,64 tahun, yang berarti ada harapan sedikit lebih tinggi bagi penduduk untuk melanjutkan pendidikan, kemungkinan hingga tingkat perguruan tinggi atau setara.

Rata-rata kenaikan HLS per tahun (2019-2023) di Kukar adalah sekitar 0,03 tahun (sekitar 0,36 bulan). HLS di Kukar meningkat setiap tahun, meskipun kenaikannya sangat kecil. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2019 dan 2020, yaitu 0,09 tahun, sementara di tahun-tahun berikutnya kenaikannya lebih kecil, dengan kenaikan terkecil sebesar 0,01 tahun (sekitar 0,12 bulan) antara 2020-2021 dan 2022-2023. Kenaikan yang stabil dan

terus-menerus menunjukkan adanya peningkatan jangka panjang dalam harapan pendidikan di Kukar, meskipun tidak ada lonjakan yang signifikan.

Gambar 2. 26. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023



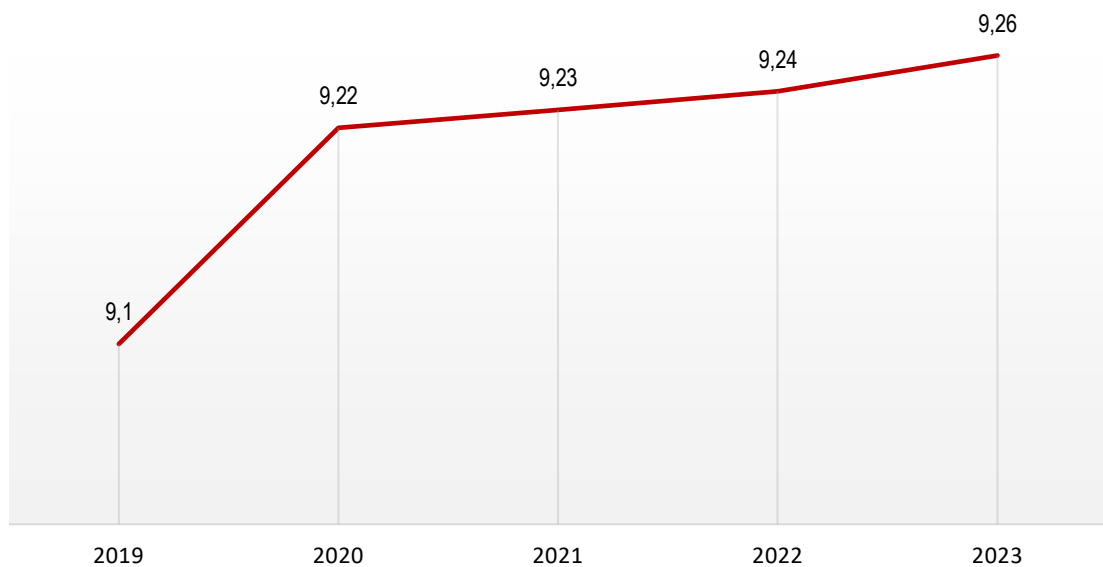
Sumber: BPS

6) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut BPS, RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Secara keseluruhan, RLS di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023.

Kenaikan RLS cukup kecil per tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,02 tahun (sekitar 0,24 bulan) setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2019-2020 yang lebih tinggi (kenaikan 0,12 tahun). Meskipun ada kenaikan yang konsisten, laju kenaikan RLS relatif lambat. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor antara lain seperti akses pendidikan, kualitas pendidikan, atau kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kecepatan kenaikan RLS.

Gambar 2. 27. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023



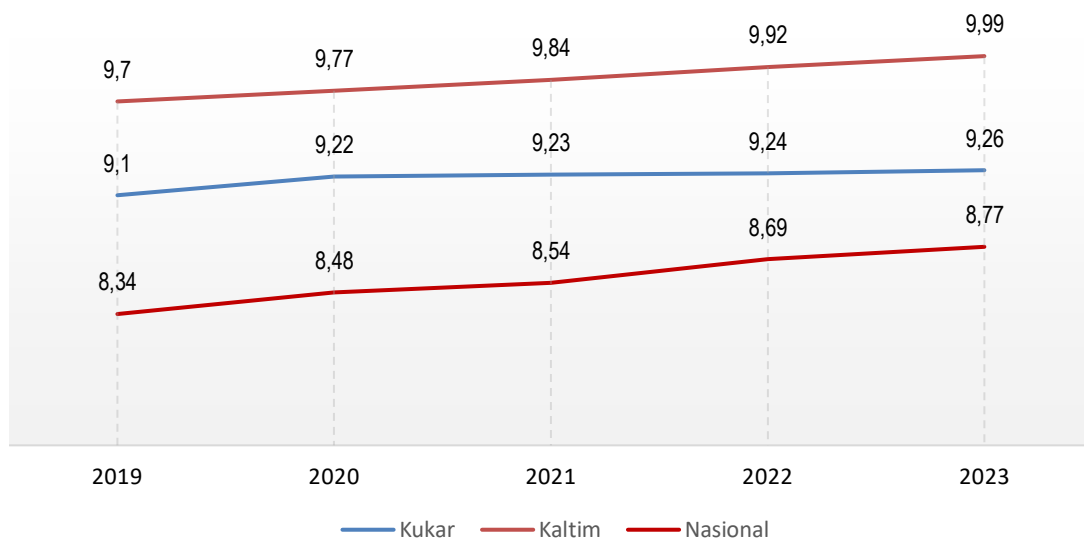
Sumber: BPS

Terhadap capaian Kaltim, RLS di Kukar meningkat dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan Kaltim. Pada tahun 2023, RLS di Kukar adalah 9,26 tahun, sedangkan di Kaltim sudah mencapai 9,99 tahun. Artinya, perbedaan RLS antara Kukar dan Kaltim pada 2023 adalah 0,73 tahun (sekitar 8,8 bulan). Meskipun ada peningkatan yang stabil di Kukar, Kaltim mengalami kenaikan yang sedikit lebih cepat.

Terhadap capaian Nasional, RLS di Kukar lebih tinggi daripada RLS nasional, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2023, RLS di Kukar (9,26 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan RLS nasional (8,77 tahun), dengan selisih sekitar 0,49 tahun (sekitar 5,88 bulan). Kenaikan RLS di Kukar cenderung lebih lambat dibandingkan dengan nasional yang naik lebih signifikan pada beberapa tahun terakhir.

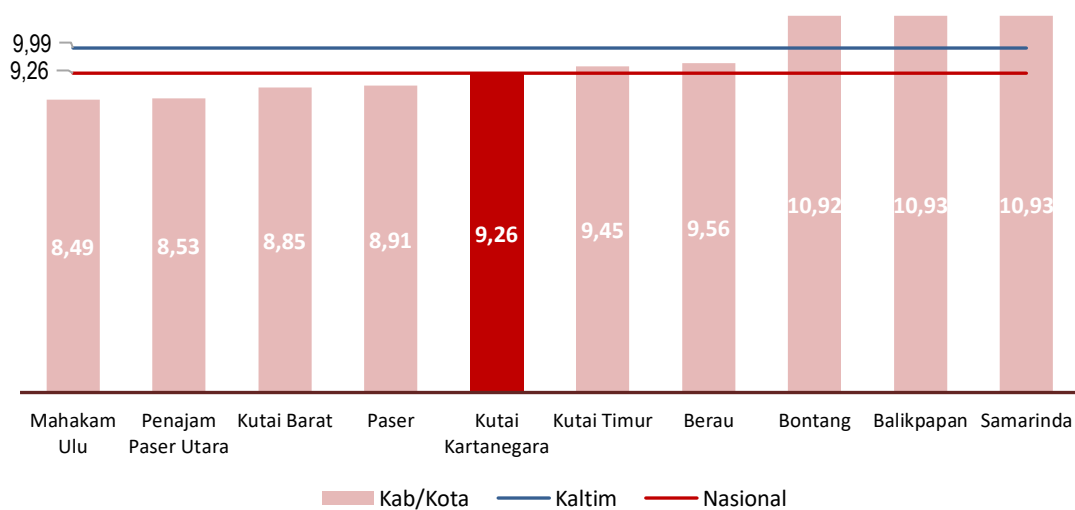
Dengan demikian, perlu ada evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat mempercepat laju peningkatan RLS, mengingat masih ada jarak dengan provinsi dan rata-rata nasional. Peningkatan akses pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pengajaran, dapat membantu mempercepat pencapaian target pendidikan yang lebih baik.

Gambar 2. 28. Relevansi Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023.



Dibanding Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, capaian RLS Kabupaten Kutai Kartanegara berada di tengah-tengah, posisi kelima.

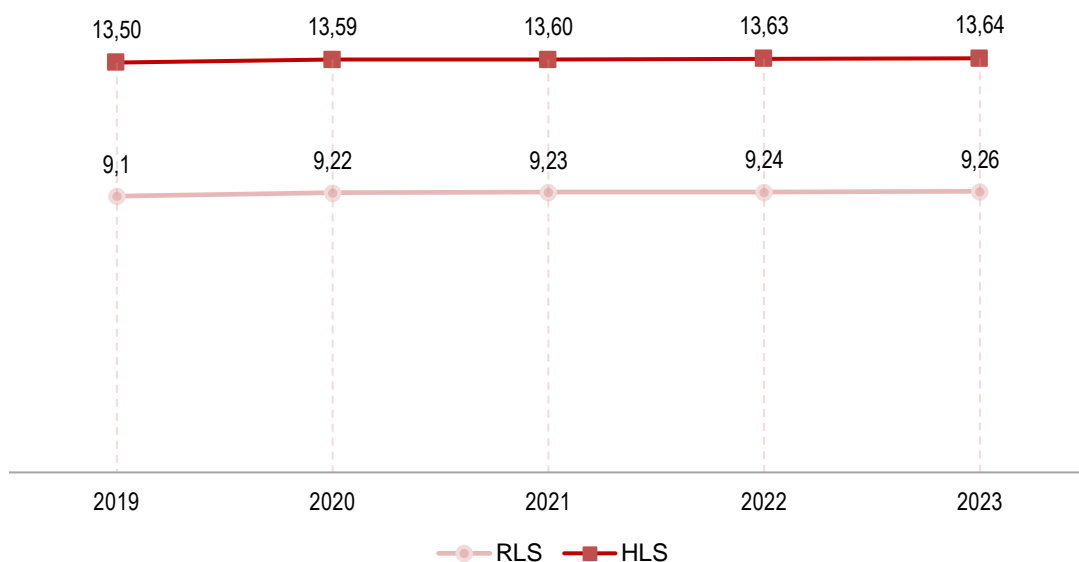
Gambar 2. 29. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



Sumber: BPS

Jika disandingkan antara capaian HLS dengan capaian RLS Kutai Kartanegara, maka masih ditemukan kesenjangan antara harapan dengan realitas. Misalnya, pada tahun 2023 RLS adalah 9,26 tahun, sementara HLS adalah 13,64 tahun, terdapat kesenjangan 4,38 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan untuk pendidikan yang lebih tinggi, kenyataannya banyak penduduk di Kukar yang mungkin belum mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang diharapkan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan kebijakan ekonomi.

Gambar 2. 30. Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kutai Kartanegara, 2019-2023



Sumber: BPS

c. Ekonomi

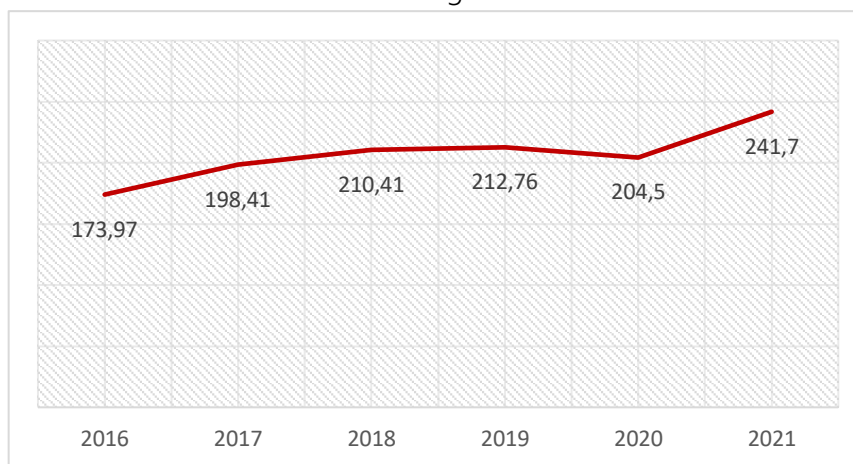
Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi dilakukan melalui: (a) peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan (b) pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan [Perpres No. 153/2014, Pasal 6 ayat (4)].

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2019 terus mengalami *trend* positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada tahun 2020 terjadi penurunan, diduga karena pertumbuhan jumlah

penduduk yang sangat signifikan (5,41%), terjadi perlambatan perekonomian global yang disebabkan pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,50 juta rupiah per kapita. Namun, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai Kartanegara masih tergolong cukup tinggi. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menunjukkan trend positif pada tahun 2021 menjadi 241,70 Juta rupiah perkapita.

Gambar 2. 31. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

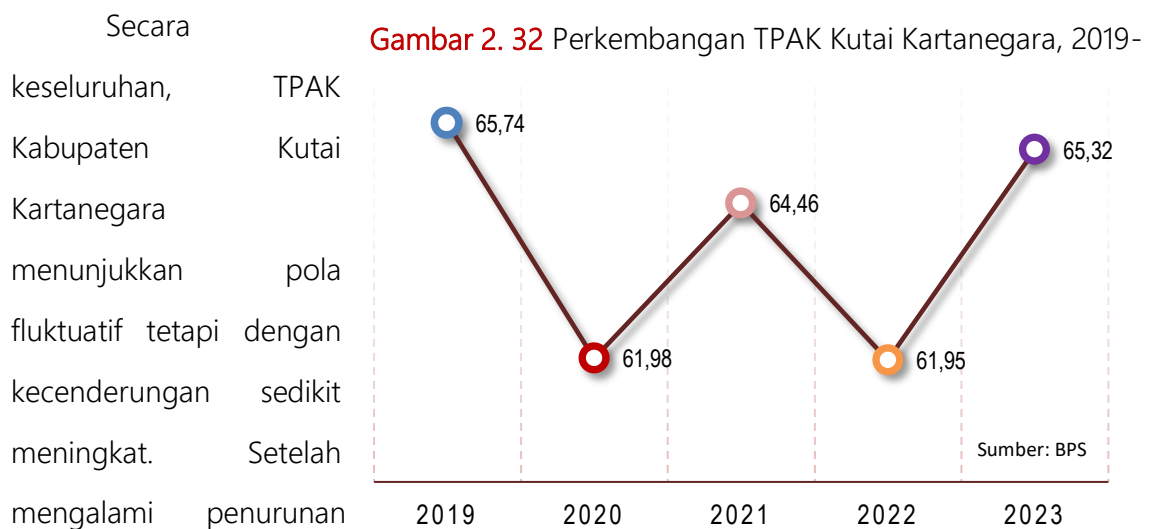
a) Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Pengangguran

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data BPS, pada 2020 TPAK Kukar mengalami penurunan signifikan dari 65,74% menjadi 61,98%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang keluar dari pasar kerja, atau ada perubahan dalam jumlah angkatan kerja yang terpengaruh oleh berbagai kebijakan ekonomi dan sosial pada masa tersebut.

Setelah penurunan pada tahun 2020, TPAK kembali meningkat menjadi 64,46% pada 2021. Pemulihan ini mungkin menunjukkan bahwa dampak pandemi mulai berkurang dan ekonomi mulai pulih, mendorong lebih banyak orang untuk kembali bekerja atau mencari pekerjaan.

TPAK sedikit turun lagi menjadi 61,95% pada 2022. Penurunan ini bisa menunjukkan adanya tantangan ekonomi lain, mungkin terkait dengan inflasi, ketidakpastian ekonomi, atau faktor lokal lainnya yang mempengaruhi ketersediaan pekerjaan. TPAK kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 65,32%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara umum, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pemulihan dan adanya upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan atau menarik lebih banyak orang untuk masuk dalam angkatan kerja.



yang tajam pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja kembali pulih dan menunjukkan angka yang hampir kembali ke level 2019 pada tahun 2023.

Pandemi COVID-19 pada 2020 memberikan dampak besar terhadap banyak sektor pekerjaan, mengurangi peluang kerja, dan memaksa banyak orang untuk berhenti bekerja. Ini kemungkinan menjadi penyebab utama penurunan TPAK yang tajam pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pada 2021 dan seterusnya, setelah dampak pandemi memberikan peluang kerja lebih banyak dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Program "Siap Kerja" memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi besar yang masuk ke wilayah Kutai Kartanegara, hal ini dapat meningkatkan TPAK. Sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, dan industri kreatif mungkin berperan penting dalam hal ini. Fluktuasi dalam ketersediaan lapangan kerja, yang dipengaruhi oleh perubahan demografi dan struktur ekonomi, juga mempengaruhi partisipasi angkatan kerja.

TPAK yang Tinggi (65,32%) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara terlibat dalam aktivitas ekonomi. Faktor-faktor yang

mendukung hal ini termasuk sektor formal (Buruh/Karyawan/Pegawai) yang dominan, serta sektor informal yang kuat melalui wirausaha dan pekerja keluarga.

Angka TPAK tinggi ini menunjukkan keseimbangan antara sektor formal (buruh/karyawan/pegawai) dan informal (berusaha sendiri, pekerja keluarga tak dibayar). Meskipun sektor formal mendominasi, sektor informal seperti wirausaha kecil dan pekerja keluarga juga memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Meskipun sektor formal (seperti buruh/karyawan/pegawai) mendominasi dengan hampir 49%, sektor informal (berusaha sendiri, pekerja keluarga tak dibayar, buruh tidak tetap) juga memainkan peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Sektor informal ini menunjukkan adanya kekuatan ekonomi lokal yang lebih fleksibel namun lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Tantangannya, meskipun TPAK tinggi, banyaknya pekerja tidak tetap atau yang bekerja tanpa dibayar bisa menjadi indikasi adanya kelompok penduduk yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan dan belum mendapatkan perlindungan kerja yang memadai.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan lebih banyak pelatihan, modal, dan akses pasar. Untuk sektor formal, meskipun lebih stabil, masih ada potensi untuk meningkatkan peluang kerja bagi penduduk melalui peningkatan investasi dan pengembangan sektor industri yang lebih besar.

Tabel 2. 16. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

Status Pekerjaan Utama	Jumlah	Persen
Berusaha Sendiri	87.310	24,5
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	38.921	10,9
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	5.319	1,5
Buruh/Karyawan/Pegawai	173.102	48,6
Pekerja Bebas	11.852	3,3

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	39.831	11,2
Jumlah	356.335	100

Sumber: BPS

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan TPAK: (1) Meningkatkan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor manufaktur, pariwisata, dan pertanian, dapat membantu menjaga dan meningkatkan TPAK; (2) Program program pelatihan melalui Siap Kerja untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan yang berubah, terutama di sektor-sektor teknologi dan industri baru; (3) Mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor yang memerlukan banyak tenaga kerja, seperti infrastruktur energi, transportasi, dan perumahan, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja.

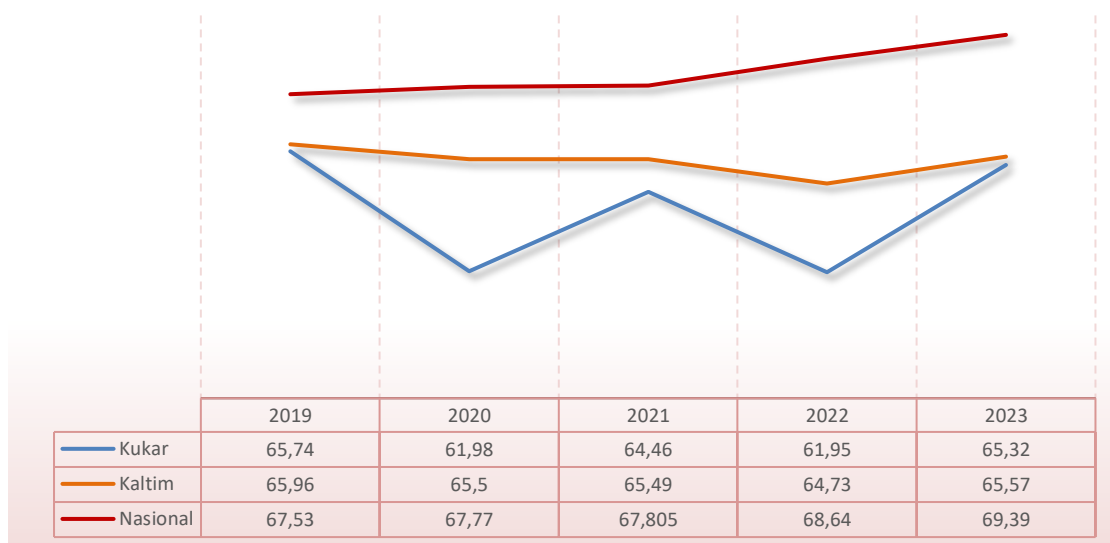
Dilihat dari sisi relevansi, TPAK Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung fluktuatif selama lima tahun ini, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian ada pemulihan yang agak lambat. Meskipun ada peningkatan pada 2023, namun TPAK Kukar masih lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

TPAK Kalimantan Timur menunjukkan penurunan yang lebih stabil dan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan, TPAK Kaltim lebih tinggi dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, meskipun tidak jauh berbeda dengan Kutai Kartanegara di sebagian besar tahun.

TPAK Nasional terus meningkat sepanjang periode ini, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional berjalan lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan daerah-daerah tertentu, termasuk Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, meskipun Kutai Kartanegara menunjukkan perbaikan, TPAK Kabupaten Kutai Kartanegara tetap lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan rata-rata nasional, terutama pada tahun-tahun pasca-pandemi. Pemulihan ekonomi masih menjadi tantangan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan serta diversifikasi ekonomi dapat membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja di masa depan.

Gambar 2. 33. Relevansi Perkembangan TPAK Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023

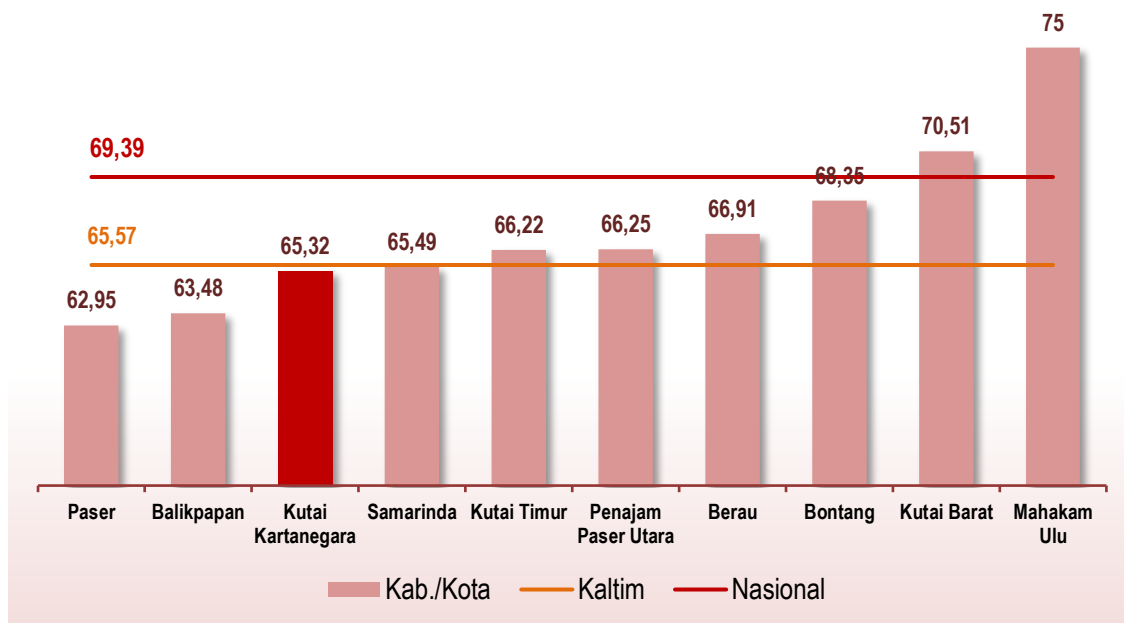


Sumber: Sumber: BPS (2024)

Dari perspektif posisi relatif, Kaltim memiliki TPAK 65,57%, yang sedikit lebih tinggi dari Kutai Kartanegara (selisih 0,25%). Ini menunjukkan bahwa TPAK Kutai Kartanegara relatif sejajar dengan rata-rata provinsi, meskipun sedikit lebih rendah. TPAK Nasional adalah 69,39%, yang lebih tinggi sekitar 4,07% dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kaltim dan Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

TPAK Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang relatif baik, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan rata-rata nasional. Posisi Kutai Kartanegara dalam konteks Kalimantan Timur adalah sedang, dengan beberapa daerah lain seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ada potensi untuk meningkatkan TPAK dengan memperbaiki kualitas pekerjaan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

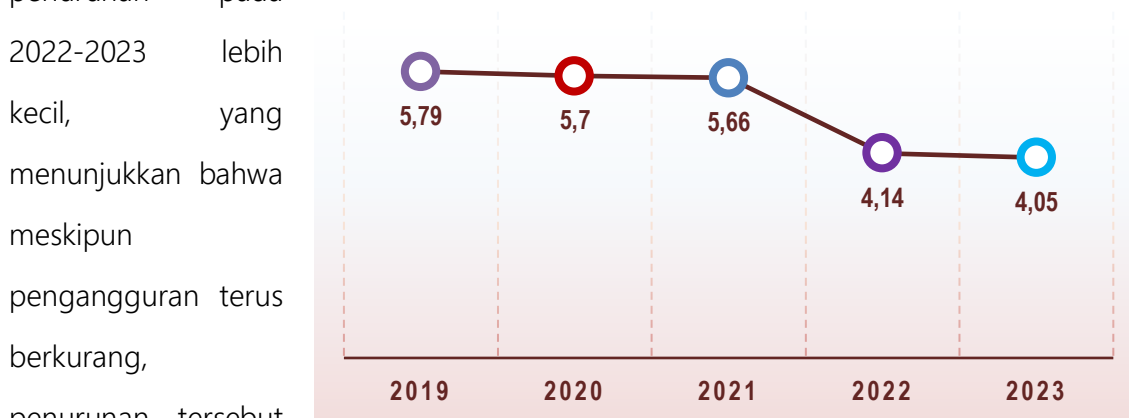
Gambar 2. 34. Posisi Relatif TPAK Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2023



Sumber: BPS (2024)

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara keseluruhan, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan yang stabil sepanjang periode 2019-2023. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021-2022, yang bisa dijelaskan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang lebih terasa di tahun 2022. Di sisi lain, **Gambar 2. 35.** Perkembangan TPT Kutai Kartanegara, 2019-2023



Sumber: BPS (2024)

penurunan pada 2022-2023 lebih kecil, yang menunjukkan bahwa meskipun pengangguran terus berkurang, penurunan tersebut sudah mulai melambat karena tingkat pengangguran sudah berada pada level yang cukup rendah.

TPT yang relatif rendah pada 2023 (4,05%) menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara telah berhasil mengurangi pengangguran secara signifikan sejak tahun 2019, meskipun masih ada sedikit tantangan dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi relevansi terhadap TPT Kaltim dan Nasional, TPT Kutai Kartanegara (Kukar) pada tahun 2023 berada pada 4,05%, lebih rendah dibandingkan dengan TPT Kalimantan Timur (5,31%) dan TPT Nasional (5,45%). Ini menunjukkan bahwa secara lokal, Kutai Kartanegara berhasil menjaga angka pengangguran pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan rata-rata nasional.

Pada 2022, TPT Kutai Kartanegara mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan Nasional, yang menunjukkan adanya pemulihan yang relatif lebih cepat di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca-pandemi.

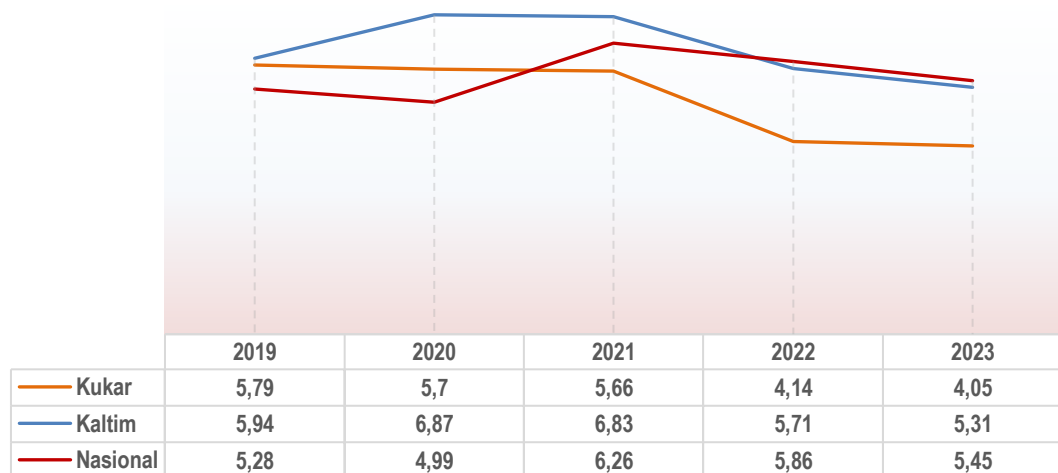
TPT Kalimantan Timur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, meskipun ada penurunan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan di tingkat provinsi lebih lambat dibandingkan dengan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

TPT Nasional cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur sepanjang periode ini, dengan perbedaan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Pada 2023, TPT Nasional (5,45%) lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Kutai Kartanegara (4,05%), tetapi masih lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur (5,31%).

Kutai Kartanegara berhasil menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan rata-rata nasional pada tahun 2022 dan 2023. Ini bisa disebabkan oleh keberhasilan program-program pengembangan ekonomi lokal atau sektor-sektor tertentu yang lebih cepat pulih di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara memiliki sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan perdagangan. Pemerintah daerah mungkin juga lebih aktif dalam menciptakan program-program kerja yang berfokus pada sektor-sektor ini.

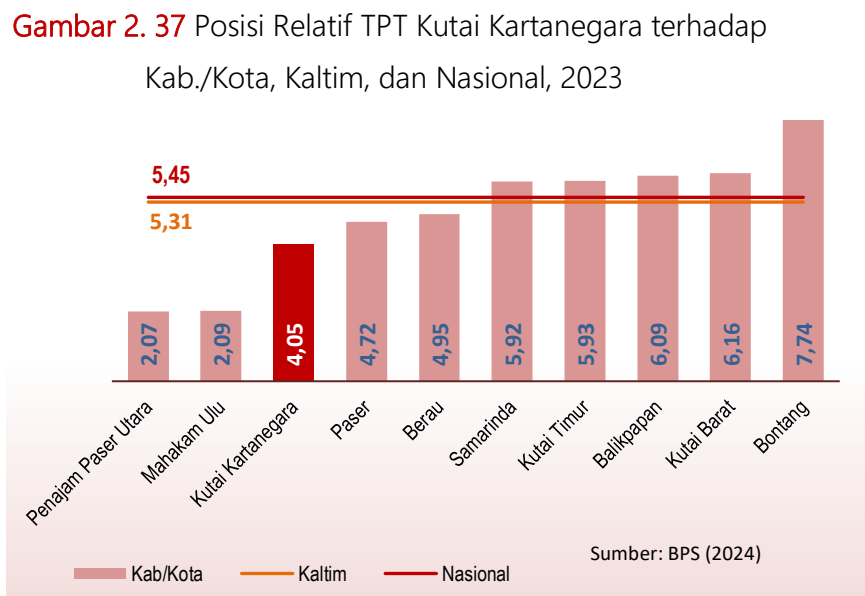
Proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan beton dapat mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2023. Infrastruktur adalah salah satu sektor yang sangat berpotensi dalam menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, pembangunan jalan beton tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga memiliki efek multiplier yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal secara keseluruhan seperti (1) peningkatan mobilitas yang lebih baik dan lebih efisien dan distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, dan industri lokal, dan (2) Akses yang Lebih baik Infrastruktur jalan yang baik membuka akses lebih baik ke daerah-daerah terpencil atau belum berkembang, mempermudah akses ke pasar, dan menciptakan peluang ekonomi baru, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Gambar 2. 36. Relevansi Perkembangan TPT Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023



Sumber: BPS (2024)

Sementara jika dipotret dari sisi posisi relatif, Kutai Kartanegara (TPT: 4,05) berada posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Paser Utara dan Mahakam Ulu. Meskipun ada kabupaten lain dengan TPT lebih rendah (seperti Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu), Kutai Kartanegara memiliki posisi yang cukup baik dalam konteks pengangguran terbuka di Kaltim.



3) Pengurangan Kesenjangan Ekonomi

Pengurangan kesenjangan ekonomi di Kutai Kartanegara digambarkan melalui indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (P0), tingkat kedalaman kemiskinan (P1), tingkat keparahan kemiskinan (P2), dan indeks gini ratio.

a) Gini Rasio

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Rentang nilai Gini Ratio yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai Indeks Gini adalah 0 artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika rasio gini bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

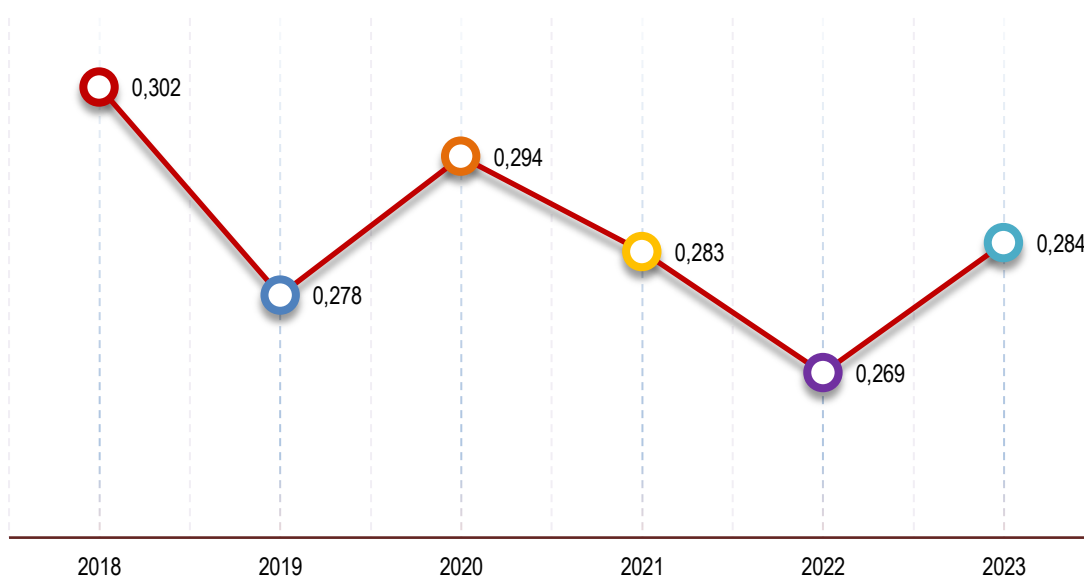
Berdasarkan catatan BPS (2024), nilai gini rasio di Kabupaten Kutai Kartanegara berkisar antara 0,269 hingga 0,302 dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut relatif sedang. Nilai gini rasio sekitar 0,3 bisa dikategorikan sebagai ketimpangan sedang menurut standar internasional, meskipun masih jauh dari nilai 0,5 atau lebih yang mengindikasikan ketimpangan yang tinggi.

Penurunan yang cukup konsisten hingga 2022 mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang dapat berasal dari peningkatan akses pendidikan, infrastruktur, atau program sosial ekonomi yang mengarah pada pengurangan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Kenaikan gini rasio pada 2020 dan 2023 bisa dipengaruhi oleh krisis ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Kelompok pendapatan rendah kemungkinan lebih terdampak dalam hal kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sementara mereka yang berada di kelas menengah atau atas mungkin lebih mampu bertahan atau bahkan memperoleh keuntungan dari perubahan ekonomi (misalnya, dari sektor yang lebih terproteksi seperti teknologi atau sektor formal yang lebih stabil).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan gini rasio pada 2020 dan 2023, seperti dampak pandemi dan perubahan struktural dalam perekonomian. Selain itu, inovasi dalam kebijakan redistribusi pendapatan dan penguatan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpendapatan rendah akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan dan melanjutkan tren penurunan ketimpangan pendapatan.

Gambar 2. 38. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2023

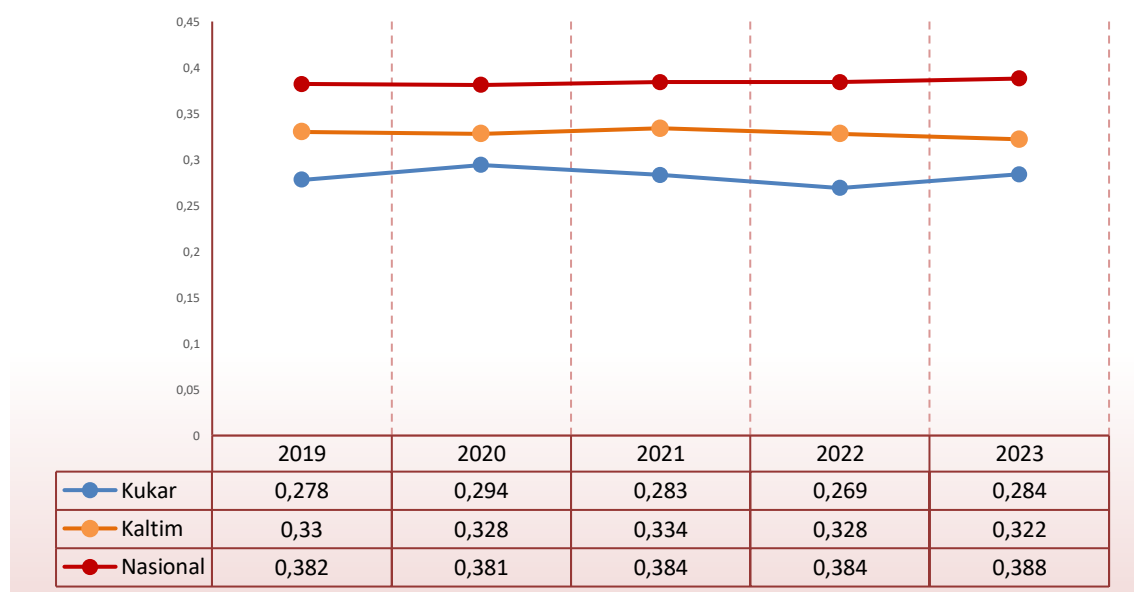


Sumber: BPS (2024)

Ketimpangan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan Kaltim dan Nasional, yang menunjukkan bahwa Kukar berhasil lebih baik dalam mengelola distribusi pendapatan. Hal ini tercermin dari nilai gini rasio Kukar yang lebih rendah dan tren penurunan yang stabil sejak 2019.

Kaltim dan Nasional memiliki ketimpangan yang lebih tinggi, dengan fluktuasi yang lebih sedikit dalam nilai gini rasio mereka. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi ketimpangan, tantangan dalam pemerataan pendapatan di tingkat provinsi dan nasional masih tetap besar.

Gambar 2. 39. Relevansi gini rasio Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2019-2023



Sumber: BPS (2024)

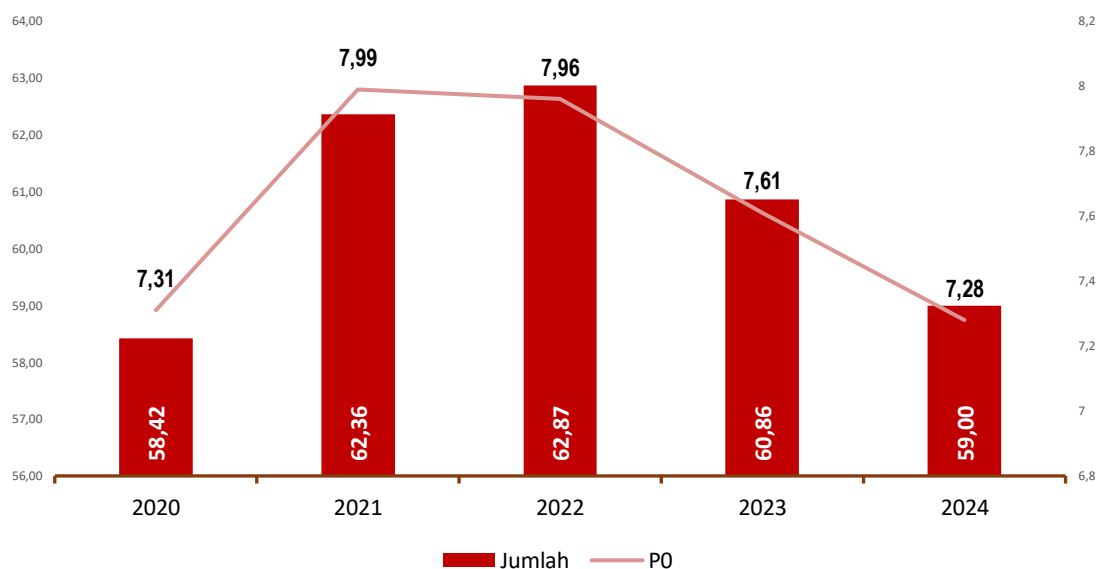
b) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat hingga 62,87 ribu orang pada 2022 namun sedikit menurun pada 2023 menjadi 60,86 ribu orang. Kenaikan terbesar terjadi antara 2020-2021, dengan penurunan mulai terlihat pada tahun 2023. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada 2022 terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung pada 2020-2021. Meskipun pandemi mulai mereda pada tahun

2022, dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih terasa, khususnya di kalangan kelompok rentan yang sebelumnya sudah berada dalam garis kemiskinan atau rawan miskin. Pemulihan ekonomi yang lambat dan penurunan daya beli masyarakat selama beberapa tahun pasca-pandemi menjadi faktor utama yang memengaruhi kenaikan angka kemiskinan pada 2022.

Persentase penduduk miskin (P_0) meningkat secara signifikan antara 2020-2021, namun mengalami penurunan sedikit pada 2022 - 2024. Pada 2024, persentase penduduk miskin berada pada 7,28%, lebih rendah dibandingkan dengan 7,61% pada 2023. Meskipun ada kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun awal, tren perbaikan terlihat pada tahun 2022 - 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin yang lebih moderat pada 2024 menunjukkan adanya upaya pengentasan kemiskinan yang mulai membuahkan hasil setelah periode pandemi Covid 19, meskipun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan.

Gambar 2. 40. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0) Kutai Kartanegara, 2019-2024

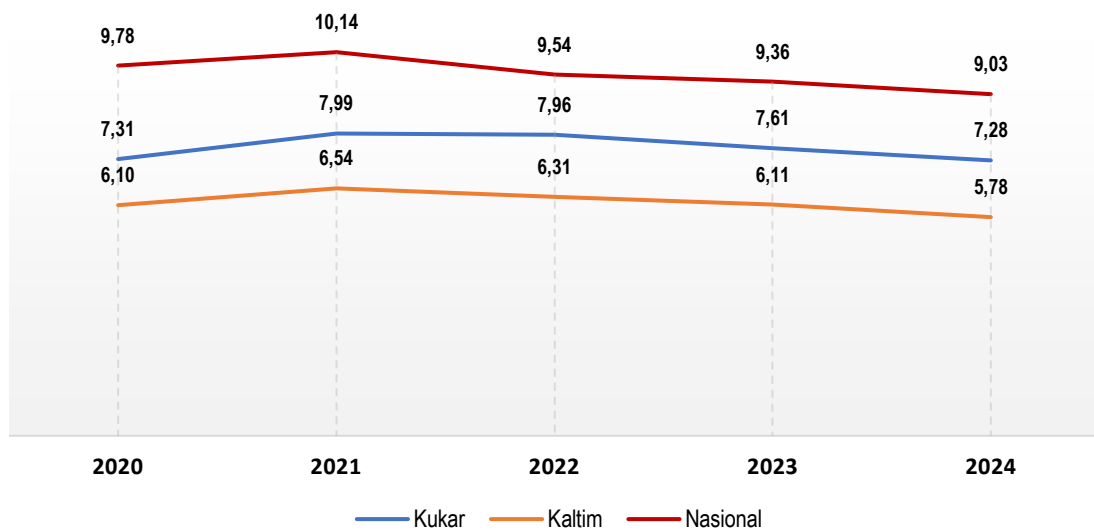


Sumber: BPS

Relevansi perkembangan P_0 terhadap Kaltim dan Nasional, Kukar menunjukkan kenaikan persentase kemiskinan yang cukup signifikan pada tahun 2020–2021, tetapi mulai mengalami penurunan pada 2022-2024. Meskipun penurunan ini tidak terlalu besar, ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah pandemi. Kaltim

memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah dari Kukar, dengan tren penurunan yang lebih stabil pada 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di tingkat provinsi sudah sedikit lebih terkendali. Nasional masih memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi dari Kaltim dan Kukar, namun tren penurunan yang stabil juga terlihat, meskipun penurunan ini lebih lambat dibandingkan dengan Kaltim dan Kukar dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2. 41. Relevansi Perkembangan P_0 Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional



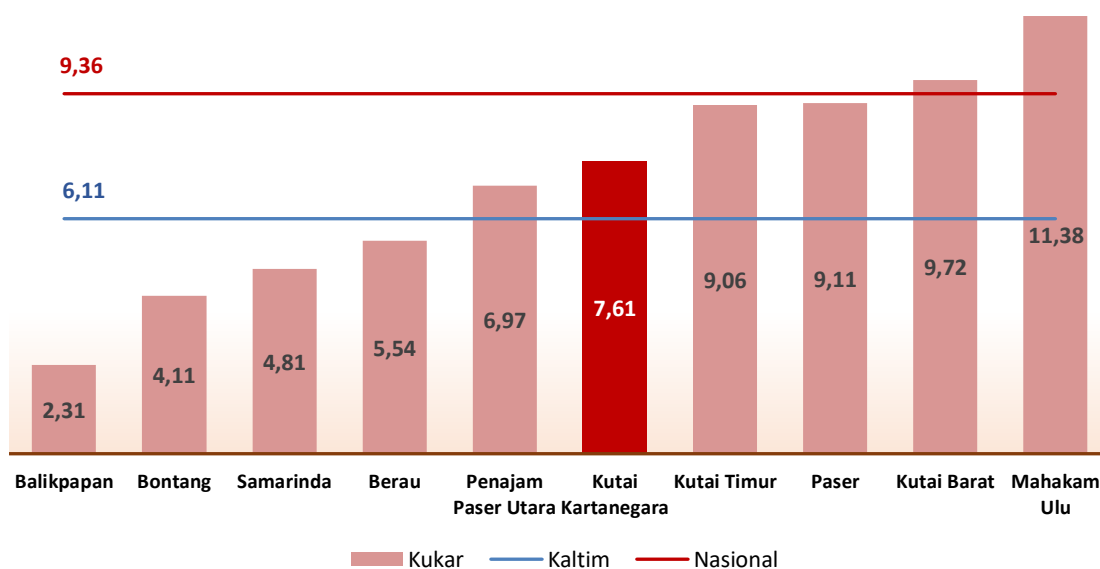
Sumber: BPS

Konteks posisi relatif, Kukar memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah daripada beberapa kabupaten dengan kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Kutai Timur (9,06%), Paser (9,11%), Kutai Barat (9,72%), dan Mahakam Ulu (11,38%) tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota besar di Kaltim seperti Balikpapan (2,31%), Bontang (4,11%), dan Samarinda (4,81%). Hal ini bisa dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor tertentu, seperti sektor energi dan sumber daya alam, yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Kukar perlu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar seperti sumber daya alam. Pemberdayaan sektor ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, bisa menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan. Memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan,

dan infrastruktur dasar di kawasan pedesaan di Kukar dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Program-program yang berfokus pada pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kukar.

Gambar 2. 42. Posisi Relatif P0 Kutai Kartanegara, 2023



Sumber: BPS

c) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)

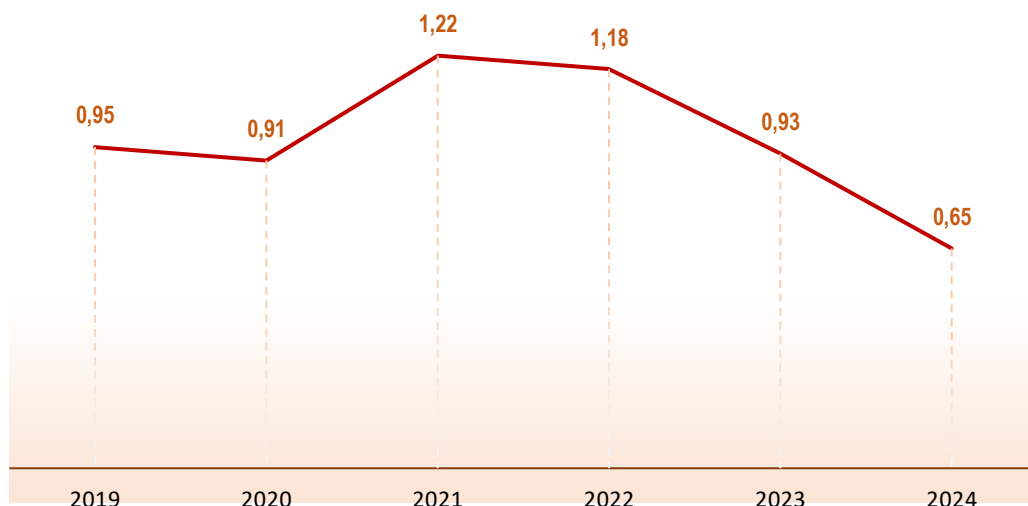
Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur seberapa dalam tingkat kemiskinan seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan. P_1 dihitung dengan melihat jarak antara pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P_1 , semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin tersebut. Sebaliknya, semakin rendah P_1 , semakin mendekati pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019, P_1 berada di angka 0,95 dan turun menjadi 0,91 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kutai Kartanegara sedikit lebih dangkal pada 2020, artinya orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, ada sedikit peningkatan dalam pendapatan kelompok miskin.

Pada tahun 2021, P_1 naik menjadi 1,22, yang menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan meningkat. Ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi akibat dari covid 19 yang menyebabkan pendapatan kelompok miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Di tahun 2022, P_1 kembali turun sedikit menjadi 1,18. Walaupun masih lebih tinggi dari tahun 2019 dan 2020, penurunan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam kondisi ekonomi kelompok miskin dibandingkan dengan tahun 2021.

Pada tahun 2023, P_1 kembali turun menjadi 0,91, angka yang sama dengan tahun 2020. Tahun 2024 turun lagi menjadi 0,65. Penurunan ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kutai Kartanegara semakin dangkal, yang berarti kondisi ekonomi masyarakat miskin mulai membaik kembali setelah mengalami peningkatan kedalaman kemiskinan pada tahun 2021.

Gambar 2. 43 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kutai Kartanegara, 2019-2024



Sumber: BPS

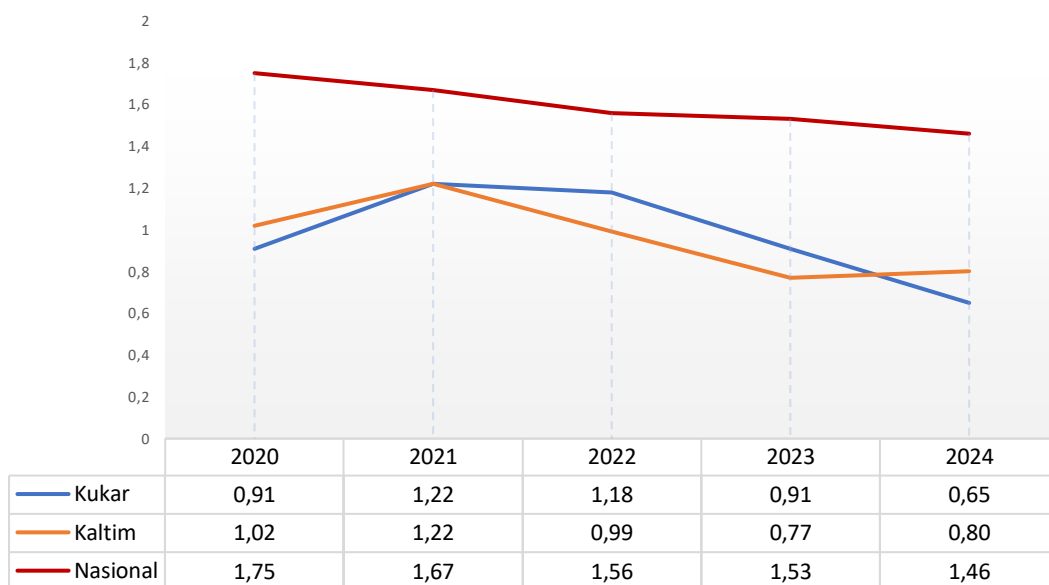
Relevansi perkembangan P_1 Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur, berdasarkan data BPS, dari tahun 2020 hingga 2024, Kukar dan Kaltim menunjukkan tren yang mirip dalam perkembangan P_1 . Peningkatan kedalaman kemiskinan terjadi pada tahun 2021, namun Kukar mengalami perbaikan yang lebih signifikan pada tahun 2024, kembali ke angka 0,65 lebih rendah dari P_1 Kaltim (0,80).

Sedangkan terhadap capaian Nasional, Secara keseluruhan, Kukar memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih dangkal dibandingkan nasional. Pada tahun 2024, kedalaman kemiskinan di Kukar (0,65) lebih baik dibandingkan dengan nasional (1,46).

Meskipun terjadi fluktuasi, Kukar berhasil mempertahankan kedalaman kemiskinan yang lebih rendah daripada angka nasional.

Berdasarkan data tersebut, tren pemulihan lebih cepat di Kukar dan Kaltim. Baik Kukar maupun Kaltim menunjukkan pemulihan yang lebih cepat pasca-2021, dengan penurunan yang signifikan pada 2024.

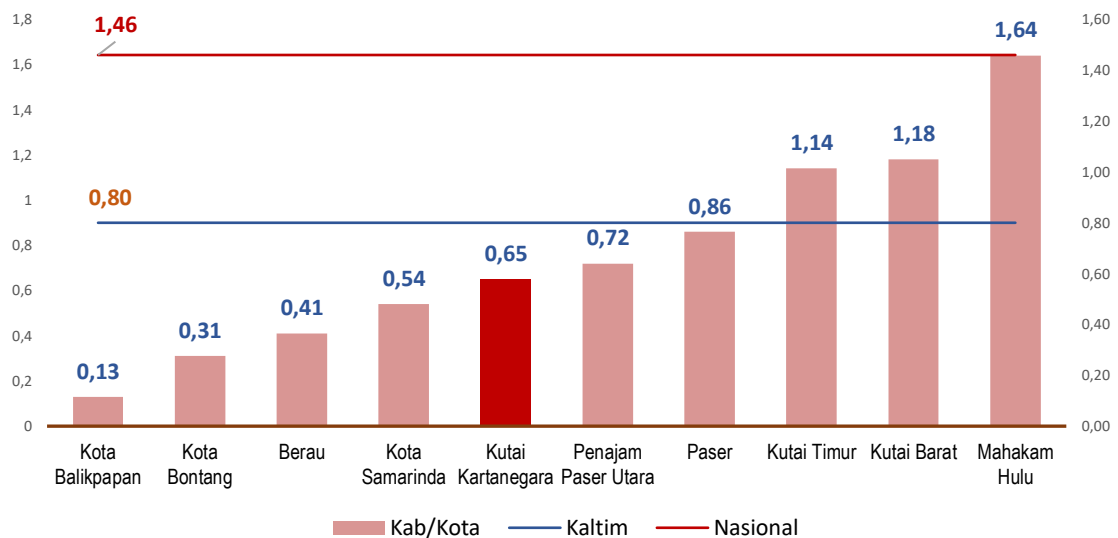
Gambar 2. 44. Relevansi Perkembangan Tingkat Kedalaman (P_1) Kutai Kartanegara terhadap Kalimantan Timur dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS

Posisi relatif Kutai Kartanegara terhadap kabupaten/kota berada di posisi menengah dalam hal kedalaman kemiskinan di Kaltim. Nilai P_1 (0,65) Kukar berada ditengah diantara Kab/Kota menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan, tetapi tidak seburuk beberapa kabupaten lain di provinsi ini. Kabupaten dengan kedalaman kemiskinan yang paling dangkal adalah Berau (0,16%), sedangkan kabupaten dengan kedalaman kemiskinan paling dalam adalah Kutai Barat (1,29%). Kutai Kartanegara memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih baik dibandingkan dengan Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Mahakam Ulu, namun masih lebih tinggi daripada kota-kota besar seperti Balikpapan dan Bontang.

Gambar 2. 45. Posisi Relatif Indeks Kedalaman (P_1) Kutai Kartanegara terhadap Kab/Kota, 2024



Sumber: BPS

d) Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Pada tahun 2020, P_2 Kutai Kartanegara berada di angka 0,16%, dan pada tahun 2021, P_2 meningkat tajam menjadi 0,37%. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di antara kelompok miskin. Bisa jadi faktor-faktor seperti dampak pandemi COVID-19 atau kondisi ekonomi yang lebih sulit menyebabkan sebagian besar orang miskin semakin terpuruk, sementara sebagian lainnya masih tetap bertahan. Ketimpangan ini tercermin dalam P_2 yang lebih tinggi.

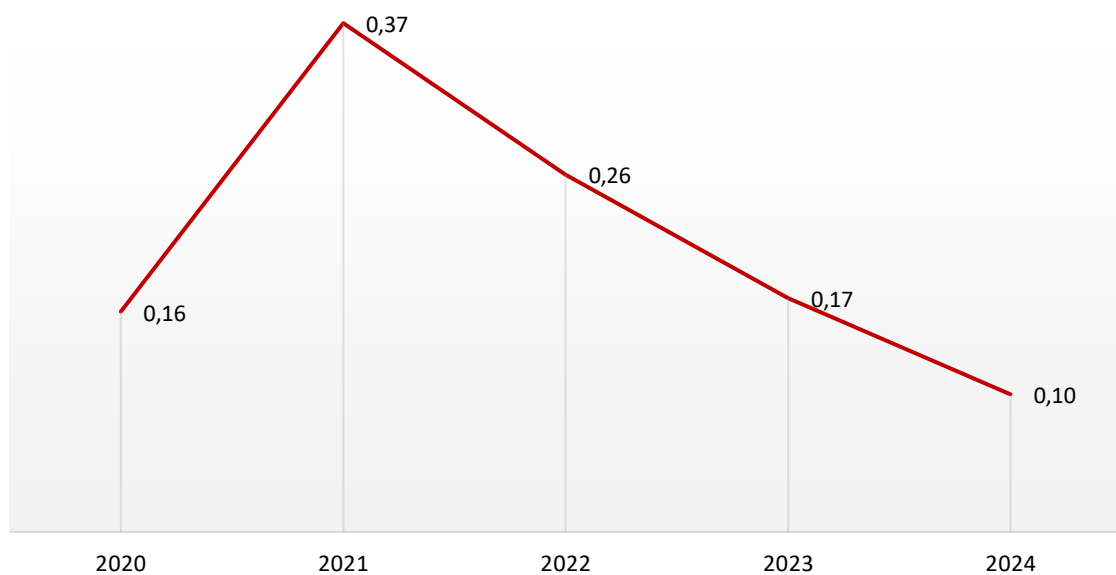
Pada tahun 2022, P_2 menurun kembali menjadi 0,26%. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan dan perbaikan kondisi ekonomi bagi kelompok miskin. Meskipun tidak kembali ke level tahun 2020, penurunan ini menunjukkan adanya upaya atau kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan di kalangan masyarakat miskin di Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2023, P_2 kembali turun menjadi 0,17%, yang hampir sama dengan angka tahun 2020. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di antara orang miskin semakin berkurang, dan kemiskinan menjadi lebih

merata. Ini bisa mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi yang lebih luas atau keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan yang lebih merata.

Berdasarkan data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa P_2 di Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perubahan ketimpangan pendapatan di kalangan kelompok miskin. Setelah mencapai puncaknya pada 2021, P_2 mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 hingga 2024, mengindikasikan adanya pengurangan ketimpangan kemiskinan. P_2 yang terendah tercatat pada tahun 2024 dengan angka 0,10%, yang menunjukkan bahwa ketimpangan di kalangan kelompok miskin menjadi lebih merata di tahun tersebut.

Gambar 2. 46. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: BPS

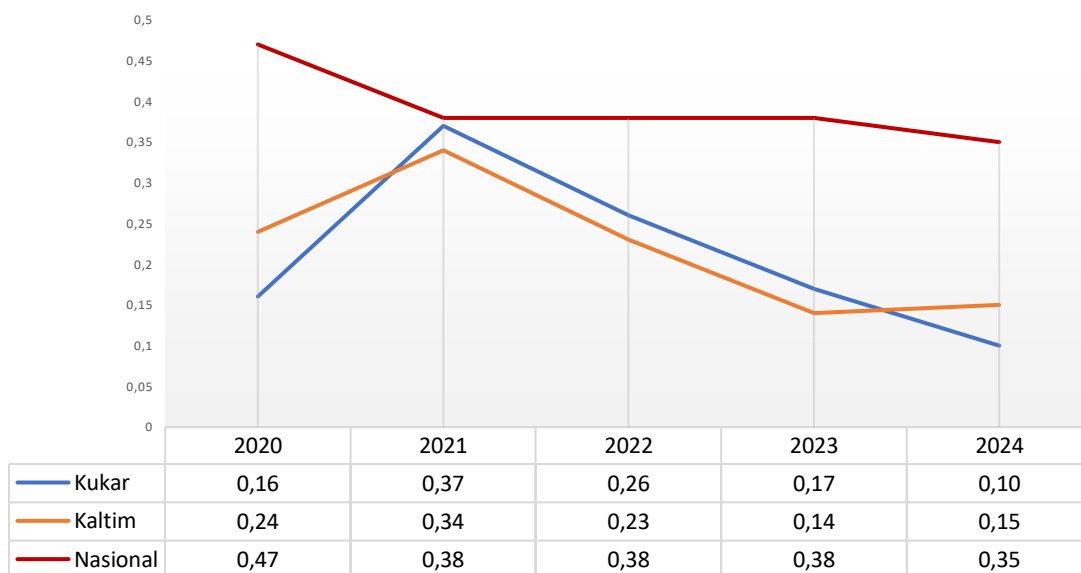
Fluktuasi P_2 ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang mungkin menyebabkan sebagian kelompok miskin lebih menderita, meningkatkan ketimpangan pendapatan. Penurunan P_2 yang signifikan pada tahun 2022 - 2024 mencerminkan adanya kebijakan atau intervensi yang berhasil mengurangi ketimpangan di kalangan orang miskin, seperti bantuan sosial, program peningkatan keterampilan, atau kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Pembelajaran yang baik yaitu tren penurunan P_2 yang berkelanjutan menuju

angka yang lebih rendah pada 2024 menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan kemiskinan di Kutai Kartanegara cenderung membaik. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Relevansi perkembangan P_2 Kutai Kartanegara terhadap capaian Kaltim dan Nasional: Pada 2020, Kukar memiliki indeks P_2 yang lebih rendah (0,16) dibandingkan dengan Kaltim (0,24) dan Nasional (0,47), yang berarti kondisi kemiskinan di Kukar relatif lebih baik.

Perkembangan tahun 2020, P_2 Kukar mengalami kenaikan signifikan (menjadi 0,37) lebih laju dibanding Kaltim (0,34) namun masih lebih rendah dari Nasional (0,38). Kenaikan tajam pada 2021 menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kukar lebih rentan terhadap dampak pandemi dibandingkan dengan Kaltim dan Nasional. Setelah 2021, Kukar menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan penurunan angka P_2 hingga 2024 (0,10), lebih rendah dibanding Kaltim (0,15) dan Nasional (0,35).

Gambar 2. 47. Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS

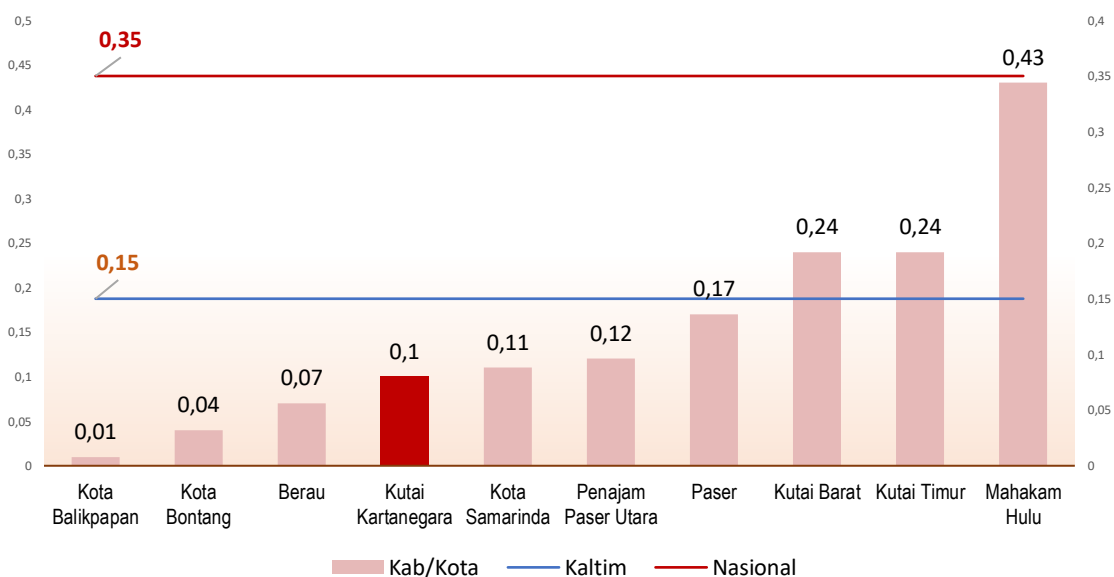
Dari posisi relatif, dengan angka P_2 0,17, Kukar memiliki posisi lebih baik dibandingkan dengan Paser (0,19), Kutai Barat (0,23), dan Kutai Timur (0,28). Hal ini menunjukkan bahwa Kukar relatif lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dan

kerentanannya terhadap kemiskinan dibandingkan beberapa daerah lainnya yang lebih besar atau lebih terpencil.

Kukar berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim. P_2 Kukar lebih rendah daripada Samarinda (0,16) dan Penajam Paser Utara (0,14), namun lebih tinggi daripada Berau, Balikpapan, dan Bontang, yang memiliki angka P_2 jauh lebih rendah.

Meskipun Kukar memiliki P_2 yang lebih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten seperti Paser, Kutai Barat, dan Kutai Timur, Kukar masih memiliki posisi lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan kota-kota besar seperti Berau, Balikpapan, dan Bontang, yang menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengurangi kerentanan kemiskinan.

Gambar 2. 48. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kutai Kartanegara terhadap Kabupaten/Kota, 2024



Sumber: BPS

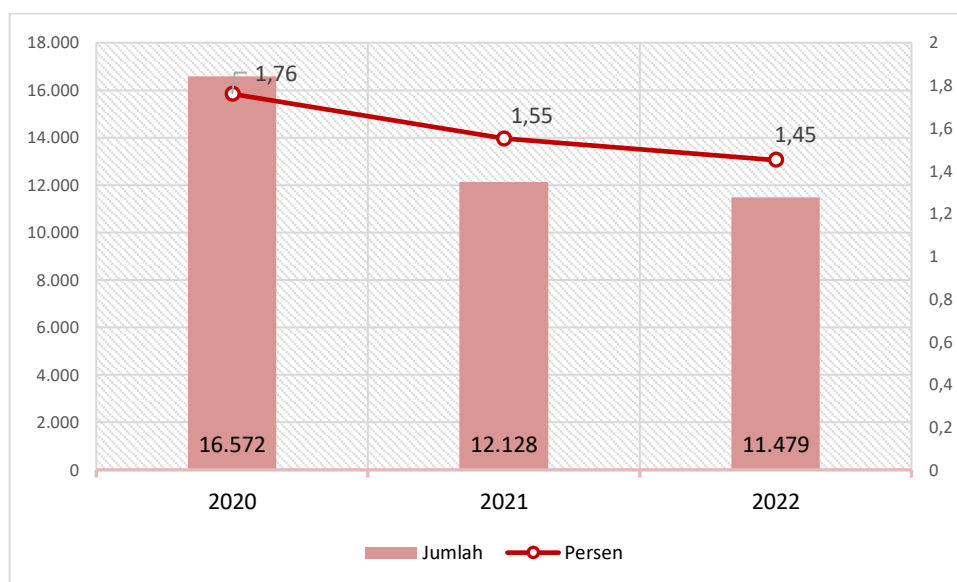
e) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk

miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP Purchasing Power Parity (PPP). PPP adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) Kutai Kartanegara (2023), jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami trend penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin ekstrem di Kutai Kartanegara mencapai 16,572 jiwa (1.76%), mengalami penurunan pada 2020 dan 2021, masing-masing 12.128 (1,55%) dan 11.479 (1.49%).

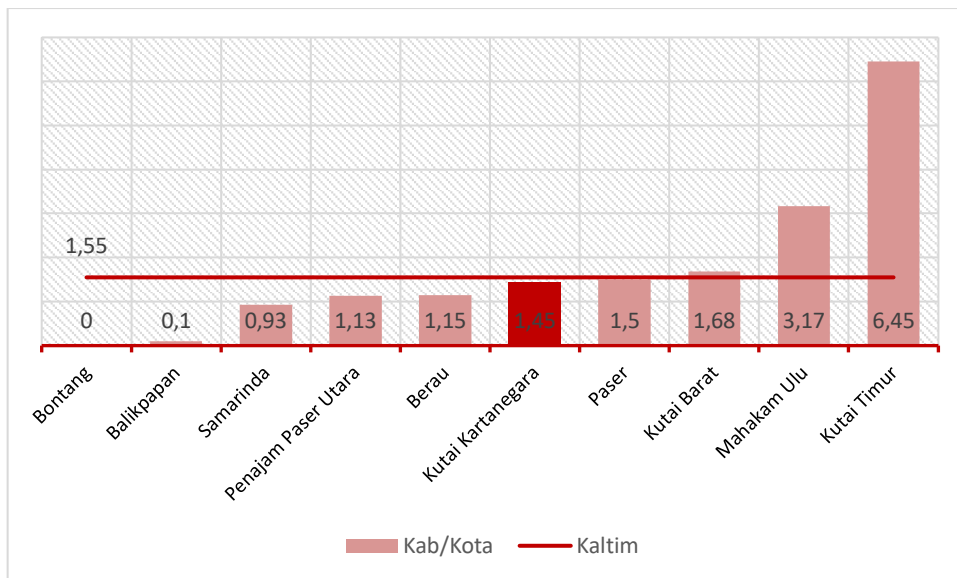
Gambar 2. 49. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kutai Kartanegara, 2020-2022



Sumber: TKPK Kab. Kutai Kartanegara, 2023.

Jika dilihat posisi relatif, persentase penduduk miskin Kutai Kartanegara lebih rendah dibanding rata-rata kemiskinan ekstrim, dan berada pada posisi keenam terendah di antara sepuluh kabupaten/kota.

Gambar 2. 50. Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Ektrem Kutai Kartanegara terhadap Kaltim dan Kab/Kota, 2022



Sumber: TKPK Kab. Kutai Kartanegara, 2023

2.2.3. Pembangunan Keluarga

Berdasarkan Perpres No. 153 Tahun 2014 Pasal 7 bahwa untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni dilakukan melalui:

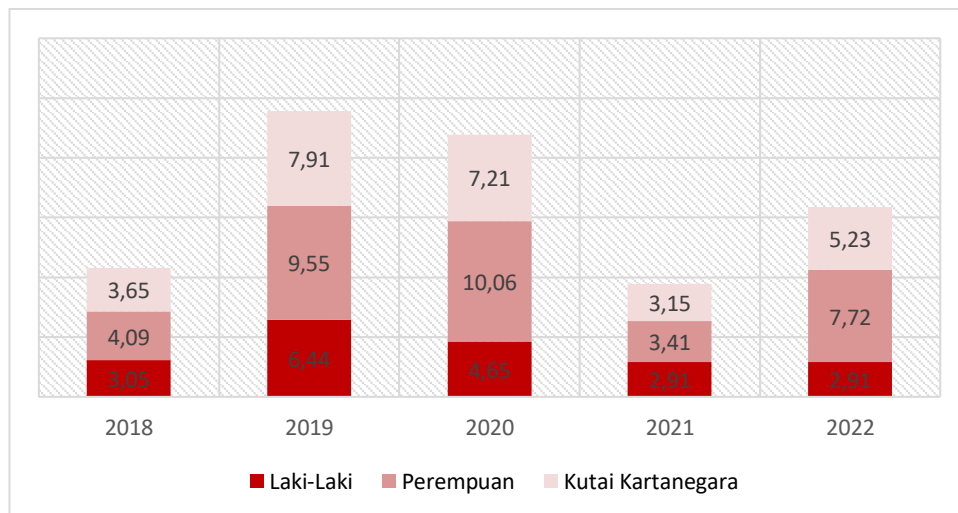
- pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
- pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Keempat arah pembangunan keluarga tersebut dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga. Selanjutnya rekayasa sosial keluarga dilakukan melalui: (a) penataan struktur keluarga; (b) penguatan relasi sosial keluarga; (c) pengembangan transformasi sosial keluarga; dan (d) perluasan jaringan sosial keluarga.

Selama lima tahun terakhir tingkat perceraian di Kutai Kartanegara tergolong tinggi. Pada tahun 2021 persentase perceraian di Kutai Kartanegara sebesar 3,15% meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,23%. Masih tingginya tingkat perceraian menggambarkan jika pembanguna keluarga yang tangguh masih menempuh jalan

panjang. Berdasarkan jenis kelamin, persentase perceraian yang dilakukan oleh perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

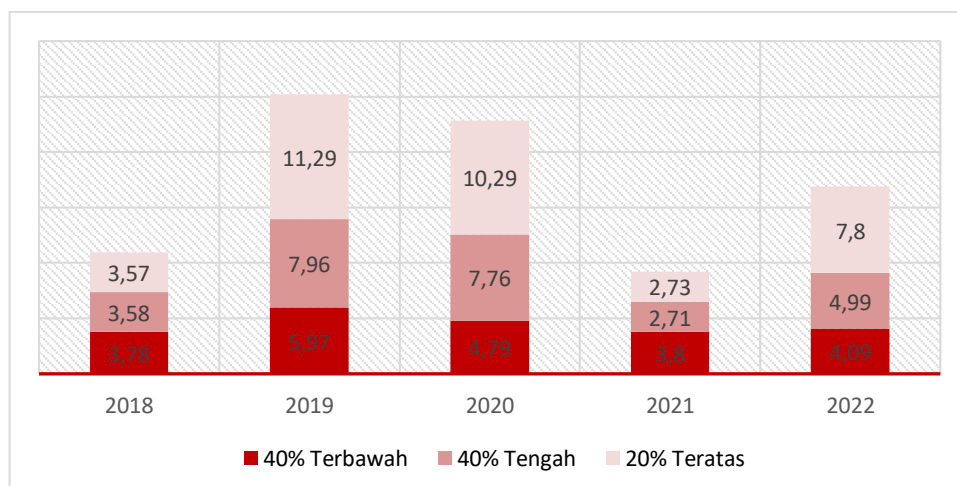
Gambar 2. 51. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara, 2018-2022



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2018-2022.

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, lebih banyak perceraian terjadi pada kelompok pengeluaran 20% keatas.

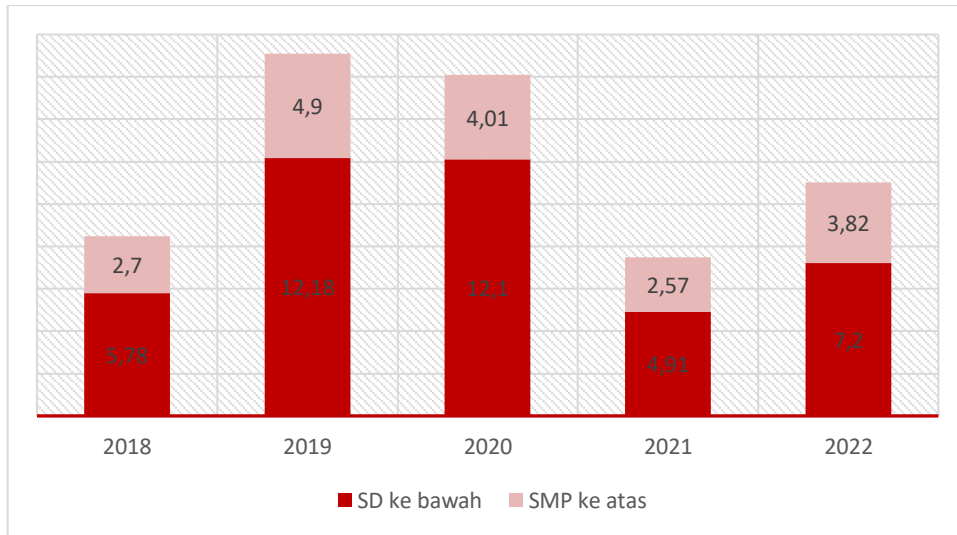
Gambar 2. 52. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara berdasarkan Kelompok Pengeluaran, 2018-2022



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2018-2022

Berdasarkan pendidikan, kasus perceraian terjadi paling banyak pada kelompok pendidikan SD kebawah.

Gambar 2. 53. Perkembangan Persentase Perceraian di Kutai Kartanegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018-2022



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2018-2022

Indikator selanjutnya untuk melihat pembangunan keluarga adalah terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebanyak 52 kasus dan pada 2022 sebanyak 22 kasus dengan rata-rata penurunan sebesar 27,8%.

Tabel 2. 17. Perkembangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kutai Kartanegara Menurut Bentuk

BENTUK KEKERASAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan Fisik	13	4	5	0	0
Kekerasan Seksual	3	2	2	3	1
Psikis	13	6	5	0	0
Penelantaran	11	3	3	9	0
Traficking	0	0	0	0	3
Eksplorasi	0	0	0	0	0
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	2	2	2	3
Lainnya	7	11	10	9	15
Jumlah	52	28	27	23	22

2.2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Perpres 153 Tahun 2014 Pasal 8 menyebutkan bahwa untuk penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan dengan:

- a. pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
- e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan melalui strategi:

- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Masalah kependudukan klasik di Indonesia, selain jumlah penduduk yang besar, adalah persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar pulau, provinsi maupun antar desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa terjadi disparitas penduduk. Pada 2021, terbanyak di Kecamatan Tenggarong (14,52%), sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Wis (1,28%).

Terkait mobilitas, pada tahun 2020 tercatat penduduk dari daerah lain yang masuk ke Kutai Kartanegara (migrasi masuk) adalah 15.507 jiwa. Migrasi masuk ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 8.171 jiwa, sisanya 7.336 adalah perempuan. Sedangkan di tahun yang sama, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang bermigrasi keluar adalah 17.797 jiwa. Dari kedua indikator ini didapatkan bahwa migrasi netto Kabupaten Kutai Kartanegara adalah -2.290 jiwa dimana ditemukan lebih banyak penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang bermigrasi keluar dari pada penduduk Kota atau Kabupaten lain yang masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara.

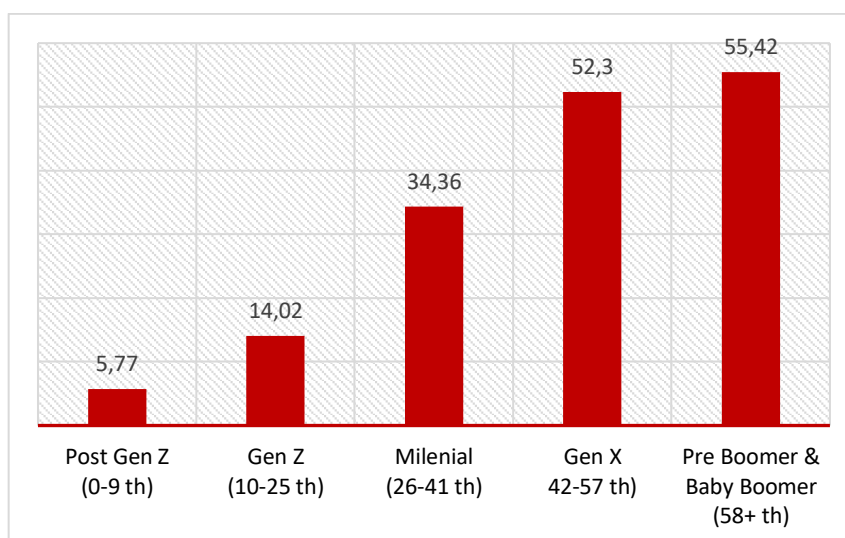
Tabel 2. 18. Migrasi Masuk Keluar Bersih Kutai Kartanegara, 2019-2020

Migrasi	2019			2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Migrasi Masuk	11.288	9.911	21.199	8.171	7.336	15.507
Migrasi Keluar	11.783	10.510	22.293	9.458	8.339	17.797
Migrasi Bersih	-495	-599	-1.094	-1.287	-1.003	-2.290

Sumber: Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara, 2021

Berdasarkan hasil LF SP 2020, dari 100 penduduk generasi *baby boomer & pre boomer* di Kutai Kartanegara, 55 orang diantaranya merupakan migran seumur hidup, artinya tempat lahir mereka bukan di Kutai Kartanegara. Orang tua yang dulunya perantau dari luar Kutai Kartanegara dan kini sudah menetap di Kutai Kartanegara.

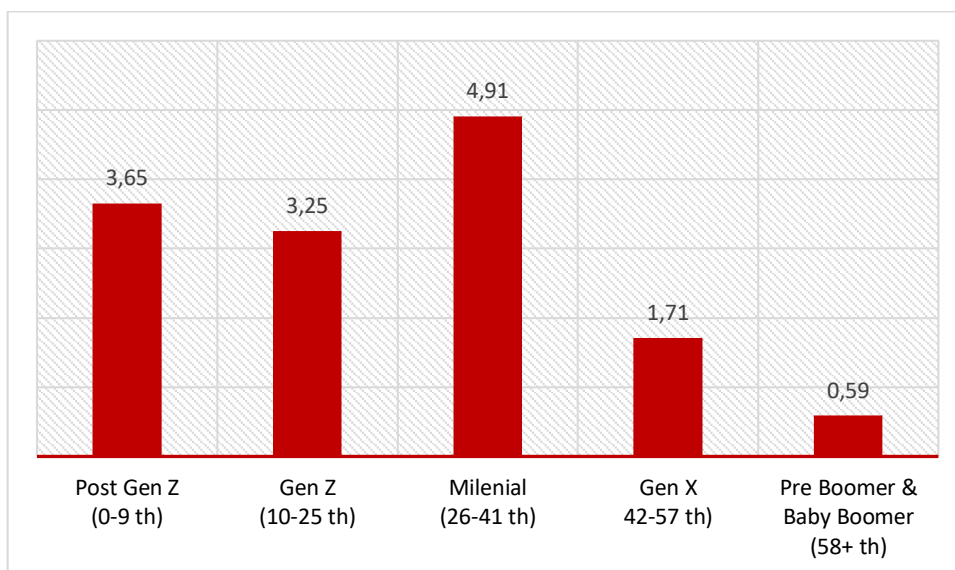
Gambar 2. 54. Persentase Migran Seumur Hidup di Kutai Kartanegara Menurut Generasi, 2020



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2023

Sedangkan penduduk di Kutai Kartanegara yang berstatus migran risen terbesar terdapat pada generasi milenial. Berdasarkan hasil LF SP 2020, dari 100 penduduk generasi milenial di Kutai Kartanegara, 5 orang di antaranya merupakan migran risen, artinya tempat tinggal mereka pada 5 tahun yang lalu bukan di Kutai Kartanegara.

Gambar 2. 55. Persentase Migran Risen di Kutai Kartanegara Menurut Generasi, 2020



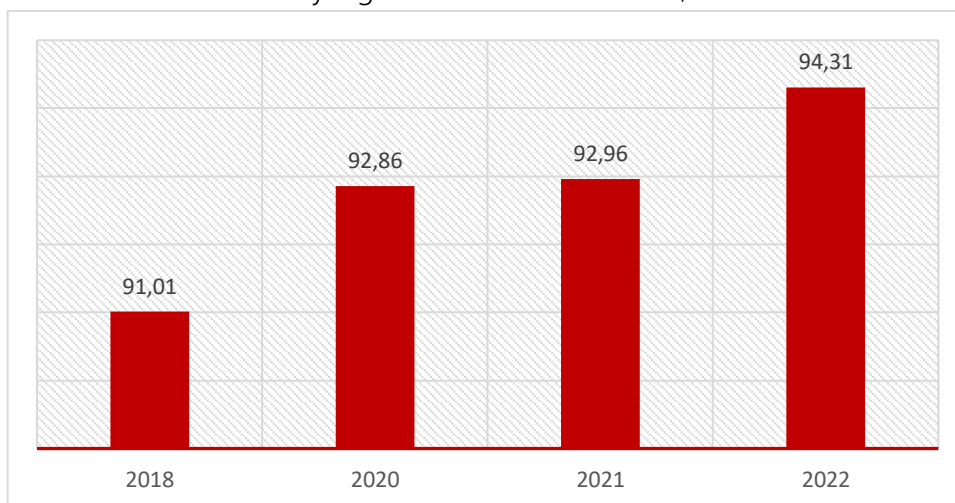
Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2023

2.2.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Merujuk Perpres 153 Tahun 2014 Pasal 9, penataan administrasi kependudukan dilakukan melalui: (a) penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan (b) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Persentase penduduk Kutai Kartanegara yang memiliki akta kelahiran selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 sebesar 91.31%, pada tahun 2022 menjadi 94.31%.

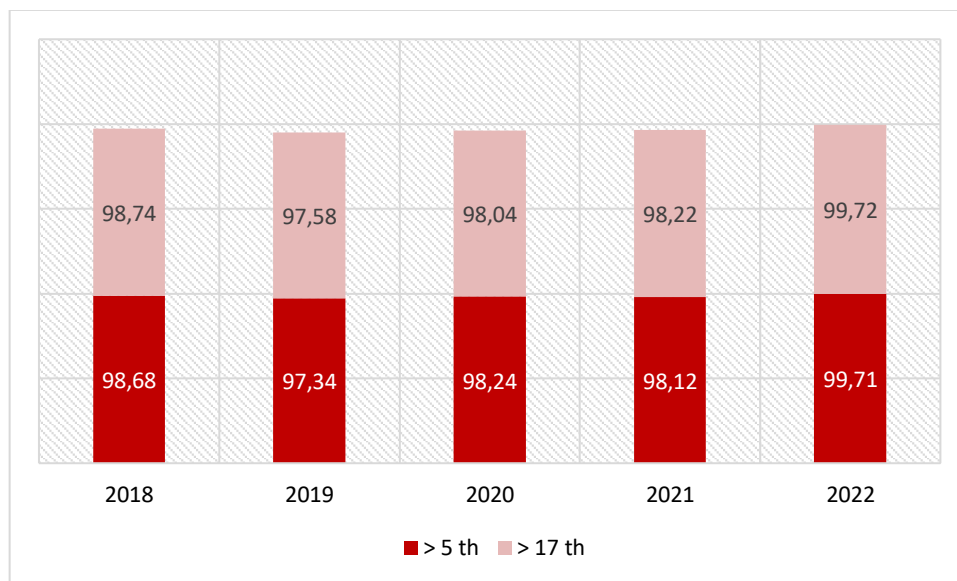
Gambar 2. 56. Perkembangan Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2018; 2020; 2021; 2022.

Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga mengalami peningkatan setiap tahun selama kurun waktu empat tahun terakhir baik pada kelompok usia >5 tahun dan >17 tahun. Pada tahun 2022, masing-masing telah mencapai 99,71% dan 99,72%.

Gambar 2. 57. Perkembangan Persentase Penduduk Yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur Kutai Kartanegara, 2018-2022

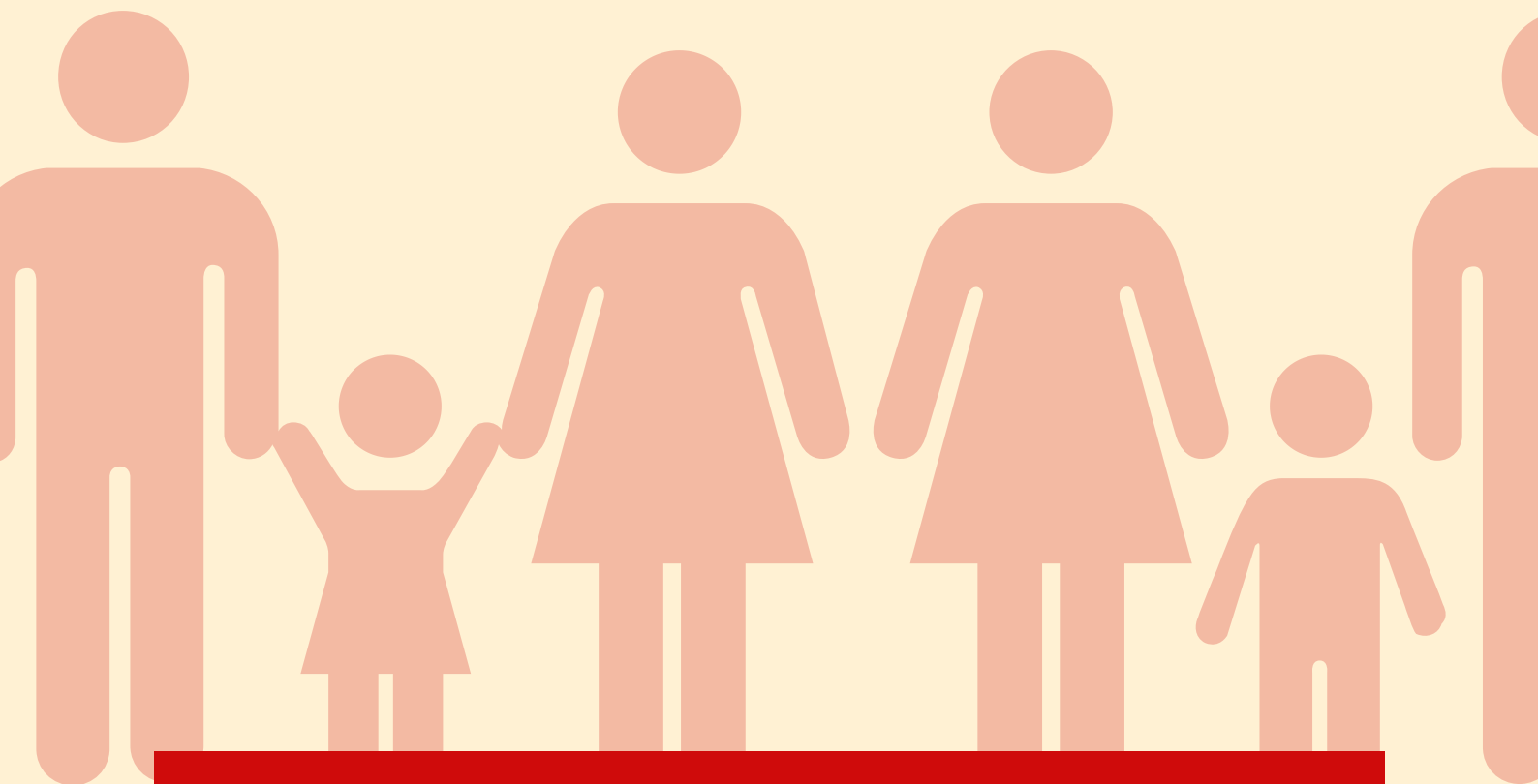


Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022.

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri berdasarkan data dan informasi kependudukan pada tahun 2021 berjumlah 741.950 Jiwa. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2021 mencapai 98,28% yang menunjukkan bahwa hampir setiap penduduk ber usia 17 Tahun keatas atau wajib KTP; telah terdaftar dan memiliki KTP elektronik. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 mencapai 44,40%. Demikian juga dengan presentasi kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun, pada tahun 2021 mencapai 94,80%.

BAB 3

PROYEKSI & KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

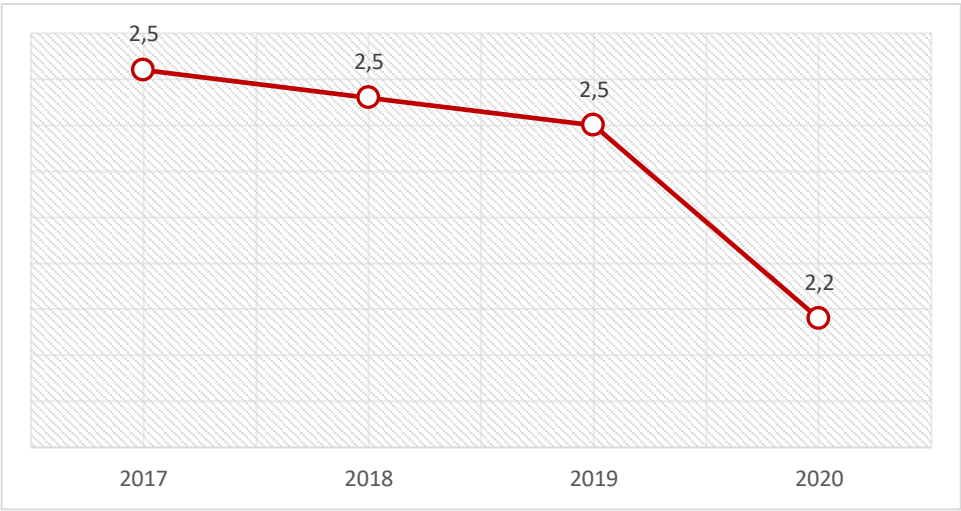


3.1. Proyeksi

3.1.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kependudukan yang diinginkan dalam jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang stabil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan. TFR Kutai Kartanegara pada 2020 masih diatas indikator, yaitu 2,2 per perempuan.

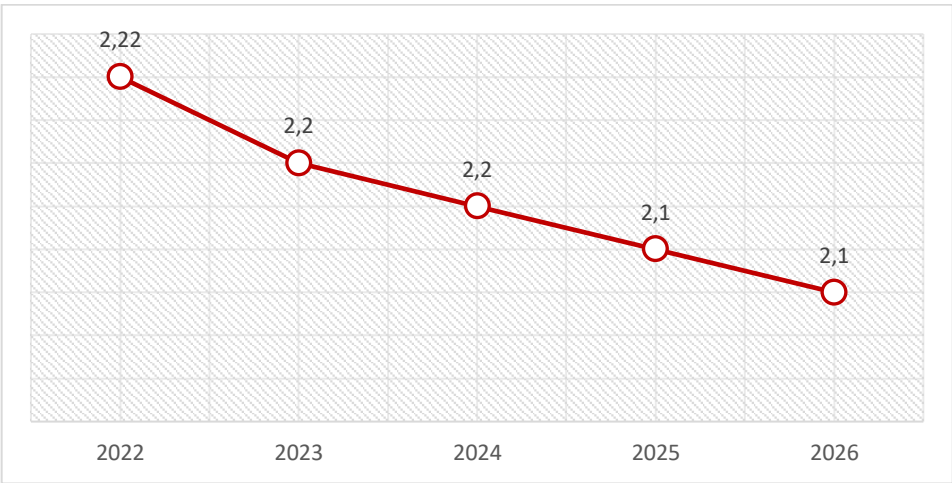
Gambar 3. 1. Perkembangan TFR Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017-2020



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

Dalam RPJMD 2021-2026, TFR sama dengan 2,1 diproyeksikan tercapai pada tahun 2025.

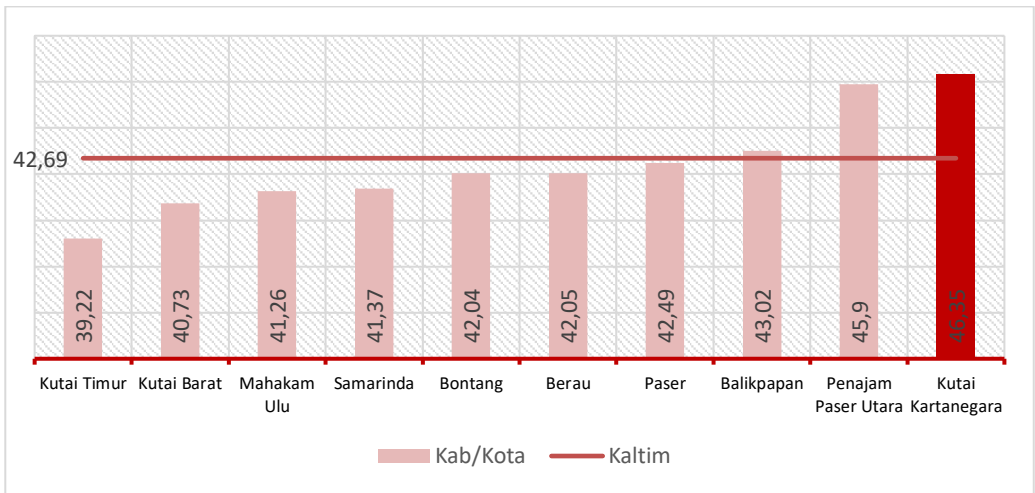
Gambar 3. 2. Proyeksi Perkembangan TFR Kutai Kartanegara, 2022-2026



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

Kondisi rasio ketergantungan penduduk diinginkan adalah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan penduduk usia produktif semakin banyak dibanding penduduk tidak produktif. Pada 2020, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 46,35%, artinya dalam setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 orang penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun). Angka tersebut merupakan tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Gambar 3. 3. Posisi Relatif IPG Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

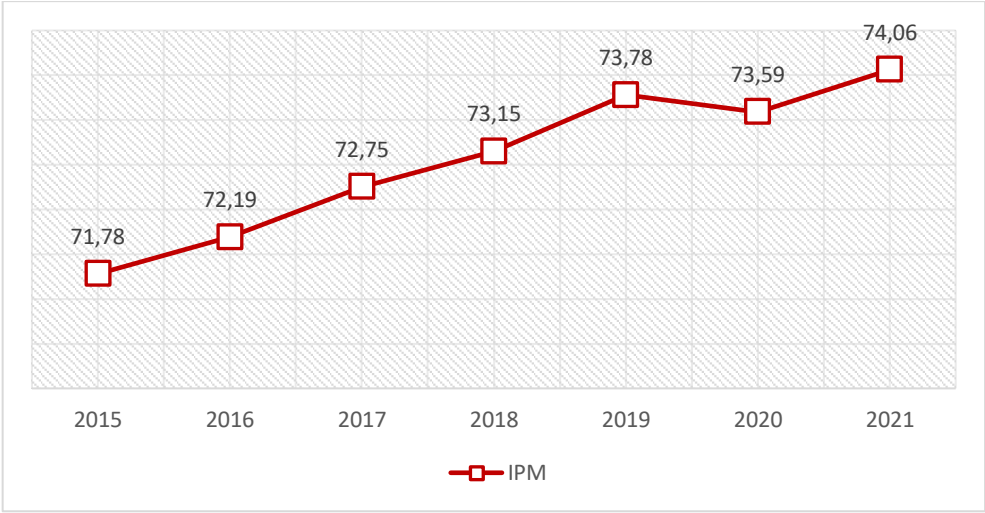
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2008 pasal 5 ayat 5, menyebutkan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan tentunya untuk mewujudkan manusia yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Untuk mewujudkannya, pembangunan kualitas penduduk di fokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan, serta standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2015-2020 semakin membaik, meskipun sedikit penurunan pada 2020. Penurunan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 10.720 ribu/kapita/tahun. Menurunnya daya beli masyarakat ini merupakan dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Tetapi pada 2021 kembali mengalami perbaikan.

Gambar 3. 4. Perkembangan IPM Kutai Kartanegara, 2015-2021



Sumber: BPS Kutai Kartanegara.

Tabel berikut menjelaskan perkembangan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara.

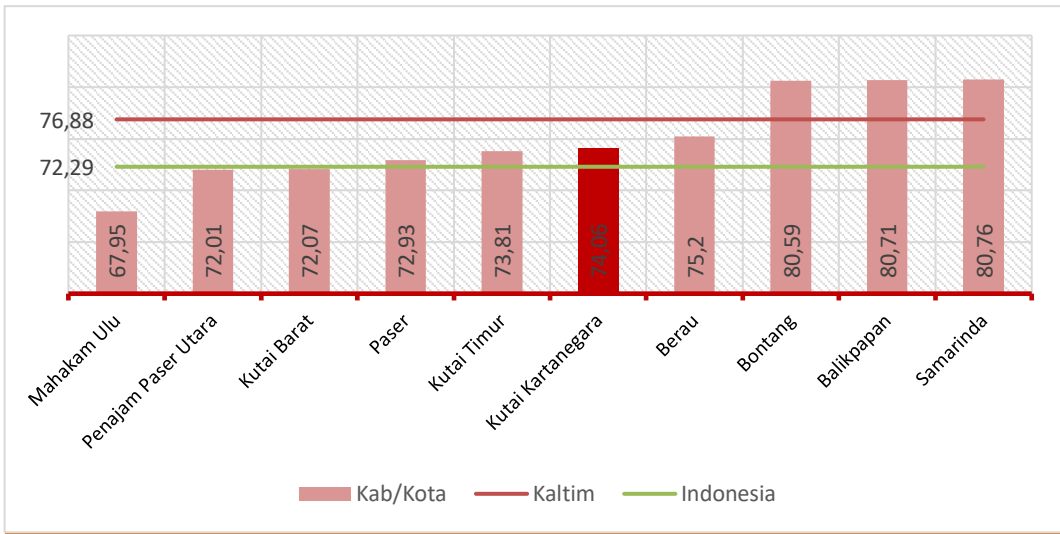
Tabel 3. 1. Perkembangan Komponen IPM Kutai Kartanegara 2015-2020

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,6	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,68	8,71	8,83	8,84	9,1	9,22
Pengeluaran Perkapita Rill Sehari Disesuaikan	10,25	10,593	10,692	10,959	11,152	10,72
IPM	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

IPM Kukar pada 2021 mencapai 74,06 masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,88, tetapi lebih tinggi dibanding IPM Indonesia sebesar 72,29. Jika dibandingkan dengan Kab/Kota di Kaltim, IPM Kutai Kartanegara berada di peringkat ke-5 (kelima).

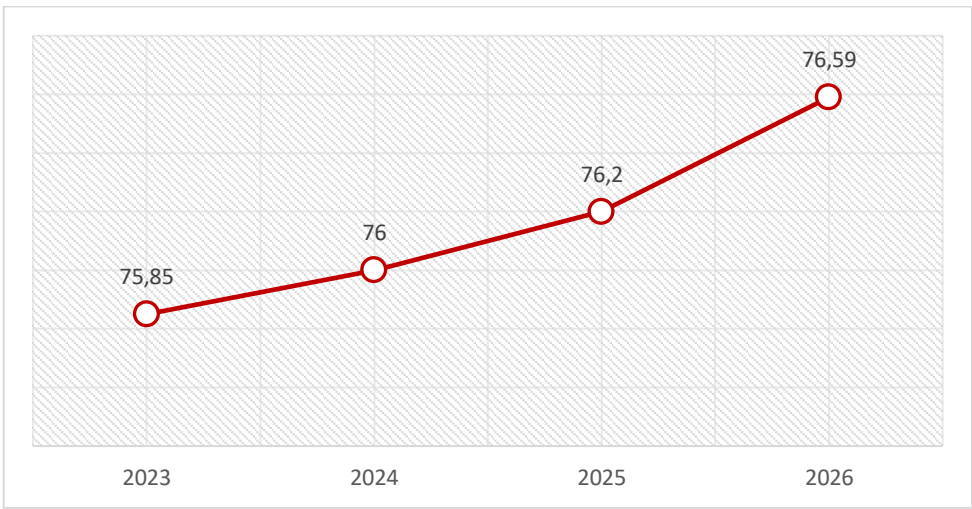
Gambar 3. 5. Posisi IPM Kukar terhadap Indonesia, Kaltim, dan Kab/Kota, 2021



Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur

Dalam RPJMD 2021-2026, IPM Kutai Kartanegara sebesar 76,59 diproyeksikan tercapai pada tahun 2026 seperti dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3. 6. Proyeksi Perkembangan IPM Kutai Kartanegara, 2023-2026

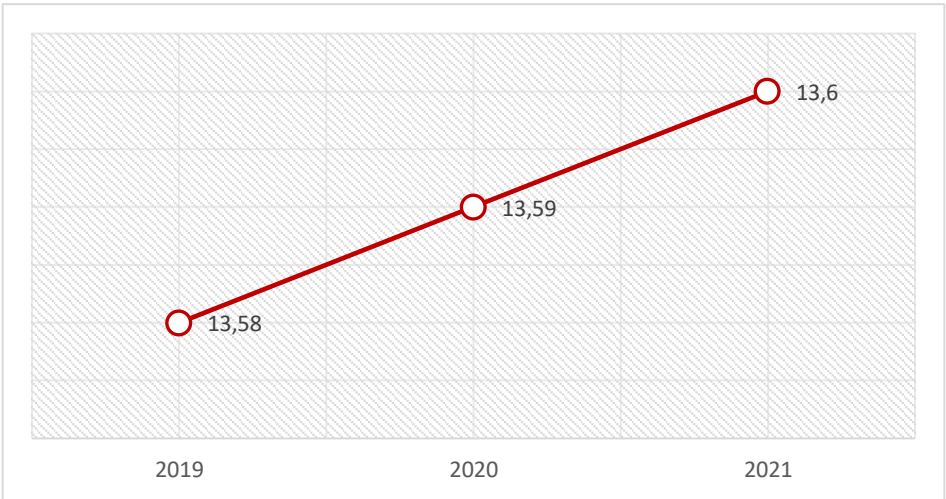


Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026.

a. Pendidikan

Kondisi pendidikan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang diinginkan, yakni tercapainya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berada diatas capaian Provinsi Kalimantan Timur. Harapan lama sekolah (HLS) / *Expected years of schooling (EYS)* menyajikan data mengenai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2021 mencapai 13,60.

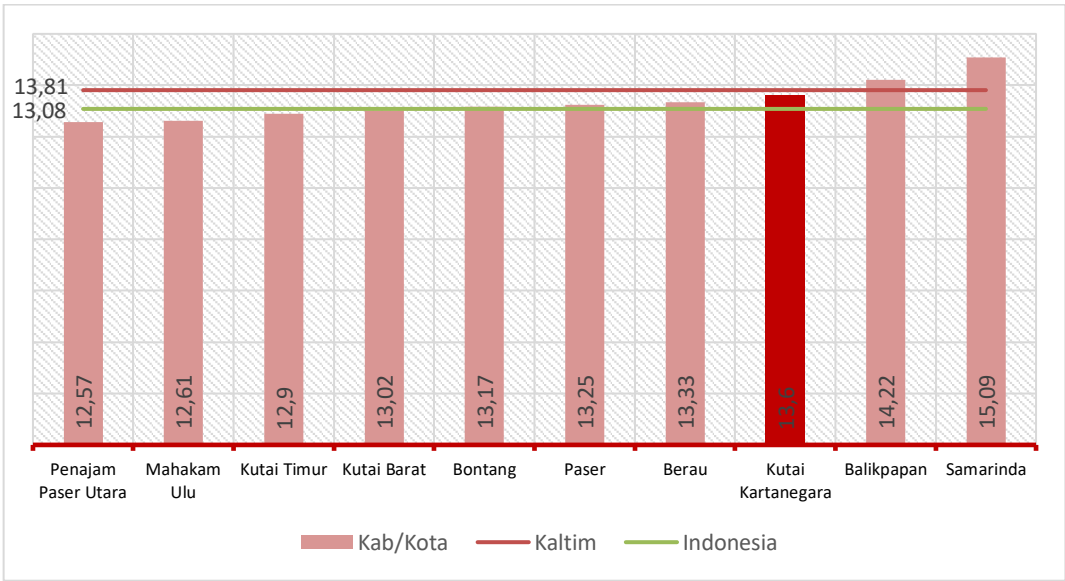
Gambar 3. 7. Perkembangan HLS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026.

HLS Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 sebesar 13,6 tahun, lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,81 tahun tetapi lebih tinggi dibanding Indonesia sebesar 13,08. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim, HLS Kukar berada di peringkat ketiga.

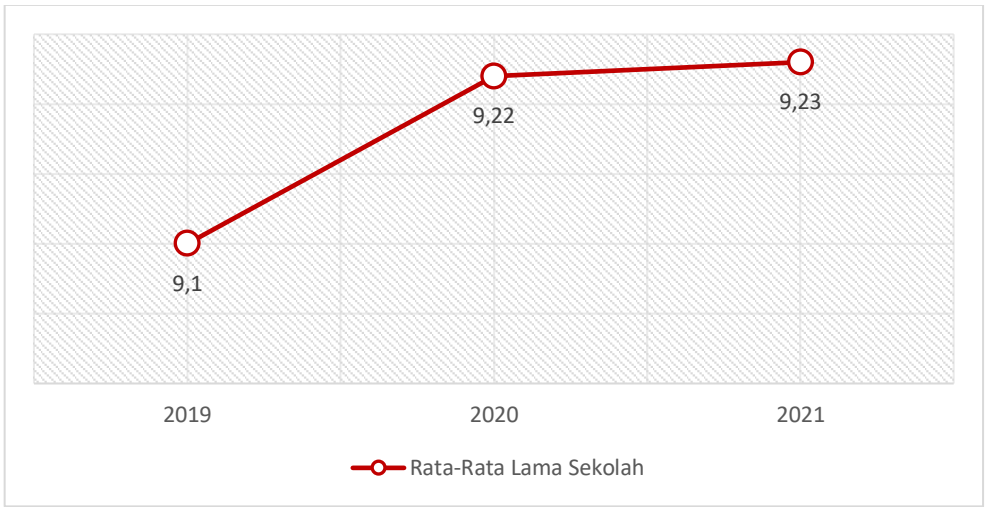
Gambar 3. 8. Posisi Relatif HLS Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Berbeda dengan HLS, Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2020, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,22 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal Sekolah Menengah Atas.

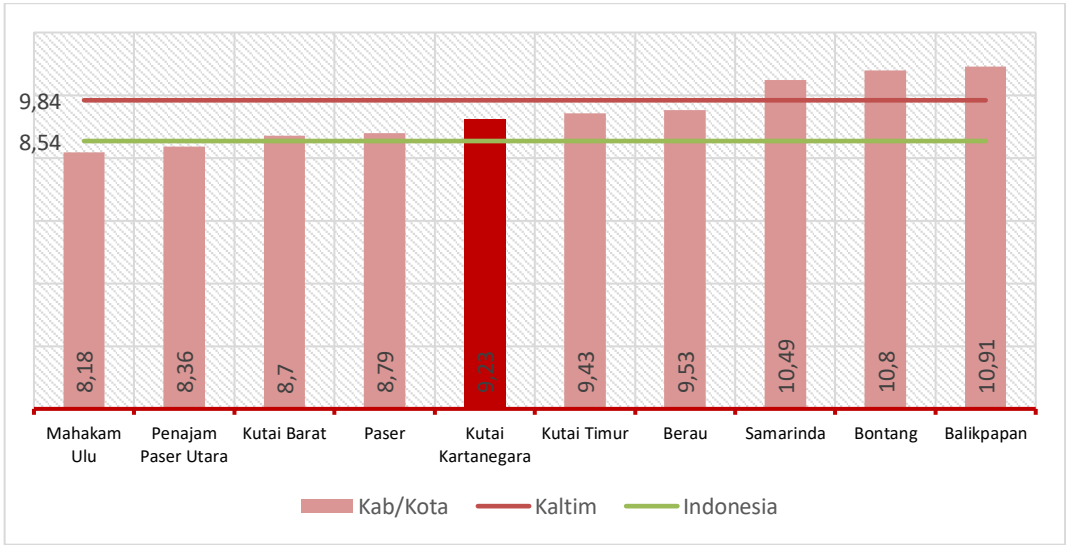
Gambar 3. 9. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021



Sumber : RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 mencapai 9,23 tahun, lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,84 tahun, tetapi lebih tinggi dibanding rata-rata Indonesia sebesar 8,54 tahun. Pada level kab/kota, Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat 6.

Gambar 3. 10. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, salah satu masalah penting pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLA dan perguruan tinggi. Untuk tingkat SD mencapai 95 persen dan SLP 87 persen. Dengan program wajib belajar 12 tahun tampaknya masalah tersebut akan segera teratasi. Akan tetapi jika di lihat di tingkat SLA dan PT maka terlihat bahwa angkanya masih relatif rendah. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLA dan PT. Akses penduduk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik. Keterbatasan akses

secara ekonomi terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang SLA dan PT. Keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis.

Tabel 3. 2. Angka Partisipasi Murni (APM), Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021.

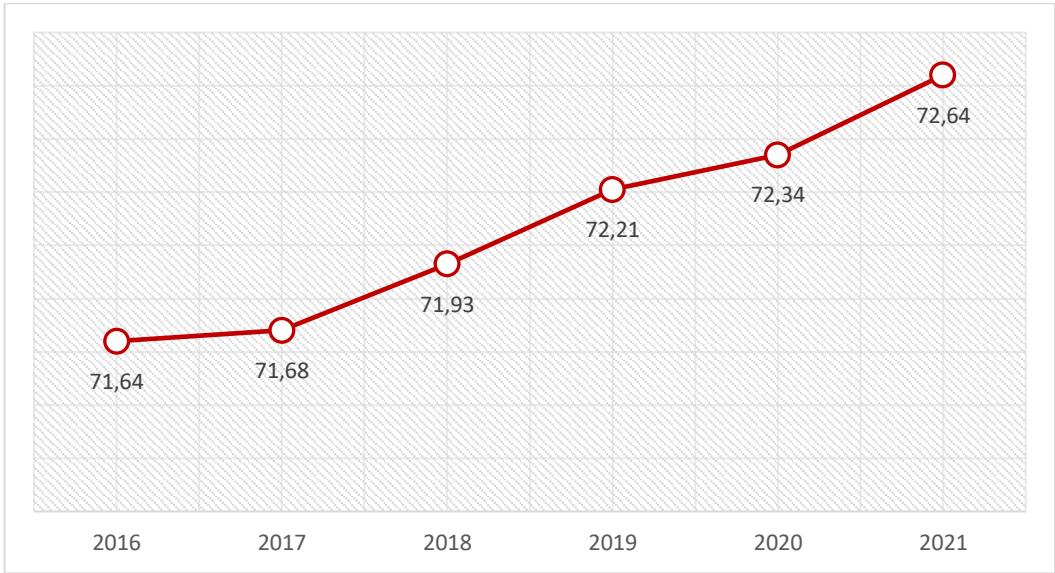
Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
SD	95,84	97,01	96,41
SMP	87,32	84,64	85,94
SMA	82,04	69,07	75,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kesehatan

Pada indeks kesehatan, perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten/kota dalam enam tahun terakhir meningkat secara linier. UHH Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 mencapai 72,64 tahun.

Gambar 3. 11. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kutai Kartanegara, 2016-2021

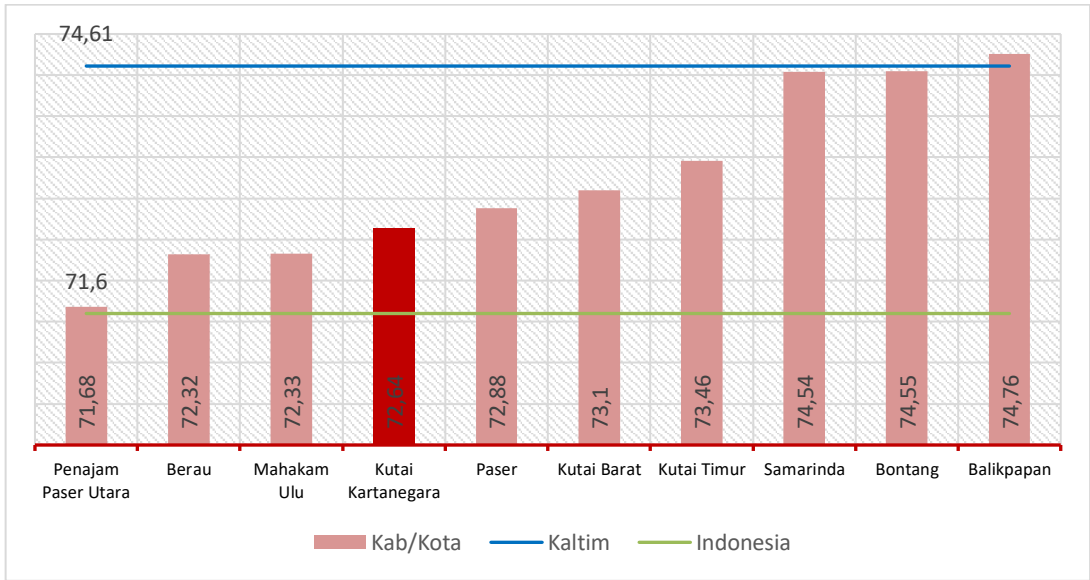


Sumber: BPS Kutai Kartanegara.

UUH Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 sebesar 72,64 tahun lebih tinggi dibanding Indonesia (71,6 tahun) tetapi lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur (74,61

tahun). Pada tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, UHH Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat 7.

Gambar 3. 12. Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

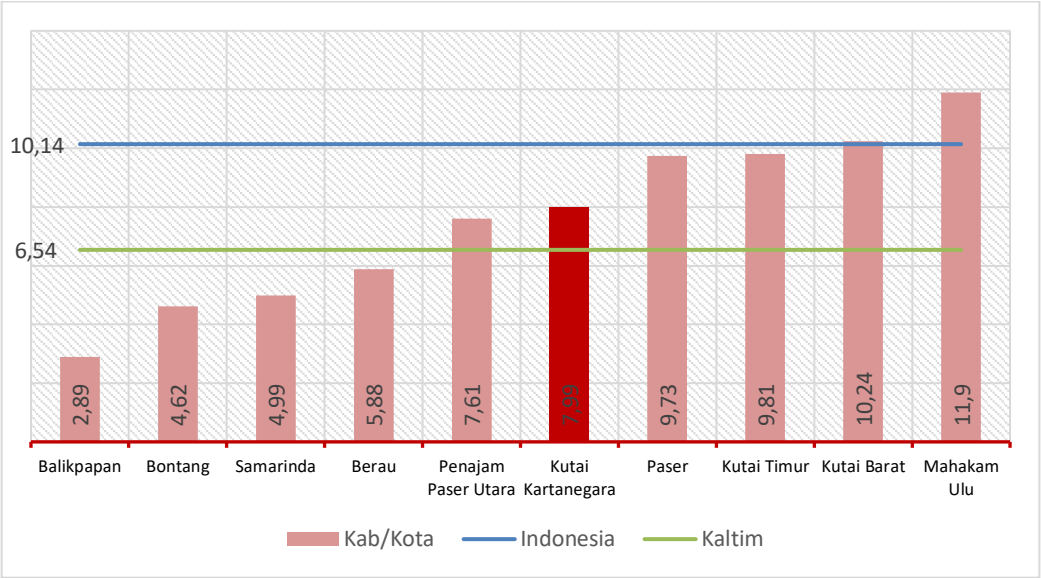
c. Pembangunan Ekonomi

Kondisi keluarga yang diinginkan melalui pembangunan keluarga sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial. Indikator utamanya adalah menurunnya keluarga miskin, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga, dimana setiap keluarga mempunyai jumlah anak yang ideal sesuai dengan kemampuan keluarganya.

a) Persentase Penduduk Miskin

Pada 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 7,99% lebih rendah dibanding Indonesia tetapi masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Kaltim, persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat 5.

Gambar 3. 13. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kutai Kartanegara, 2021



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2026, diproyeksi persentase penduduk miskin diproyeksikan turun menjadi 6,35%.

Gambar 3. 14. Proyeksi Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kutai Kartanegara, 2022-2026

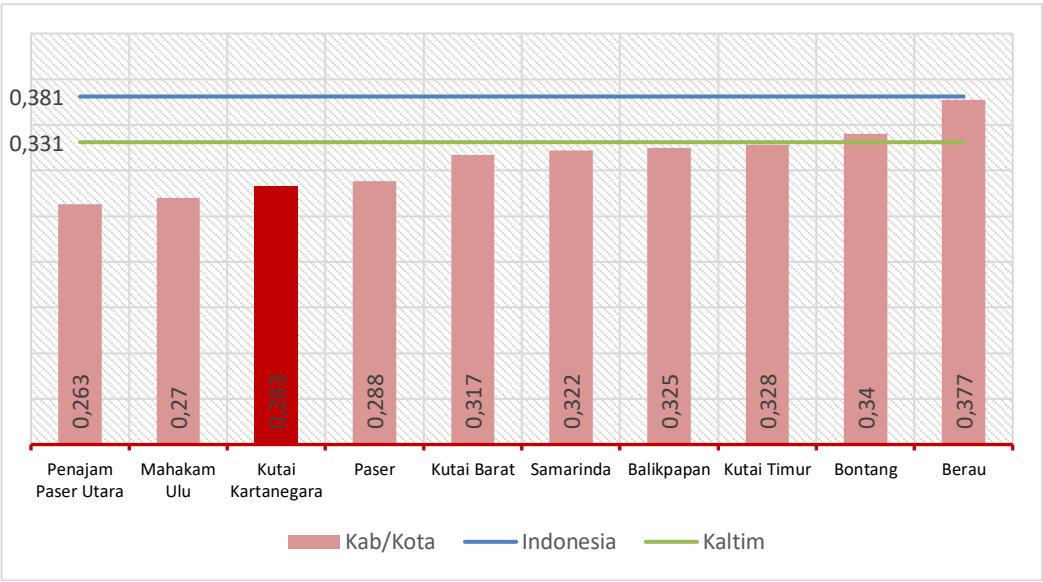


Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara, 2021-2026

b) Gini Rasio

Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 menunjukkan angka sebesar 0,283 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Angka tersebut berada dibawah Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia.

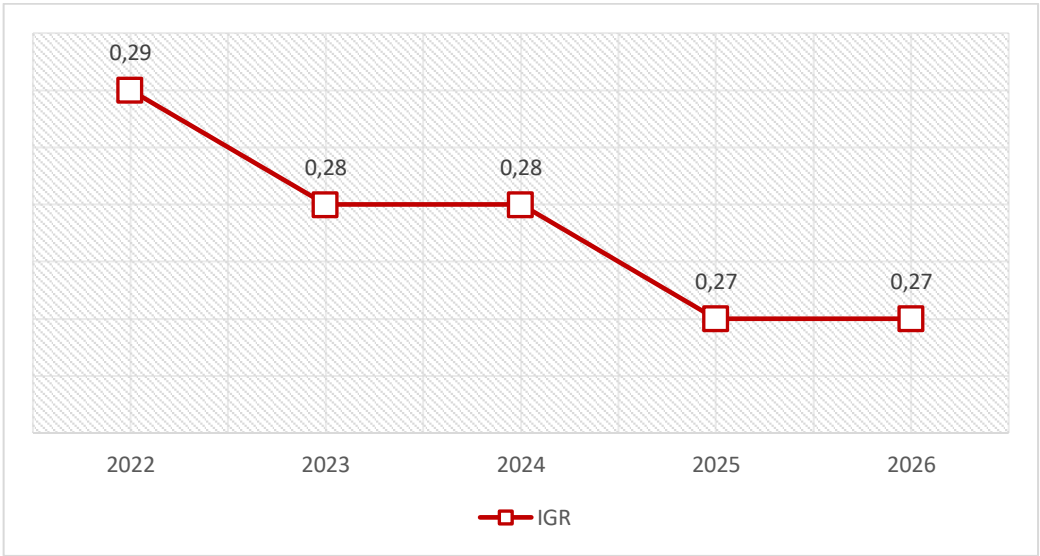
Gambar 3. 15. Posisi Gini Rasio Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam RPJMD 2021-2026 diproyeksikan IGR Kutai Kartanegara sebesar 0,270 tercapai pada 2026.

Gambar 3. 16. Proyeksi Perkembangan IGR Kutai Kartanegara, 2022-2026

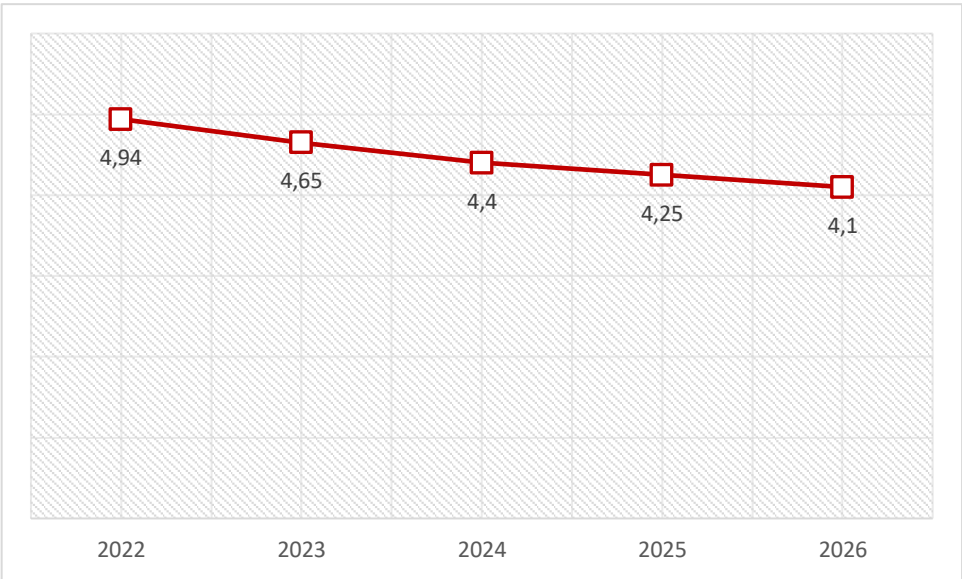


Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang diinginkan yakni semakin rendahnya tingkat pengangguran. Dalam RPJMD, diproyeksikan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan secara linier hingga 2026 sebesar 4,10.

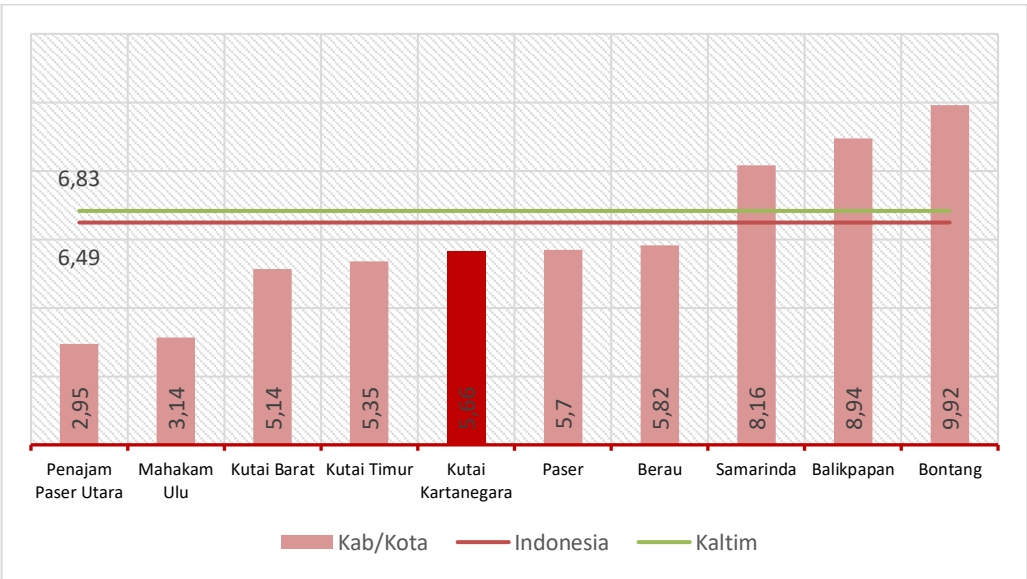
Gambar 3. 17. Proyeksi Perkembangan TPT Kutai Kartanegara, 2022-2026



Sumber : RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

TPT Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 menunjukkan angka 5,66, berada dibawah capaian Nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 3. 18. Posisi Relatif TPT Kutai Kartanegara, 2021

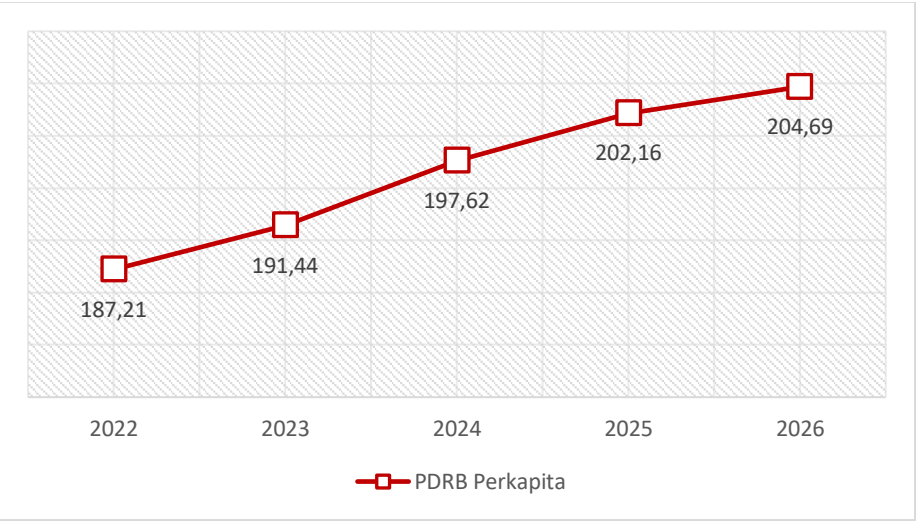


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

d) Pengeluaran Perkapita Tahun (Ribu Rupiah)

Kondisi PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mencapai 204,69 pada 2026.

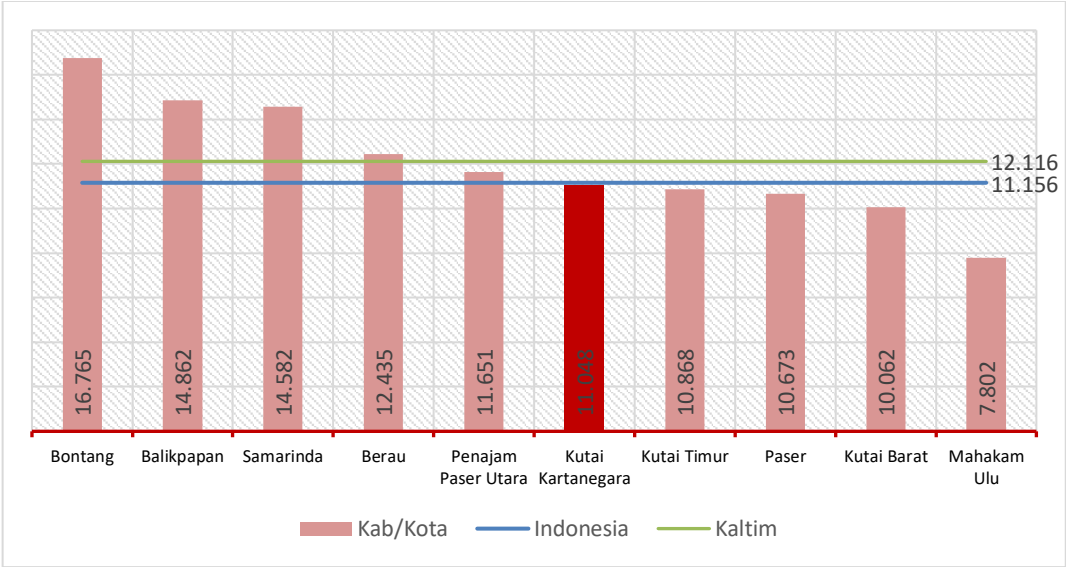
Gambar 3. 19. Proyeksi Perkembangan Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Kutai Kartanegara, 2022-2026.



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, diolah.

Pengeluaran perkapita pertahun penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 baru mencapai Rp 11.048 masih lebih rendah dibanding Kalimantan Timur dan Indonesia.

Gambar 3. 20. Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita pertahun Penduduk Kutai Kartanegara (000 Rupiah), 2021

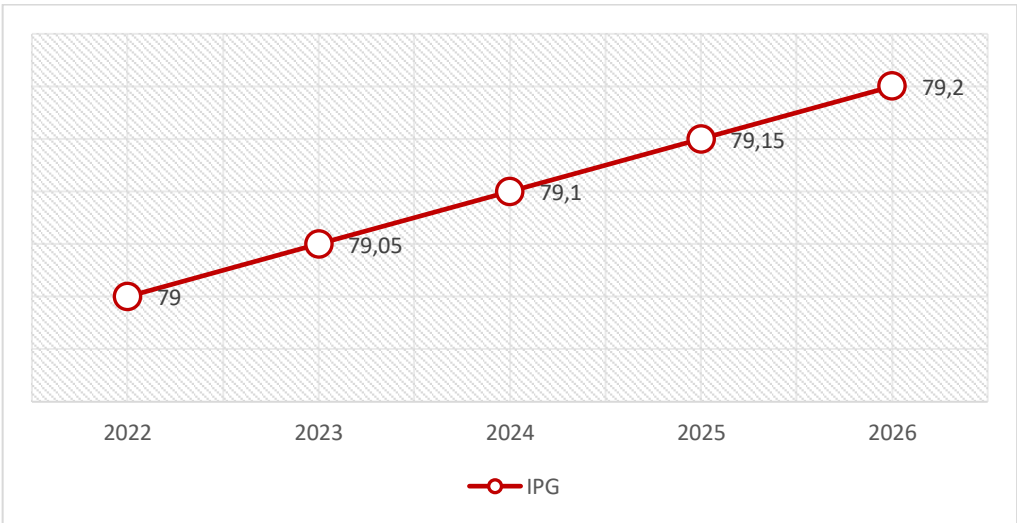


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah.

3.1.3. Pembangunan Keluarga

Kondisi pembangunan gender Kabupaten Kutai Kartanegara yang diinginkan yakni semakin rendahnya tangka disparitas gender. Pada 2026 diproyeksikan IPG Kabupaten berada pada angka 79,20.

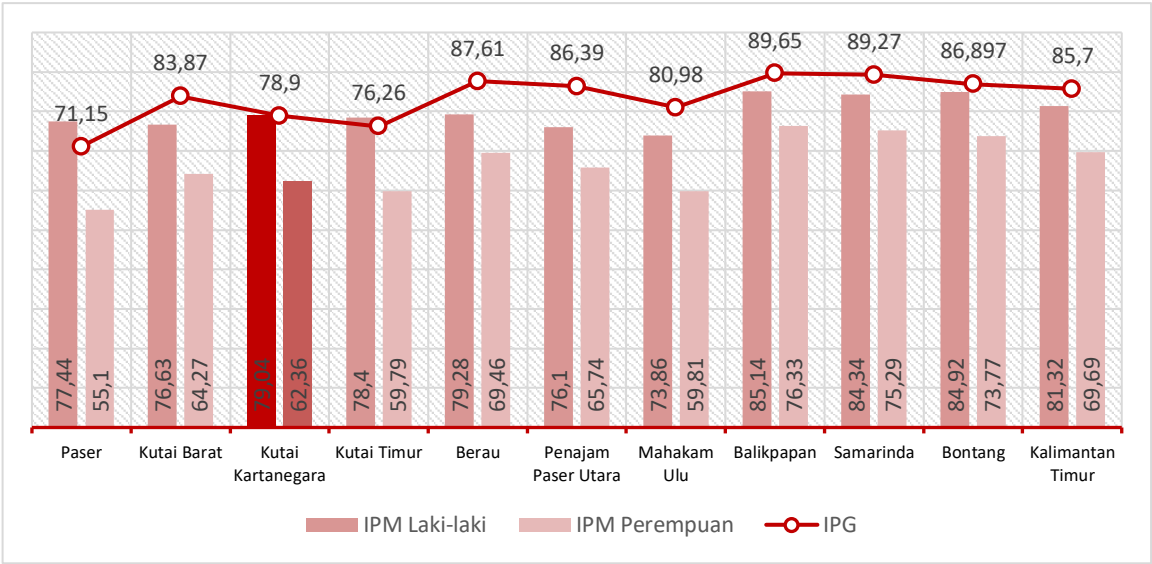
Gambar 3. 21. Proyeksi Perkembangan IPG Kutai Kartanegara, 2022-2026



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

Tampaknya perlu kerja keras untuk mewujudkan kondisi IPG yang diinginkan mengingat disparitas IPG Kukar masih berada peringkat ketiga terendah diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Hingga 2021, IPG Laki-laki Kabupaten Kartanegara masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini tergambar pada angka IPG Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2021 baru mencapai 78,9. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki masih relatif lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 79,04 sementara IPM perempuan hanya sebesar 62,36. Capaian ini merefleksikan masih besarnya disparitas gender di Kutai Kartanegara.

Gambar 3. 22. Posisi Relatif IPG Kutai Kartanegara, 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

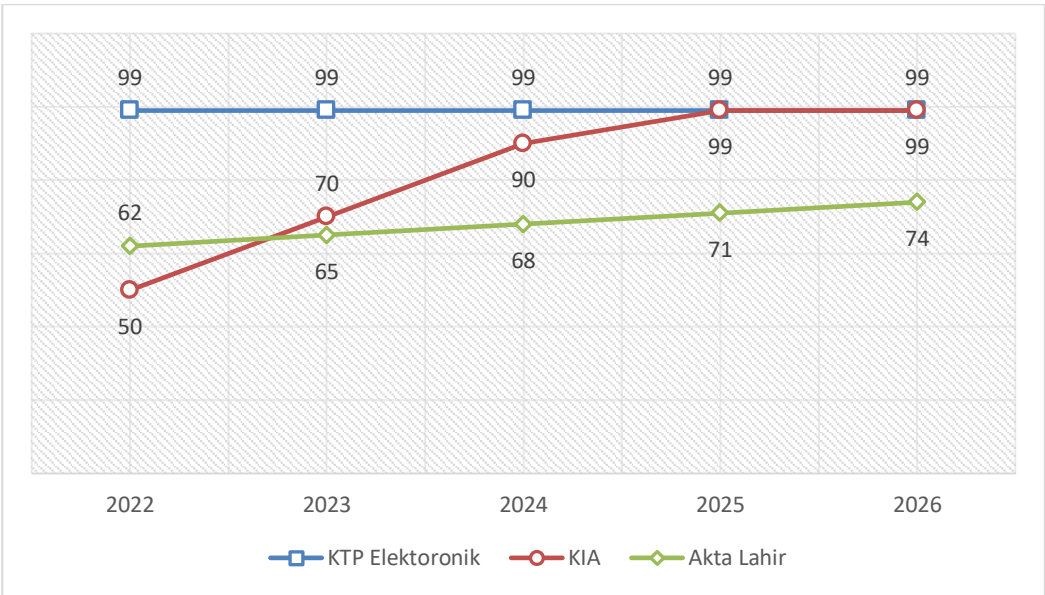
3.1.4. Penataan Administrasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum mencakup dua hal. Pertama, tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait dan pihak swasta yang membutuhkan. Kedua, tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Terdapat enam kategori isu-isu strategis: Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, cakupan kepemilikan e-KTP pada 2022 telah mencapai 99% sehingga capaian ini diharapkan dipertahankan. Kondisi yang diharapkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2026 telah mencapai angka 99%. Sedangkan kondisi cakupan kepemilikan akta lahir yang diinginkan pada 2026 mencapai 74%.

Gambar 3. 23. Proyeksi Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik, KIA, dan Akta Lahir Kutai Kartanegara, 2022-2026



Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan di daerah-daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan penerapan *reward and punishment*. Di samping itu, regulasi dan kebijakan perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara

menerjemahkan regulasi dan kebijakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (*work flow*) tertib administrasi kependudukan.

3.2. Kondisi Yang Diharapkan

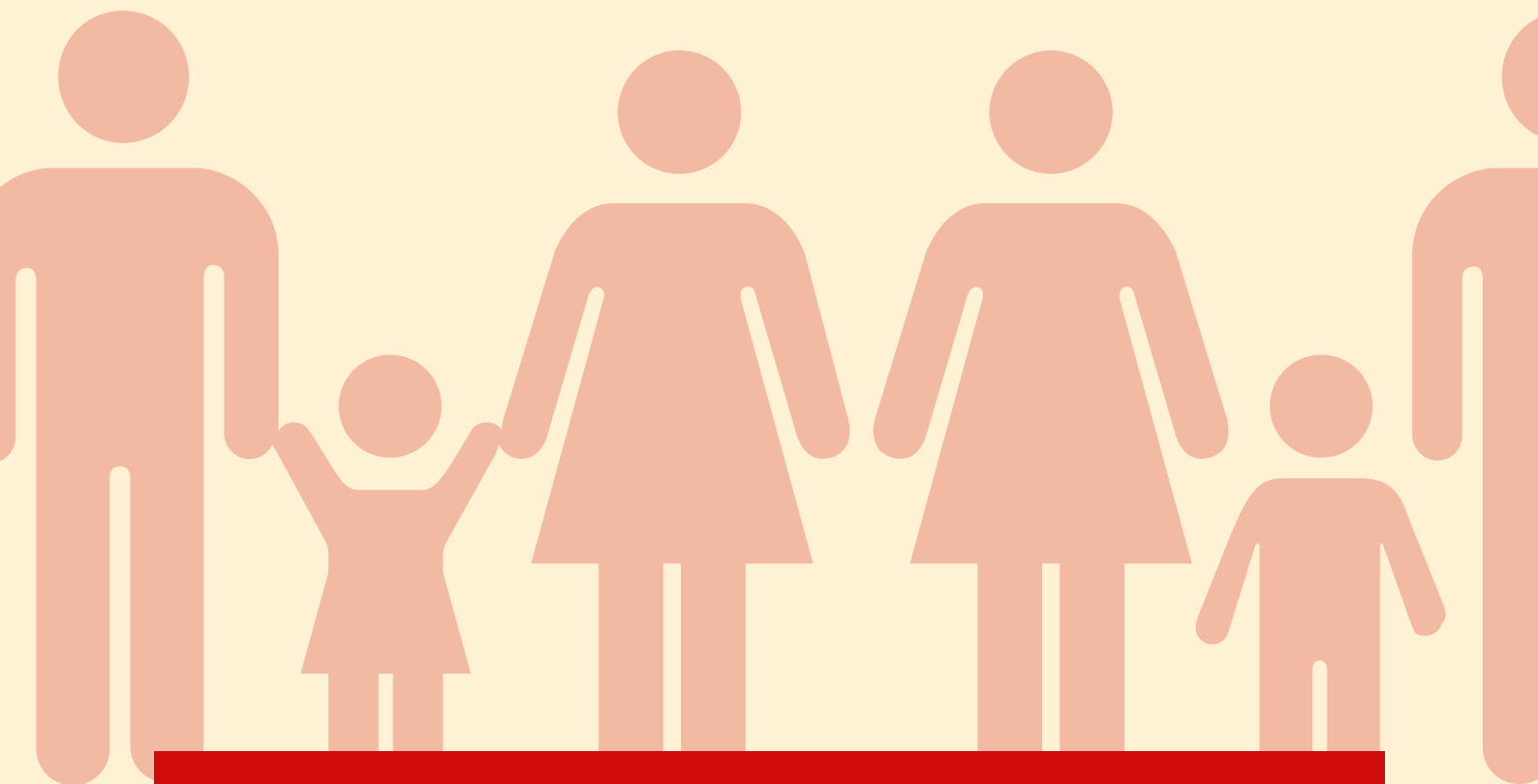
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dari analisis situasi seperti dideskripsikan di atas, maka pada tahun 2022-2047, pembangunan kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mencapai kondisi berikut.

Tabel 3. 3. Kondisi Yang Diharapkan

Pilar	Kondisi yang Diharapkan
1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya kondisi penduduk yang seimbang.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk	Tercapainya kondisi sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi
3. Pembangunan keluarga	Tercapainya keluarga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
4. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk	Tercapainya keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
5. Penataan administrasi kependudukan	Tercapainya kondisi administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB 4

VISI, MISI & ISU-ISU STRATEGIS



4.1. Visi dan Misi

Visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048 adalah “Terwujudnya kondisi penduduk yang sehat, cerdas, mandiri, sejahtera dan bahagia menuju Kukar Emas Berbudaya 2045”.

Misi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai pada 2048:

- Tercapainya penduduk yang seimbang;
- Tercapainya sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- Tercapainya keluarga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- Tercapainya keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- Tercapainya administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

4.2. Isu-Isu Strategis

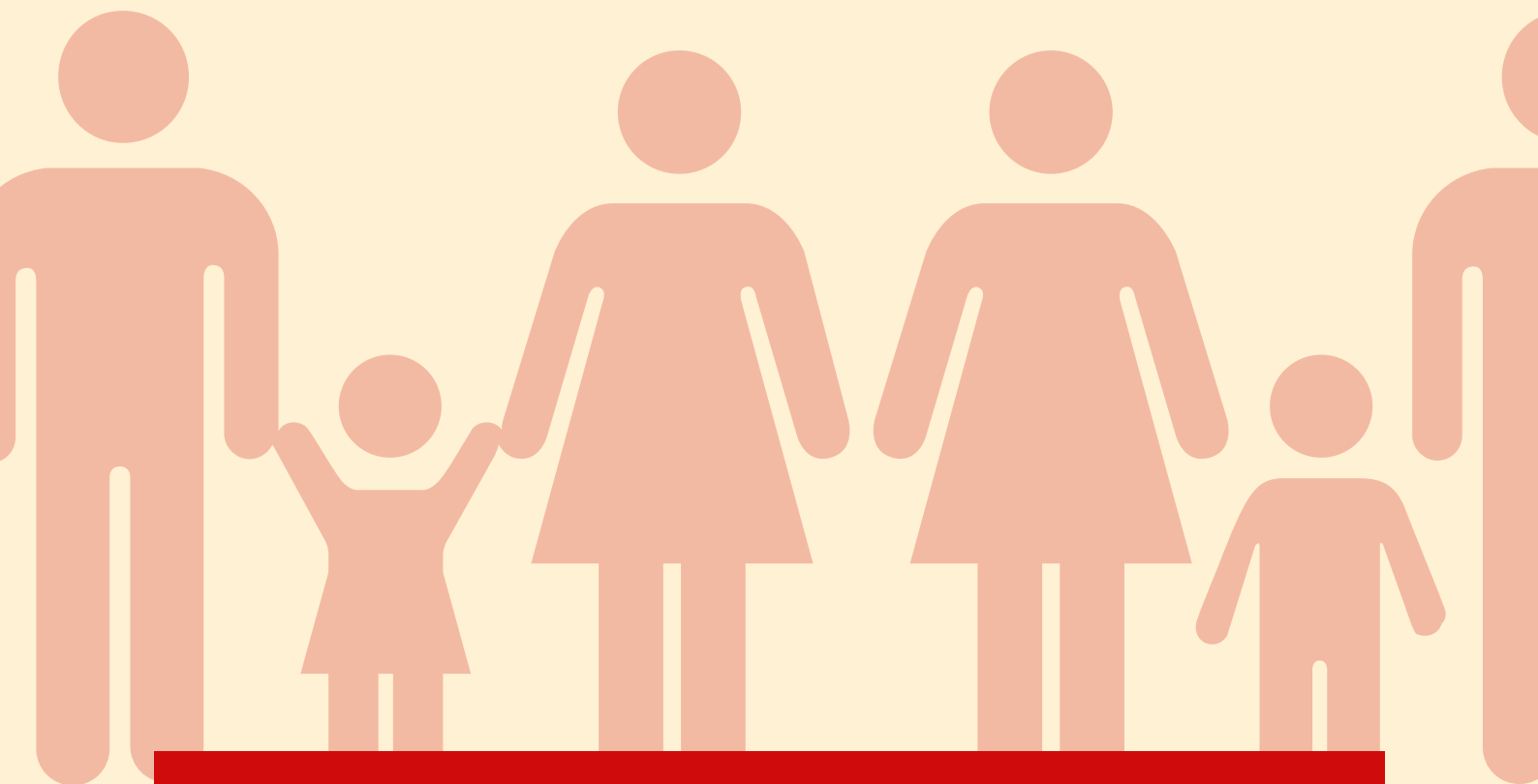
Isu-isu strategis berdasarkan lima pilar GDPK Kutai Kartanegara 2024-2048 sebagai berikut:

1. Pengendalian kuantitas penduduk
 - Distribusi penduduk yang tidak merata.
 - *Total Fertility Rate (TFR)* masih >2%.
 - Pernikahan dini masih tinggi.
 - Peserta KB tidak aktif masih tinggi.
 - Penduduk yang tidak menggunakan alat/cara KB masih tinggi.
2. Peningkatan kualitas penduduk
 - Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di bawah rata-rata Kaltim.
 - Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih dibawah rata-rata Kaltim.
 - Angka Harapan Hidup masih rendah, dibawah rata-rata Kalimantan Timur.
 - Angka Kematian Ibu mengalami trend peningkatan, dan tertinggi di Kaltim.
 - Angka Kematian Bayi masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
 - Angka Kematian Balita masih lebih tinggi dari rata-rata Kaltim.
 - Belum semua penduduk memiliki akses air bersih dan sanitasi layak.

- Prevalensi Stunting tertinggi di Kaltim.
 - Rata-rata lama sekolah masih lebih rendah dari rata-rata Kaltim.
 - Persentase penduduk miskin (P0) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masih tinggi.
 - Persentase penduduk miskin ekstrim masih tinggi.
3. Pembangunan Keluarga
 - Masih tingginya tingkat perceraian
 - Masih tingginya kekerasan dalam rumah tangga.
 4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - Migrasi penduduk usia produktif lebih banyak yang keluar.
 5. Penataan Administrasi Kependudukan
 - Belum semua penduduk memiliki akta kelahiran;
 - eKTP belum mencapai 100%;
 - Data kependudukan dan keluarga belum terintegrasi.

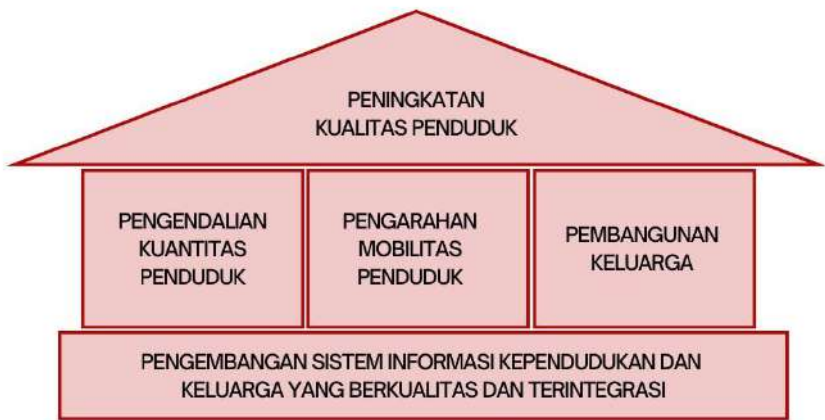
BAB 5

ARAH KEBIJAKAN,
TUJUAN, SASARAN, &
STRATEGI



Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Gambar berikut menjelaskan keterkaitan lima pilar GDPK.

Gambar 5. 1. Keterkaitan Lima Pilar GDPK



5.1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Pasal 2 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan kependudukan mencakup:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

5.2. Tujuan Strategis

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Sedangkan **tujuan khusus** adalah untuk mewujudkan:

- a. penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- d. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

5.3. Sasaran Strategis

Sasaran Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2047 sebagai berikut:

- a. Sasaran pengendalian kuantitas penduduk adalah meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana.
- b. Sasaran peningkatan kualitas penduduk dibidang keseharan adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin, menurunnya tingkat kematian ibu, balita, dan anak, serta meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
- c. Sasaran peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan adalah meningkatnya pemerataan aksesibilitas atau tingkat partisipasi sekolah hingga SLTA, dan kualitas pendidikan formal dan non formal.
- d. Sasaran peningkatan kualitas penduduk dibidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.
- e. Sasaran pembangunan keluarga adalah menurunnya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga.
- f. Sasaran penataan dan pengarahan mobilitas penduduk adalah berkurangnya penduduk usia produktif keluar daerah.

5.4. Strategi

Guna mencapai kondisi yang diinginkan, berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2047 terhadap lima pilar sebagai berikut.

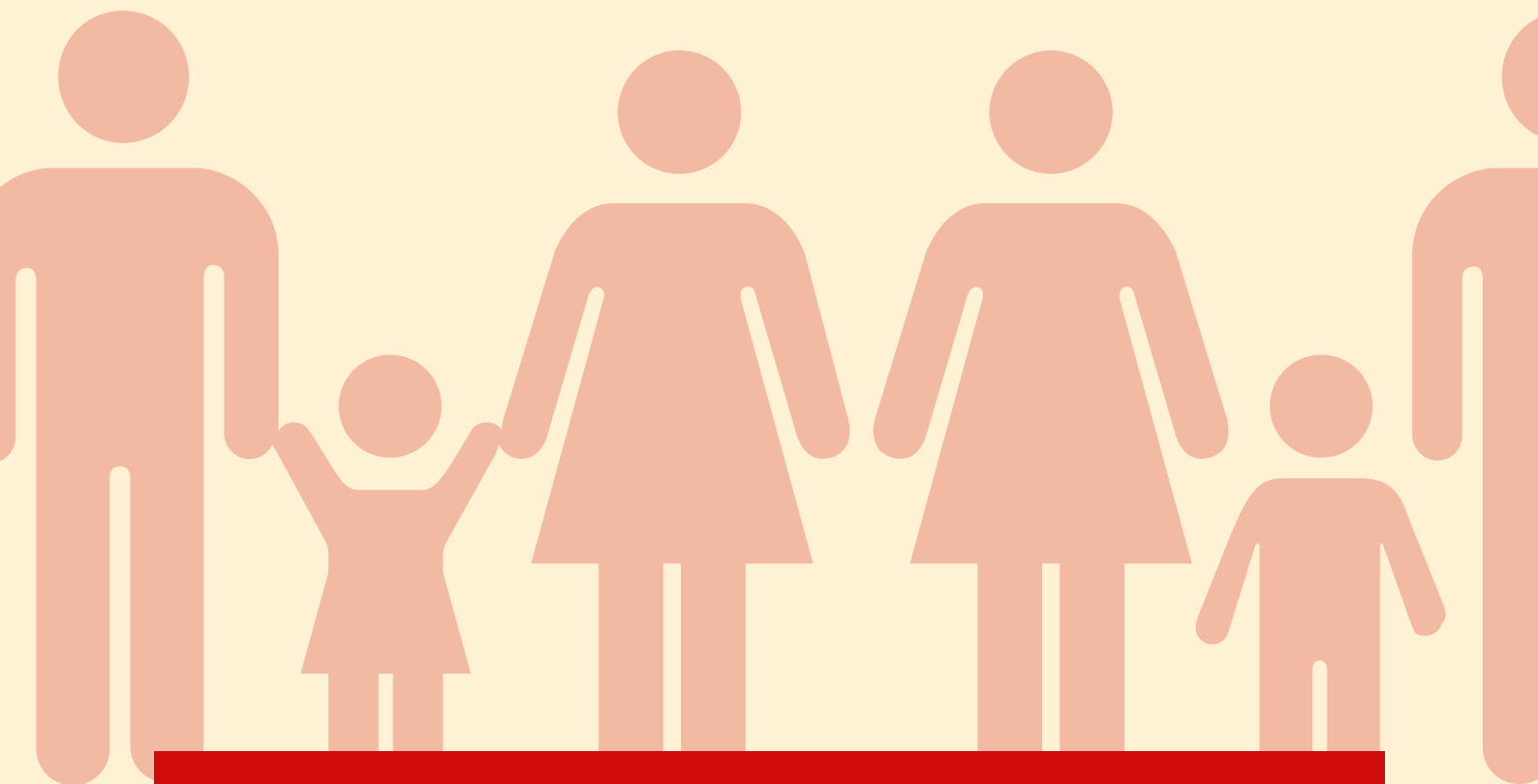
1. Pengendalian kuantitas penduduk melalui strategi:

- a. Pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana yang mencakup:
 - a) Pendewasaan usia perkawinan;
 - b) Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c) pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d) peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e) penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f) peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g) peningkatan pendidikan dan peran wanita
 - b. Penurunan mortalitas melalui strategi:
 - a) penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b) penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c) penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d) penurunan angka kematian bayi dan anak.
2. Peningkatan kualitas penduduk melalui strategi:
- a. Bidang kesehatan:
 - a) penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b) peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Bidang Pendidikan:
 - a) peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b) peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c) pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
 - c. Bidang Ekonomi:
 - a) peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b) pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
3. Pembangunan Keluarga melalui rekayasa sosial dengan strategi:

- a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui strategi:
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
 - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.
5. Penataan administrasi kependudukan melalui strategi:
- a. penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
 - b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

BAB 6

ROAD MAP



Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun, maka *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun merupakan operasionalisasi GDPK.

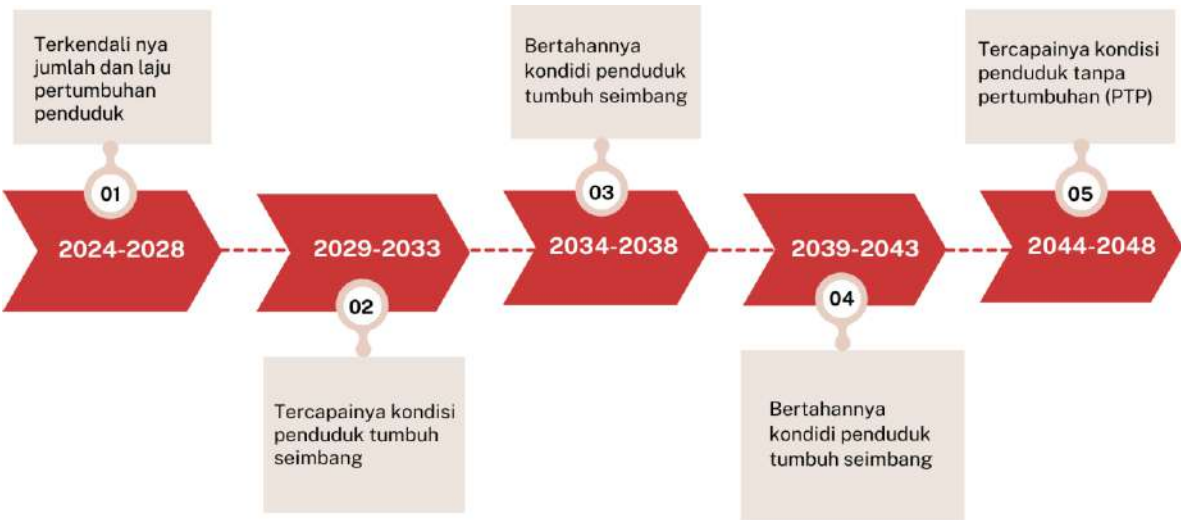
Gambar 6. 1. Keterkaitan *Grand Design* dengan *Road Map*



6.1. Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk

Jika melihat rata-rata capaian penurunan laju pertumbuhan penduduk periode 2015-2019 sebesar 3,3%, maka perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang ideal sebesar 0,5% pada akhir periode road map. Berkaca pada pengalaman periode sebelumnya, maka target pertumbuhan penduduk di akhir *Road Map* sebesar 1.5%.

Gambar 6. 2. Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk 2024-2048



Tabel berikut memperlihatkan kondisi yang diinginkan akhir *roadmap* menurut indikator pengendalian kuantitas penduduk.

Tabel 6. 1. Kondisi Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk yang diinginkan akhir *Road Map*

Kondisi yang Diharapkan	Indikator	Base Line	Tahap I (2024- 2028)	Tahap II (2029- 2033)	Tahap III (2034- 2038)	Tahap IV (2039- 2043)	Tahap V (2044- 2048)
Pilar I Tercapainya kondisi penduduk yang seimbang	1. Angka Kelahiran Kasar	16,86 (SP2020LF)	16,0	15,2	14,5	13,8	13,0
	2. Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,52 (2023)	1,5	1	0,7	0,6	0,4
	3. Median Umur Kawin Pertama (tahun)	21 (PK 24)	22	23	24	25	26
	4. Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR (%)	61,3 (PK 24)	63	65	68	70	72
	5. Prevalensi Pemakaian MKJP (%)	21,7 (PK 24)	23	25	28	30	32
	6. <i>Unmet Need</i> (%)	14,5 (PK 24)	13	12	10	8	5
	7. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) (%)	2.16 (PK 2023)	2.12	2.0	1,9	1,8	1,7
	8. <i>Age Spesific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19	25,7 (PK 2023)	24	22	20	18	15
	9. Rasio Ketergantungan	44,10	43	42	40	38	35

6.2. Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Tabel berikut menunjukkan *Roadmap* Kondisi Kualitas Penduduk yang diinginkan.

Gambar 6. 3. Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk 2024-2048



Tabel berikut menunjukkan kondisi yang diinginkan akhir *Roadmap* menurut Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Kutai Kartanegara 2024-2048.

Tabel 6. 2. Kondisi Indikator Kualitas Penduduk yang diinginkan diakhir Road Map

Kondisi yang Diharapkan		Indikator	Base Line (2023)	Tahap I (2024- 2028)	Tahap II (2029- 2033)	Tahap III (2034- 2038)	Tahap IV (2039- 2043)	Tahap V (2044- 2048)
Pilar II Tercapainya kondisi sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.	Angka Kematian Bayi per 1000 KH		15,72 (LFSP2020)	14,5	13	11,5	10	8
	Angka Kematian Balita per 1000 KH		18,33 (SP2020 LF)	17	15	12	10	8
	Indeks Pembangunan Manusia		75,30	79,02	81,38	83,54	86,03	87
	Usia Harapan Hidup (Tahun)		72,75	74,61	75,07	75,54	76,1	76,60
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		13,64	14,36	14,96	15,46	16,06	16,62
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		9,26	10,16	10,61	11,02	11,50	12
	Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)		99,79	99,9	99,95	100	100	100
	Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)		99,47	99,47	99,8	100	100	100
	Partisipasi Sekolah 16-18 tahun (%)		79,85	82	85	90	95	98
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		80,64	82,78	84,92	87,05	89,19	91,33
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,49	0,43	0,40	0,32	0,29	0,24
	Persentase Perempuan di Parlemen		15,56	18	22	26	30	35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4,05	3,44	3,20	2,96	2,67	2,41
	Persentase Penduduk Miskin (P0)		7,61	6,6	5,71	4,76	3,81	2,86
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		0,65	0,35	0,29	0,23	0,17	0,11
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03

	Indeks Gini Ratio (IGR)	0,28	0,26	0,24	0,22	0,19	0,17
--	-------------------------	------	------	------	------	------	------

1.3. Road Map Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluargadiharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Diharapkan pada akhir periode *road map*, indeks pembangunan keluarga mencapai >70 (tangguh).

Gambar 6. 4. Road Map Pembangunan Keluarga 2024-2048



Tabel berikut menunjukkan kondisi yang diinginkan akhir *roadmap* menurut indikator Pembangunan Keluarga Kutai Kartanegara 2024-2048.

Tabel 6. 3. Kondisi Indikator Pembangunan Keluarga Akhir Road Map

Kondisi yang Diharapkan	Indikator	Base Line (2023)	Tahap I 2024-2028	Tahap II 2029-2033	Tahap III 2034-2038	Tahap IV 2039-2043	Tahap V 2044-2048
Pilar III Tercapainya keluarga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.	Akses terhadap air minum layak (%)	85,76	88,5	90	92	94	96
	Akses terhadap sanitasi layak (%)	87,8	89,5	91	93	95	98
	Persentase rumah layak huni	74,78	77	80	83	86	90
	Cakupan jaminan Kesehatan (%)	81,79	85	90	95	98	100
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,96 PK24	68	70	72	75	80
	Prevalensi Stunting (%)	17,6 SKI2023	16	14	12	9	5

1.4. Road Map Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan orbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong- bondong dating ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi kecamatan. Tabel berikut menunjukkan Roadmap kondisi penataan persebaran dan mobilitas kependudukan yang diinginkan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048.

Gambar 6. 5. Road Map Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2024-2048



Tabel berikut menunjukkan kondisi yang diinginkan akhir *roadmap* menurut Indikator Penataan Persebaran dan Moblitas Penduduk Kutai Kartanegara 2024-2048.

Tabel 6. 4. Kondisi Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Akhir Road Map

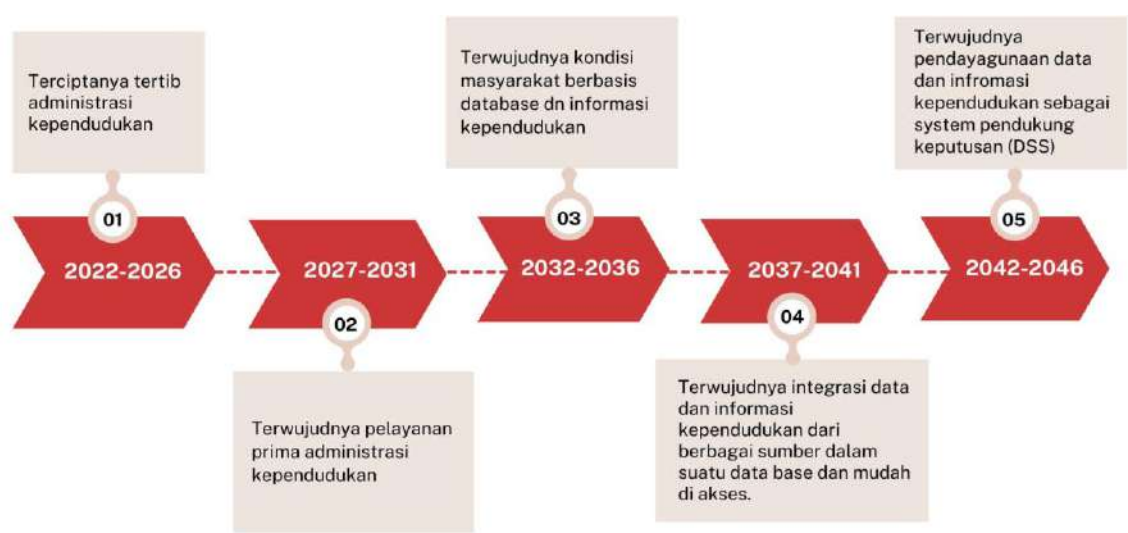
Kondisi yang Diharapkan	Indikator	Base Line	Tahap I (2024- 2028)	Tahap II (2029- 2033)	Tahap III (2034- 2038)	Tahap IV (2039- 2043)	Tahap V (2044- 2048)
Pilar IV Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk	Migrasi Risen Netto	0,17 (SP2020 LF)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	Migrasi Seumur Hidup Netto	23,05 (SP2020	23,5	24	25	26	27

		LF)					
	Persentase Penduduk Perkotaan (Urbanisasi)	41,02	43	45	47	50	55
	Kepadatan Penduduk	29	30	32	33	35	36
	Migrasi bersih	-2.290	-1.500	-1.000	0	+500	+1000

1.5. Road Map Penataan Administrasi Kependudukan

Pada prinsipnya *roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi empat periode. Setiap periode merupakan pentahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System (DSS)*. Adapun pentahapannya sebagai berikut.

Gambar 6. 6. Road Map Penataan Administrasi Kependudukan 2024-2048



Tabel berikut menunjukkan kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut Indikator dan parameter Pembangunan Database Kependudukan Kutai Kartanegara 2024-2048.

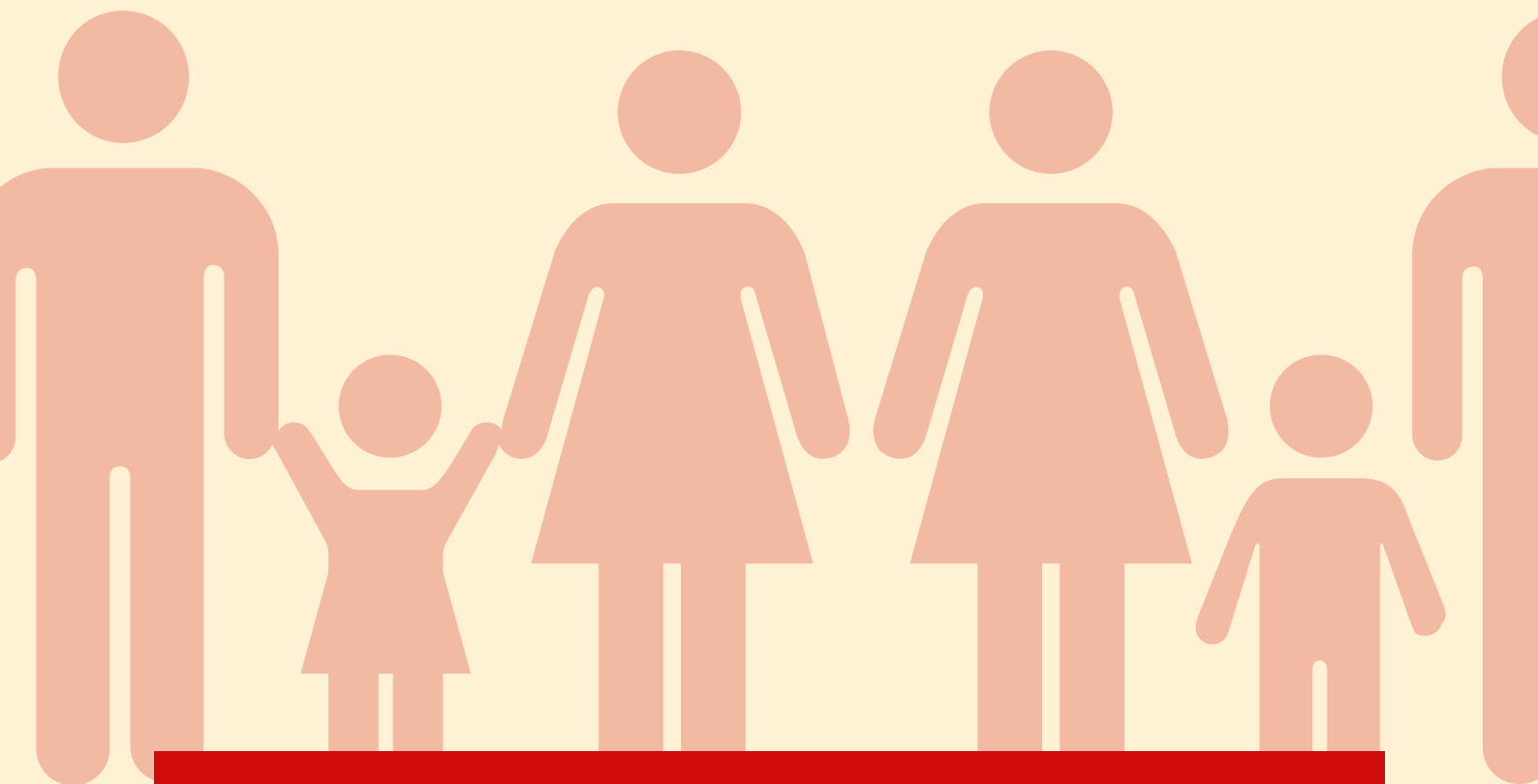
Tabel 6. 5. Kondisi Indikator Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan yang diinginkan di Akhir Road Map

Kondisi yang Diharapkan	Indikator	Base Line	Tahap I (2024-2028)	Tahap II (2029-2033)	Tahap III (2034-2038)	Tahap IV (2039-2043)	Tahap V (2044-2048)
Pilar V Penataan administrasi kependudukan	1. Cakupan Akte Kelahiran (Usia 0-17 Tahun)	95	96,5	97	98	99	100
	2. Persentase Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) 0-17 tahun	97,3	98	98,5	99	99,5	100
	3. Persentase Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) 0-18 tahun	53,9	60	70	80	90	100

	4. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	60,67	63	65	68	72	75
	5. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,9	73	75	78	80	85

BAB 7

PENUTUP



Tantangan utama (dan peluang) pembangunan kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Untuk mendapatkan manfaat nyata dari jendela peluang dari kedua isu utama tersebut maka diperlukan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang dituangkan dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mencakup lima pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta tatakelola administrasi kependudukan.

Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kutai Kartanegara 2024-2048 diharapkan menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di bidang pembangunan kependudukan.

Pada tingkat Rencana Aksi (Renaksi), prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan GDPK 5 pilar dibagi ke dalam 2 (dua) rencana besar, yaitu:

1. Fokus:

- a. mengendalikan tingkat kelahiran, menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- b. meningkatkan pendidikan anak usia dini, meningkatkan akses pendidikan formal dan non formal hingga sekolah menengah atas, dan peningkatan cakupan layanan kesehatan;
- c. menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
- d. meningkatkan kualitas hidup lanjut usia dan disabilitas;
- e. penguatan perencanaan berkeluarga bagi remaja dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- f. meningkatkan tata kelola urbanisasi dan migrasi (baik internal maupun eksternal);
- g. perluasan cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran serta dokumen lainnya hingga 100 persen.

2. Pengarusutamaan:

- a. Penghapusan *stunting* dan berat badan lahir rendah (BBLR);
- b. Penghapusan kemiskinan ekstrim; dan
- c. Gender di sektor pendidikan.

Untuk mengimplementasikan program GDPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2048 diperlukan sinergi, keterpaduan, dan kolaborasi antara pemerintah (berbagai level), swasta, perguruan tinggi, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2018*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2019*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2020*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2021*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2022*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2018). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2018*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2020*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2022*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2019). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2019*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2020*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2022*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2023*. Tenggarong: BPS.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenggarong: BPS.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2023, May 13). <https://kaltim.bps.go.id> › indicator. Retrieved from bps.go.id: <https://kaltim.bps.go.id/indicator/23/111/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2023, May 13). <https://kaltim.bps.go.id> › indicator. Retrieved from bps.go.id: <https://kaltim.bps.go.id/indicator/23/112/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota.html>

- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2023, May 13). <https://kaltim.bps.go.id/indicator/>. Retrieved from bps.go.id: <https://kaltim.bps.go.id/indicator/23/113/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. databoks. (2022, September). <https://databoks.katadata.co.id/>. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/26/vaksinasi-dosis-2-di-kabupaten-kutai-kartanegara-menjadi-yang-terendah-di-kalimantan-timur>
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (2020). Profil Kesehatan Tahun 2019. Samarinda: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (2021). Profil Kesehatan Tahun 2020. Samarinda: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). Capaian Kinerja 2022-2023. Tenggarong.
- Karagiannis, R., & Karagiannis, G. (2020). Constructing Composite indicators with Shannon entropy: The case of Human Development Index. *Socio Economic Planning Science* 70.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pol, L., & Thomas, R. (2002). *The Demography of Health and Health Care*. New York: Kluwer Academic.
- Poole, I. (2007). Demographic Dividends: Determinants of Development or Merely Windows of Opportunity? *Ageing Horizons, Vol 7*, 28-35.
- Ryan, N. (2022, 03 03). <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/16060911/>. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/16060911/bappenas-skenario-jumlah-penduduk-di-ikn-nusantara-19-juta-orang>
- Thakur, V. (2012). *The Demographic Dividend in India: Gift or Curse? A State-level Analysis on Differing Age Structure and its Implications for India's Economic Growth Prospects*. Working paper series Development Studies Institute, London School of Economics and Political Sciences, No. 12-128.

World Bank. (2014, October 8). *wolrdbank.org>region>afr>publication*. Retrieved from [www.worldbank.org: https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/the-economic-impact-of-the-2014-ebola-epidemic-short-and-medium-term-estimates-for-west-africa#:~:text=In%20the%20%E2%80%9CLow%20Ebola%E2%80%9D%20scenario,and%20%2425.2%20billion%20in%202015](https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/the-economic-impact-of-the-2014-ebola-epidemic-short-and-medium-term-estimates-for-west-africa#:~:text=In%20the%20%E2%80%9CLow%20Ebola%E2%80%9D%20scenario,and%20%2425.2%20billion%20in%202015).



dp2kb.kukarkab.go.id